



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5806);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Jawa Barat Tahun 2018-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, Nomor 226);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.

6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Daerah Kabupaten Tasikmalaya periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan industri di Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.
10. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

BAB II

TUJUAN, DASAR ACUAN, SISTEMATIKA, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

RPIK disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 3

RPIK disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. potensi sumber daya industri Daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 4

(1) Sistematika RPIK, meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Sistematika Penulisan
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI.

- A. Kondisi Daerah
 - B. Sumber Daya Industri
 - C. Sarana dan Prasarana
 - D. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah
- c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.
- A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
 - B. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya
 - C. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya
 - D. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya.
- d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN.
- A. Strategi Pembangunan Industri
 - B. Program Pembangunan Industri
 1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan;
 2. Pengembangan Perwilayahan Industri;
 3. Pembangunan Sumber Daya Industri;
 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan
 5. Pemberdayaan Industri.
- e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Periodesasi pelaksanaan RPIK terbagi dalam empat tahapan yaitu:
 - a. tahap pertama Tahun 2020 - 2025;
 - b. tahap kedua Tahun 2026 - 2030;
 - c. tahap ketiga Tahun 2031 - 2035; dan
 - d. tahap keempat Tahun 2036 - 2040.
- (3) RPIK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, sesuai dengan periodesasi pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

Industri unggulan daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 7

Industri unggulan daerah yang dapat dikembangkan terdiri atas:

- a. Industri Pangan;
- b. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
- c. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam;
- d. Industri Elektronika dan Telematika; dan
- e. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengembangan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan industri unggulan Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan RPIK bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 4/123/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai produsen produk industri kecil yang handal, terutama di bidang kerajinan seperti kerajinan berbahan baku mendong, pandan, dan bambu. Selain itu bordir dari Tasikmalaya terkenal hingga ke mancanegara. Industri lain yang cukup banyak ditemukan di Tasikmalaya adalah industri Gula Aren. Sehingga program pengembangan industri kecil menengah diarahkan pada peningkatan daya saing dengan pemanfaatan sumberdaya lokal dalam menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif.

Dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB Kabupaten Tasikmalaya atas dasar harga berlaku pada Tahun 2017 mencapai 30,522 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,526 triliun rupiah dibandingkan dengan Tahun 2016 yang mencapai 27,996 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 20,825 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 22,063 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan selama tahun 2017 Kabupaten Tasikmalaya mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,64 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Ketentuan dimaksud menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015, ditentukan 10 (sepuluh) Industri prioritas nasional yang dikelompokkan kedalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu.

Untuk di tingkat daerah kabupaten/kota, diharuskan untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Tasikmalaya perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya dengan mengacu kepada RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, RPIK ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2020-2040

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020-2040

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan pengembangan industri sesuai dengan potensinya sebagaimana ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, semakin memperkuat peran industri dalam perekonomian Nasional dan menjadi salah satu pilar penting dalam struktur perekonomian nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan. Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas 39 Kecamatan dan memiliki desa sebanyak 351 desa. Kabupaten Tasikmalaya berada di Provinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah yang cukup luas, yaitu 270.871,8 ha atau sekitar 8% dari luas total Provinsi Jawa Barat, dirasa Kabupaten Tasikmalaya mampu menyediakan lahan untuk mengakomodir minat para investor membangun industri disini. Terlebih telah dibukanya Bandara Wiriadinata menjadi bandara komersil pada Juli 2017 yang terletak di Kota Tasikmalaya dan adanya rencana pembangunan jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya melalui ruas jalan Provinsi, akan menjadi daya tarik tersendiri juga menambah minat para investor untuk menjalankan investasinya disini.

Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam 9 besar Upah Minimum Kabupaten terendah di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar Rp2.075.189,00 pada Tahun 2019. Dengan Upah Minimum Kabupaten yang cukup rendah, Kabupaten Tasikmalaya cocok untuk dibangun industri yang sifatnya padat karya. Potensi tenaga kerja disini juga cukup baik, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tasikmalaya adalah 93,75% atau sebesar 867.603 orang pada Tahun 2019. Sedangkan total jumlah penduduknya pada Tahun 2019 yaitu sebesar 1.754.128 jiwa. Tingkat pengangguran sebesar 6,61% dan diharapkan dengan adanya pertumbuhan

industri dapat menyerap lebih banyak pekerja dan menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya.

Potensi industri di Kabupaten Tasikmalaya masih didominasi oleh industri kecil. Berdasarkan data Tahun 2019, terdapat 410 sentra industri kecil, dengan total jumlah unit usaha sebanyak 16.188 unit usaha, menyerap tenaga kerja sebanyak 121.888 orang dan nilai investasi mencapai Rp179.324.000.000,00 dari potensi 410 sentra tersebut, terdiri atas industri kecil non formal sebanyak 13.925 unit usaha, menyerap tenaga kerja sebanyak 97.798 orang dengan nilai investasi sebesar Rp46.832.000.000,00 industri kecil formal sebanyak 2.058 unit usaha, menyerap tenaga kerja sebanyak 22.754 orang dengan nilai investasi sebesar Rp59.829.000.000,00 dan industri menengah formal terdapat 152 unit usaha, menyerap tenaga kerja sebanyak 1.637 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp71.664.000.000,00.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber daya alam seperti perkebunan, pertanian, pertambangan dan kelautan yang cukup melimpah serta lahan untuk pengembangan industri yang cukup tersedia untuk pembangunan Kawasan Industri dan sentra Industri Kecil Menengah.

Dengan segala potensinya, baik dari aksesibilitas dan infrastruktur pendukung lainnya, potensi sumber daya alam, industri potensial eksisting, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan minat para investor industri tentu perlu didukung dengan perencanaan yang cukup baik sebagai pedoman penentu arah kebijakan industri termasuk dalam hal penyediaan lahan, rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung dan lain sebagainya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, mengamanatkan bahwa pengembangan industri di Kabupaten Tasikmalaya diarahkan pada pola pengembangan industri yang tersebar di wilayah kecamatan yang ada di kabupaten Tasikmalaya, pengembangan industri kreatif di Rajapolah dan tersedianya lahan untuk Kawasan Peruntukan Industri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sebagai acuan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Sejalan dengan yang direkomendasikan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan Wilayah Pengembangan Priangan Timur pada bidang industri, untuk Kabupaten Tasikmalaya diarahkan pada pengembangan agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, dan pusat pengembangan industri kerajinan.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan memperhatikan:

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
2. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Provinsi Jawa barat;

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Potensi sumber daya industri Daerah;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
8. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi industri kecil yang cukup besar, peluang kedepan, dengan akan dibangunnya jalan tol Cileunyi-Garut Tasikmalaya (Cigatas) dan difungsikan serta dibangunnya lapangan udara Wiriadinata Cibeureum Kota Tasikmalaya sebagai bandara komersial, akan lebih membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam sektor industri di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian sesuai amanat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Kabupaten Tasikmalaya perlu untuk melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengamanatkan setiap Gubernur untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi, serta Pasal 11 ayat (1) yang mengamanatkan bupati/walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya 2020–2040 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sistematika yang disusun adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri, dan pentingnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya.

B. Dasar Hukum

Menguraikan dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan RIPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2040.

C. Sistematika Penulisan

Menguraikan sistematika penyusunan RPIK Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri.

B. Sumber daya Industri

Menguraikan sumberdaya manusia sektor industri, sumberdaya alam sebagai bahan baku dan energi serta pembiayaan industri.

C. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumberdaya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi.

D. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

Menguraikan jumlah unit usaha sektor industri, potensi industri kecil menengah, produk industri kerajinan, dan potensi industri besar.

- BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya.
 - B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya.
 - C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

- A. Strategi Pembangunan Industri
- B. Program Pembangunan Industri
 - 1. Penetapan, Sasaran, dan Program Pengembangan Industri Unggulan.
 - 2. Pengembangan Perwilayahan Industri.
 - 3. Pembangunan Sumber Daya Industri.
 - 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
 - 5. Pemberdayaan Industri.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I sampai dengan Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri Kabupaten selama 20 tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

1. Aspek Geografis dan Administratif

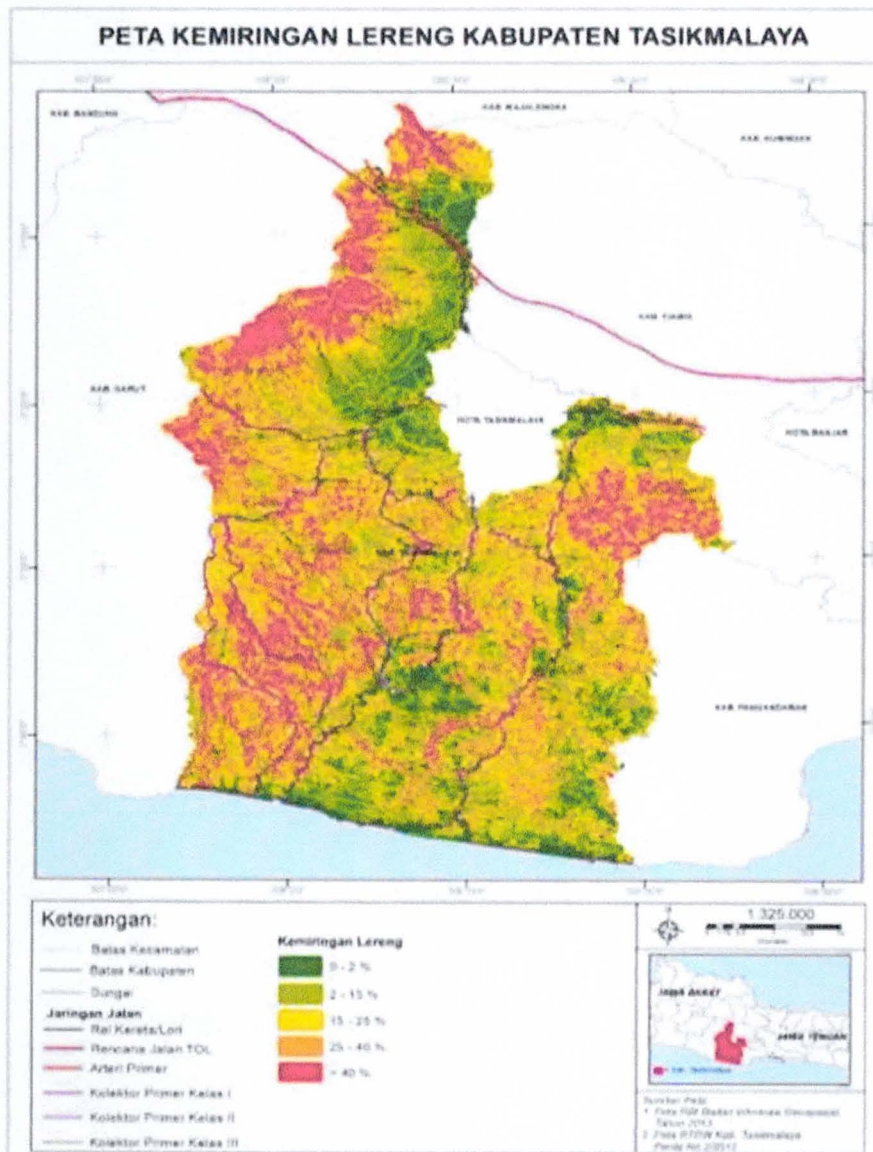
Kabupaten Tasikmalaya memiliki luas 270.871,8 Ha secara geografis terletak di antara 7°02'29" dan 7°49'08" lintang selatan serta 107°54'10" dan 108°25'42" bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran;
- sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Garut.

Berikut merupakan kondisi lahan di Kabupaten Tasikmalaya:

a. Topografi

Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemiringan lereng bervariasi yang didominasi dengan kemiringan 0-15%.

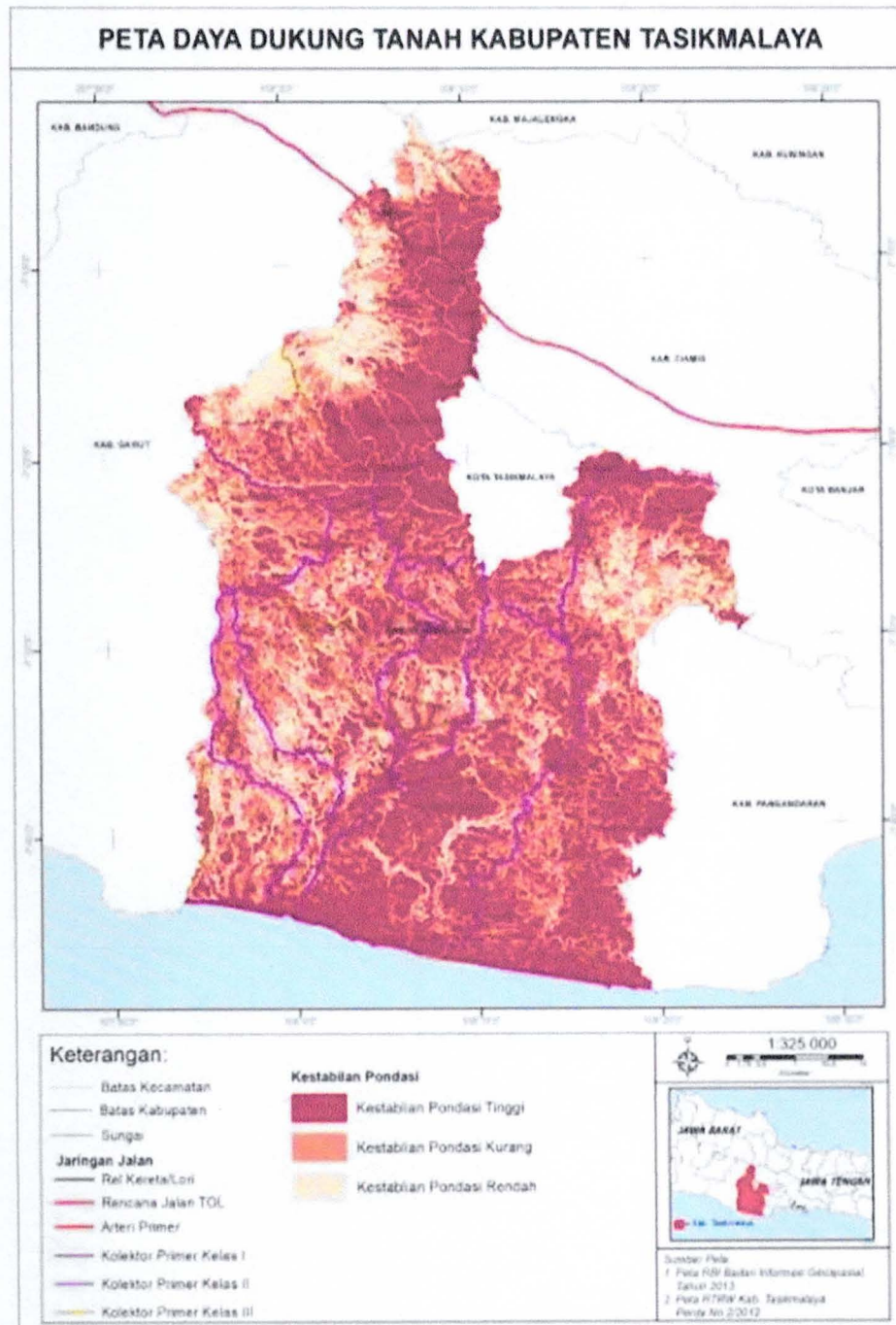


Sumber: Hasil Analisis, 2019

Gambar II. 1 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tasikmalaya

b. Daya Dukung Tanah

Daya dukung tanah berhubungan dengan kemampuan tanah untuk dibangun kegiatan industri. Tanah dengan kestabilan pondasi yang tinggi dianggap mampu untuk dijadikan Kawasan Peruntukan Industri, sedangkan tanah dengan kestabilan pondasi yang kurang dapat dijadikan Kawasan Peruntukan Industri dengan menggunakan pondasi yang dalam, dan tanah dengan kestabilan pondasi rendah tidak disarankan untuk dijadikan Kawasan Peruntukan Industri.



Sumber : RTRW Kabupaten Tasikmalaya

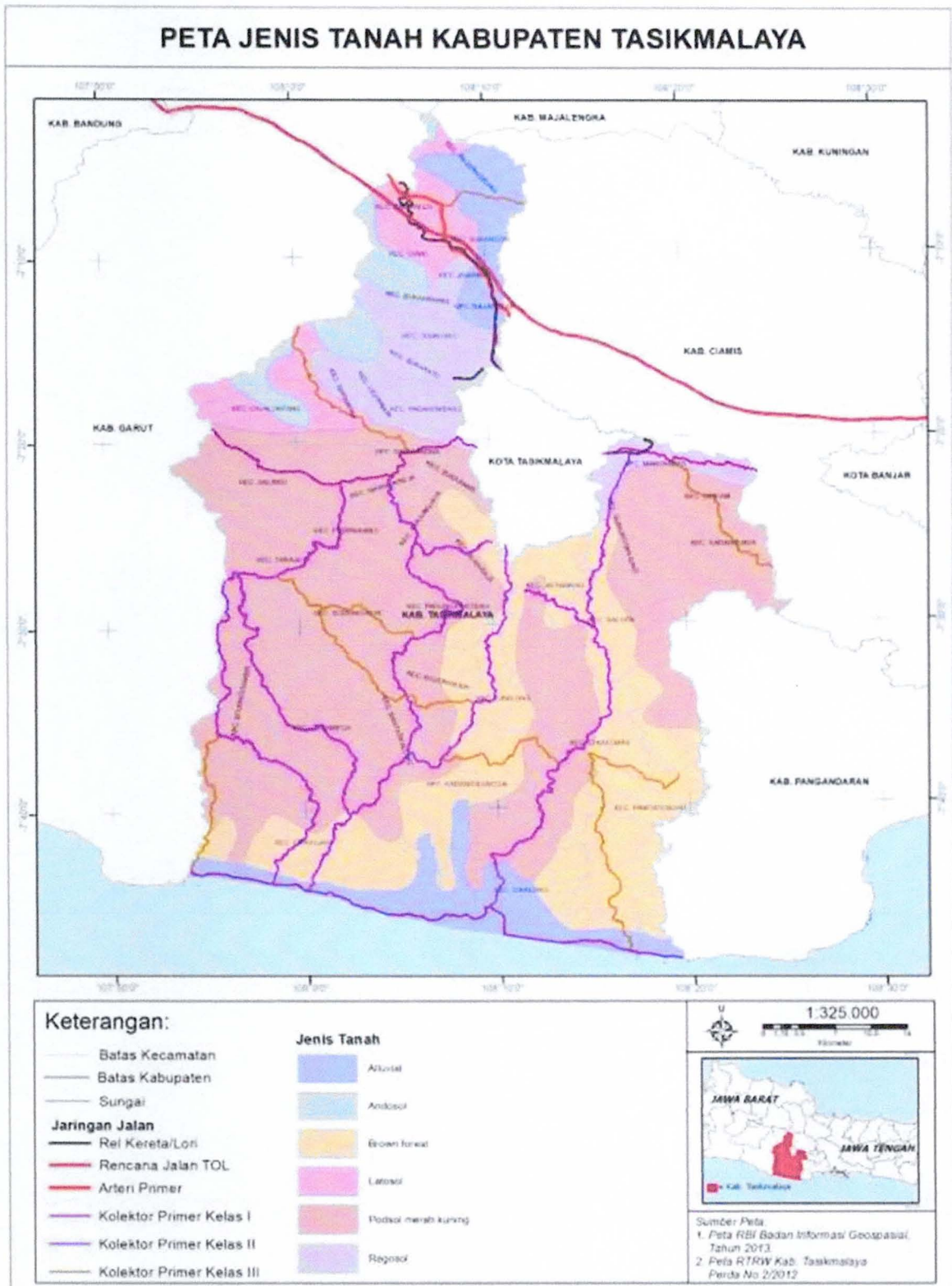
Gambar II.2 Peta Daya Dukung Tanah Kabupaten Tasikmalaya

c. Kesuburan Tanah

Kesuburan tanah dapat dilihat berdasarkan jenis tanahnya. Kabupaten Tasikmalaya memiliki 6 jenis tanah yang kemudian dianalisis seperti apa kesuburan tanahnya. Berikut adalah karakteristik jenis tanah di Kabupaten Tasikmalaya yang dihubungkan dengan kesuburannya.

Tabel II.1 Karakteristik Jenis dan Kesuburan Tanah, Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Tanah	PH	Permeabilitas	Kesuburan	Keterangan
1	Andosol	5 – 7	Sedang	Subur	Jenis tanah yang terdiri atas abu vulkanik yang memiliki kandungan organik tinggi dan sensitif terhadap pengaruh erosi.
2	Alluvial	5 - 5,9	Lambat	Subur	Jenis Tanah Lempung/berpasir merupakan jenis tanah dari hasil pengendapan.
3	Latosol	4,5 - 6,5	Baik	Tidak Subur	Tanah ini memiliki tekstur berbatu dan keras. Jenis tanah ini pada dasarnya merupakan bentuk pelapukan dari batuan vulkanis
4	Brown Forest	6 – 7	Sedang	Subur	Tanah ini merupakan tanah mineral yang masih muda.
5	Posdol Merah Kuning	4,5 – 5	Lambat	Tidak Subur	Berasal dari bahan induk batuan kuarsa.
6	Regosol	4 - 5,5	Cepat	Subur	Jenis tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api, memiliki tingkat erosi yang tinggi



Sumber : RTRW Kabupaten Tasikmalaya

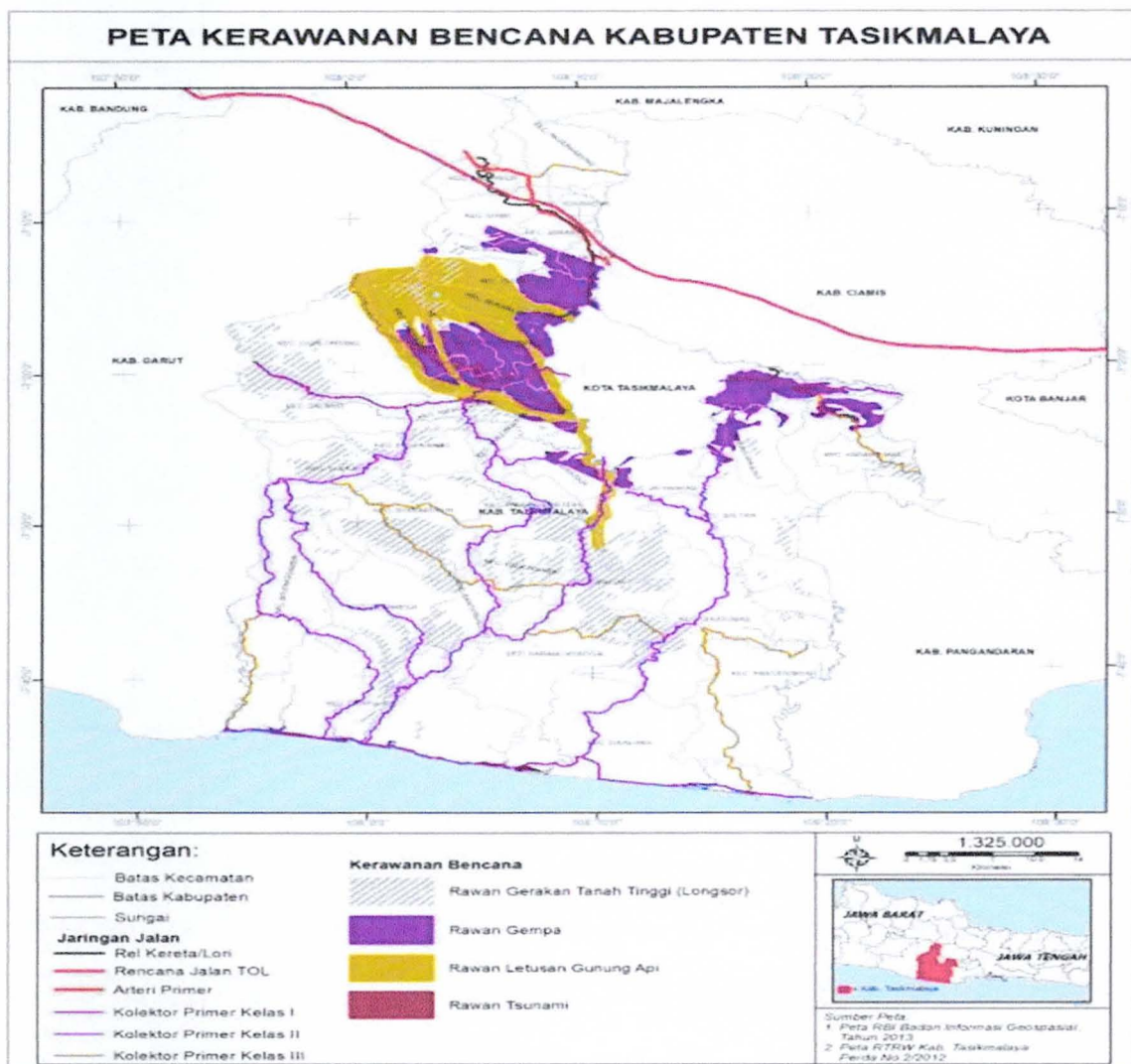
Gambar II.3 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tasikmalaya

d. Rawan Bencana

1) Bencana Gempa bumi

Kawasan rawan gempa bumi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya meliputi: Kecamatan Ciawi, Sukahening, Rajapolah, Cisayong, Sukaratu, Padakembang, Leuwisari, Sariwangi, Singaparna, Sukareme, Tanjungjaya, Sukaraja, Jatiwaras, Gunungtanjung, Manonjaya, Cineam.

- 2) Bencana Longsor - Rawan Gerakan Tanah
Terdapat sebagian wilayah yang berada pada daerah rawan bencana gerakan tanah yang cukup tinggi, dan memiliki potensi terjadinya longsor, seperti yang terlihat pada peta kerawanan bencana dibawah.
- 3) Bencana Letusan Gunung Api
Kawasan bencana alam berupa letusan gunung berapi di Kabupaten Tasikmalaya ini berada pada daerah bagian utara yang merupakan kawasan Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya dan Karaha Bodas terletak di Kabupaten Tasikmalaya dan Garut. Daerah yang rawan terhadap letusan gunung berapi di Kabupaten Tasikmalaya meliputi: Kecamatan Cibalong, Cigalontang, Cisayong, Jatiwaras, Leuwisari, Mangunreja, Padakembang, Sariwangi, Singaparna, Sukaraja, Sukaratu dan Tanjungjaya.
- 4) Tsunami
Daerah bagian selatan khususnya pesisir yang termasuk kawasan rawan bencana alam tsunami di Kabupaten Tasikmalaya meliputi Kecamatan Cicalong, Cipatujah dan Karangnunggal.

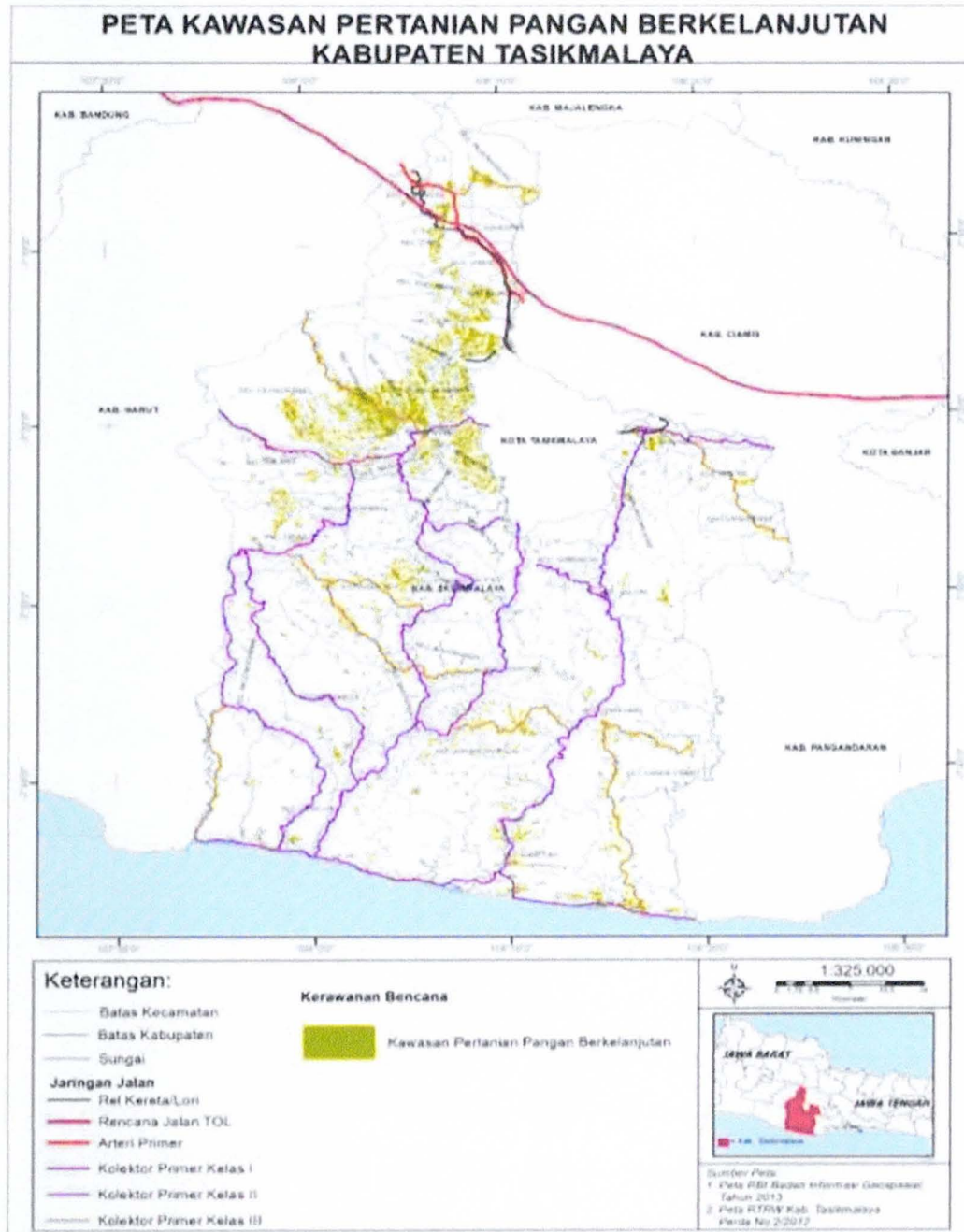


Sumber : RTRW Kabupaten Tasikmalaya

Gambar II.4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Tasikmalaya

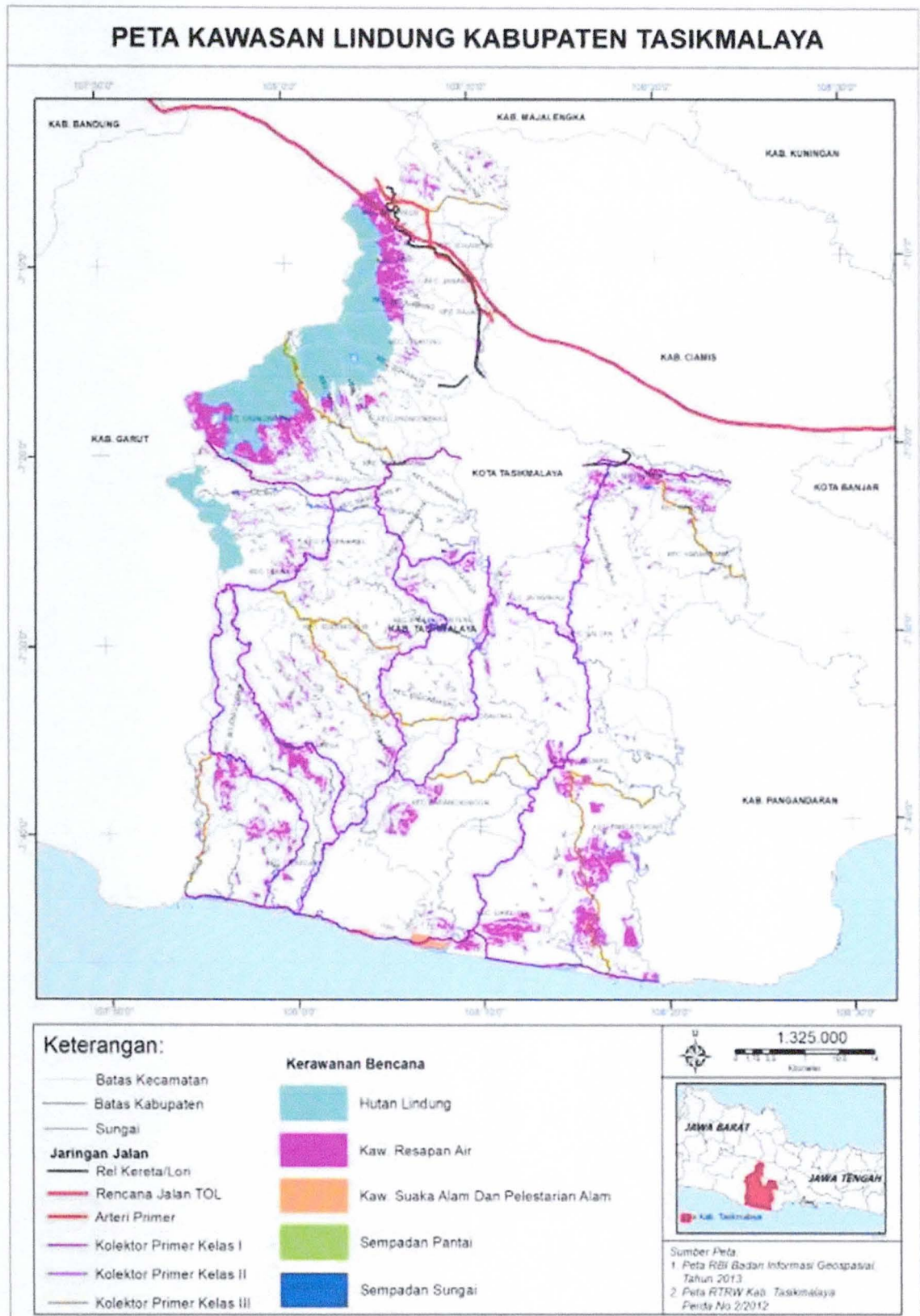
e. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan Kawasan Peruntukan Industri adalah daerah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan kawasan lindung. Wilayah yang termasuk KP2B dan kawasan lindung digambarkan dalam peta sebagai berikut:



Sumber : RTRW Kabupaten Tasikmalaya

Gambar II.5 Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tasikmalaya



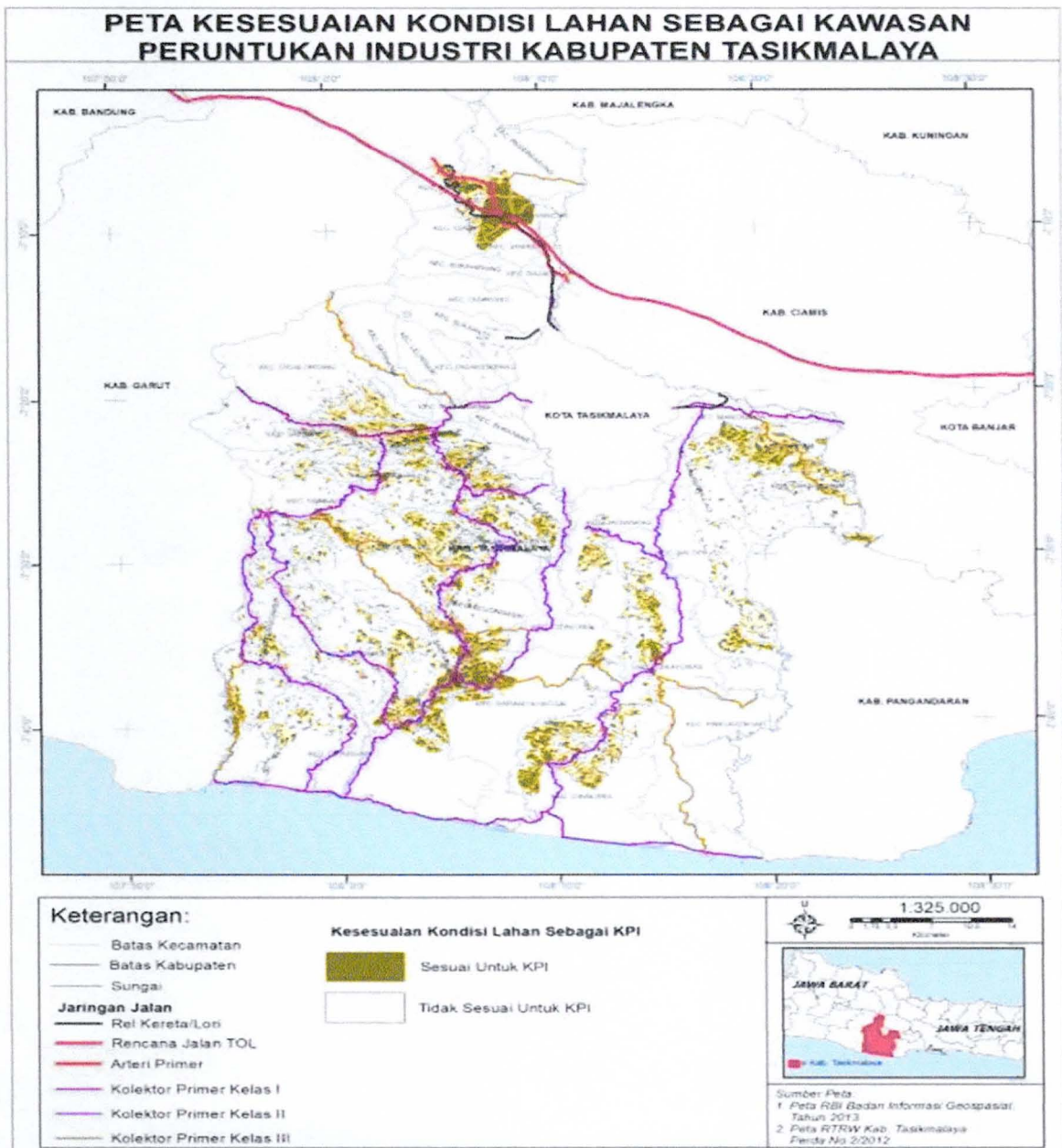
Sumber : RTRW Kabupaten Tasikmalaya

Gambar II. 6 Peta Kawasan Lindung Kabupaten Tasikmalaya

Lahan yang sesuai untuk dijadikan Kawasan Peruntukan Industri dianalisis berdasarkan data dari kondisi lahan yang didapat, analisis menggunakan metode *overlay* (tumpang tindih) dari peta-peta kondisi lahan yang telah dihasilkan sebelumnya. Daerah yang sesuai untuk dijadikan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tasikmalaya dianalisis dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Lereng < 15 %.
- 2) Daya dukung lahan baik dengan stabilitas pondasi yang tinggi dan kurang.
- 3) Tidak berada pada daerah rawan letusan gunung api, longsor (gerakan tanah tingkat tinggi), rawan tsunami, serta rawan gempa.
- 4) Tidak berada pada wilayah yang subur berdasarkan jenis tanahnya.
- 5) Bukan merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan bukan berupa kawasan lindung seperti: hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan suaka alam dan pelestarian alam, sempadan pantai, dan sempadan sungai.

Berdasarkan hasil *overlay* dengan kriteria seperti yang disebutkan diatas, wilayah yang sesuai untuk dijadikan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada peta berikut:



Sumber: Hasil Analisis, 2019

Gambar II. 7

Peta Kesesuaian Kondisi Lahan sebagai Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya dengan ibukota di Singaparna terdiri dari 39 Kecamatan dan 351 Desa. Kecamatan Cipatujah merupakan kecamatan terluas sedangkan Kecamatan Rajapolah merupakan kecamatan tersempit. Berikut adalah kecamatan dan luas wilayah administrasinya:

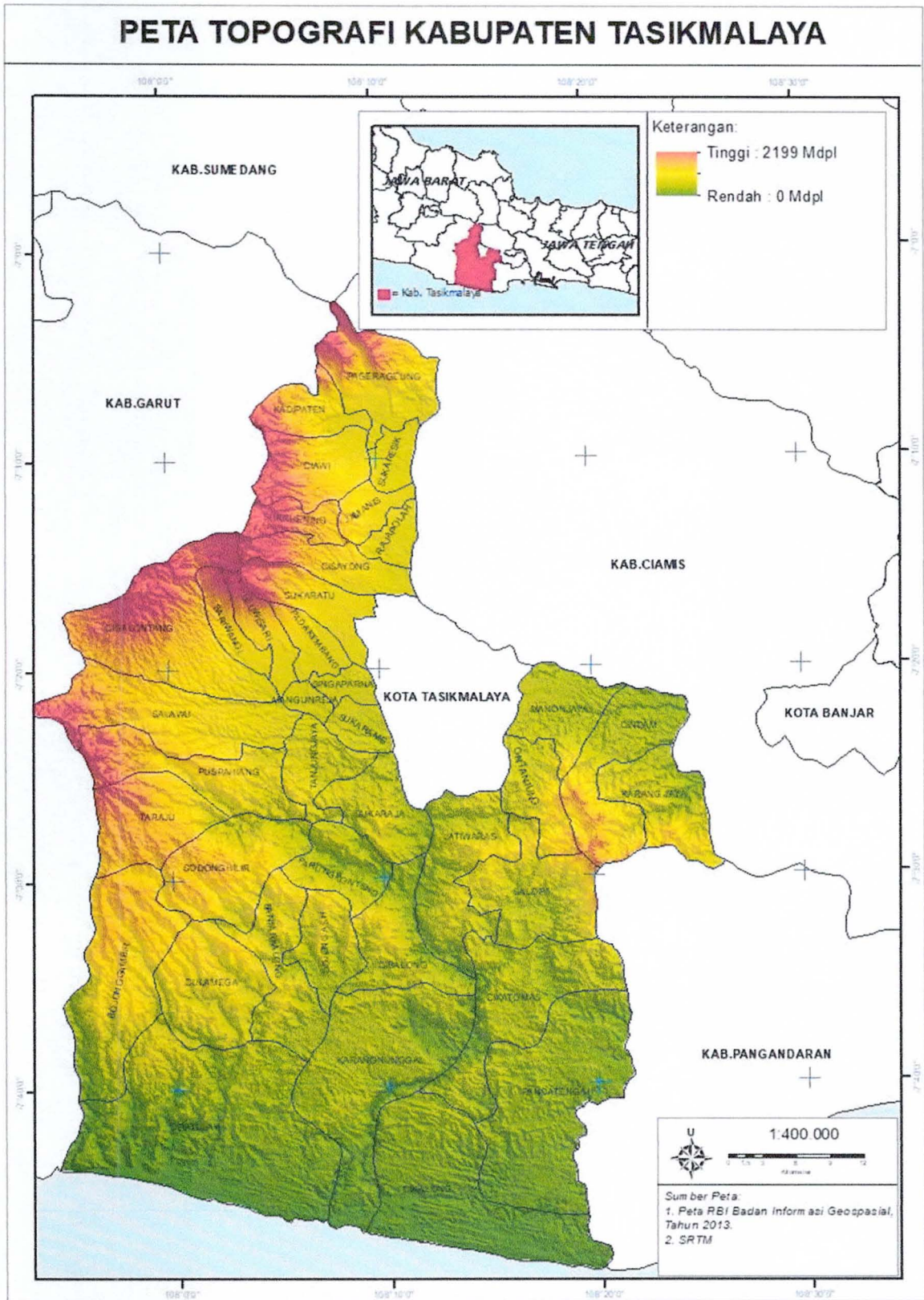
Tabel II. 2 Luas Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Kecamatan	Luas (ha)	No	Kecamatan	Luas (ha)	No	Kecamatan	Luas (ha)
1.	Cipatujah	23.885,6	14.	Salawu	7.401,1	27.	Cigalontang	14.156,3
2.	Karangnunggal	15.372,9	15.	Puspahiang	5.737,0	28.	Leuwisari	3.002,9
3.	Cikalong	16.046,6	16.	Tanjungjaya	3.720,6	29.	Sariwangi	4.015,0
4.	Pancatengah	16.072,8	17.	Sukaraja	4.741,5	30.	Padakembang	1.992,2
5.	Cikatomas	14.459,8	18.	Salopa	10.653,6	31.	Sukaratu	4.280,7
6.	Cibalong	6.167,4	19.	Jatiwaras	8.776,7	32.	Cisayong	5.069,3
7.	Parungponteng	5.071,9	20.	Cineam	7.218,0	33.	Sukahening	2.945,4
8.	Bantarkalong	6.476,9	21.	Karangjaya	4.809,3	34.	Rajapolah	1.521,8
9.	Bojongasih	4.983,4	22.	Manonjaya	4.280,9	35.	Jamanis	1.751,7
10.	Culamega	8.641,6	23.	Gunungtanjung	4.776,6	36.	Ciawi	4.664,5
11.	Bojongsambir	13.337,5	24.	Singaparna	1.947,8	37.	Kadipaten	4.318,1
12.	Sodonghilir	9.720,2	25.	Sukarame	1.646,9	38.	Pagerageung	6.334,6
13.	Taraju	6.409,6	26.	Mangunreja	2.808,0	39.	Sukaresik	1.655,1
KABUPATEN TASIKMALAYA								270.871,8

Tabel II. 3 Sebaran Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya

NO	KETINGGIAN (M DPL)	SEBARAN (KECAMATAN)
1.	0 - 500	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Jatiwaras. Kadipaten, Karangjaya, Karangnunggal, Leuwisari, Mangunreja, Manonjaya, Padakembang, Pagerageung, Parungpoteng, Pancatengah, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Singaparna, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju.
2.	500 - 1.000	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Jatiwaras. Kadipaten, Karangjaya, Leuwisari, Mangunreja, Padakembang, Pagerageung, Parungpoteng, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju.
3.	1.000 - .500	Ciawi, Cigalontang, Cineam, Cisayong, Kadipaten, Leuwisari, Pagerageung, Puspahiang, Salawu, Salopa, Sariwangi, Sukahening, Sukaratu, dan Taraju.
4.	1.500 - 2.000	Ciawi, Cigalontang, Cisayong, Kadipaten, Leuwisari, Pagerageung, Sariwangi, Sukahening, dan Sukaratu.
5.	2.000 -2.500	Cigalontang, Cisayong, Sariwangi, Sukahening, dan Sukaratu.
JUMLAH		

Sumber : Hasil Analisis Peta RBI 1 : 25.000



Sumber : Hasil Analisis SRTM

Gambar II. 9 Peta Topografi Kabupaten Tasikmalaya

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2019 berdasarkan data Kabupaten Tasikmalaya dalam angka Tahun 2020 adalah sebesar 1.754.128 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 648 jiwa/km². Penduduk terpadat berada di Kecamatan Singaparna, sedangkan kepadatan terjarang berada di Kecamatan Cipatujah.

Tabel II. 4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2019	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2019	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Cipatujah	66.575	270	21.	Karangjaya	11.823	247
2.	Karangnunggal	84.807	622	22.	Manonjaya	62.238	1.579
3.	Cikalong	63.695	456	23.	Gunungtanjung	30.381	904
4.	Pancatengah	46.552	231	24.	Singaparna	69.330	2.793
5.	Cikatomas	49.775	375	25.	Mangunreja	39.396	1.329
6.	Cibalong	33.221	567	26.	Sukarame	40.503	2.033
7.	Parungponteng	35.713	756	27.	Cigalontang	74.045	618
8.	Bantarkalong	36.097	603	28.	Leuwisari	40.548	761
9.	Bojongasih	20.339	527	29.	Padakembang	35.106	707
10.	Culamega	24.801	363	30.	Sariwangi	40.327	1.069
11.	Bojonggambir	40.127	237	31.	Sukaratu	50.082	877
12.	Sodonghilir	63.773	685	32.	Cisayong	59.278	998
13.	Taraju	40.024	717	33.	Sukahening	31.486	1.108
14.	Salawu	59.819	1.185	34.	Rajapolah	48.980	2.283
15.	Puspahiang	34.298	983	35.	Jamanis	37.110	1.744
16.	Tanjungjaya	43.865	1.196	36.	Ciawi	64.019	1.413
17.	Sukaraja	51.534	1.196	37.	Kadipaten	37.044	809
18.	Salopa	47.968	394	38.	Pagerageung	57.855	867
18.	Jatiwaras	51.303	699	39.	Sukaresik	38.828	2.181
20.	Cineam	33.831	429	Jumlah		1.754.128	648

Sumber: Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2020

3. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya atas dasar harga berlaku pada Tahun 2019 mencapai 37,219 milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 3,249 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 33,970 milyar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 23,320 milyar rupiah pada Tahun 2018 menjadi 24,587 milyar rupiah pada Tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2020 Kabupaten Tasikmalaya mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,43 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.

Jika dilihat dari PDRB per kapita, yaitu PDRB daerah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut, Kabupaten Tasikmalaya masih belum menunjukkan kinerja yang baik. PDRB perkapita Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2019 tercatat sebesar 20,72 juta

rupiah, namun masih berada di bawah Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita Provinsi Jawa Barat sebesar 34,88 juta dan PDB perkapita Indonesia sebesar 47,96 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya harus lebih baik lagi dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada.

Tabel II. 5 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Tasikmalaya, 2015-2019

Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
ADHB	25.666,17	27.995,95	30.522,29	33.970,25	37.218,87
ADHK (Harga Konstan 2010)	19.662,49	20.824,80	22.063,29	23.319,95	24.586,90
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)					
ADHB	14,78	16,07	17,47	19,40	20,72
ADHK (Harga Konstan 2010)	11,33	11,95	12,63	13,32	13,69
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	3,87	5,53	5,64	5,47	2,78

* Angka Sementara

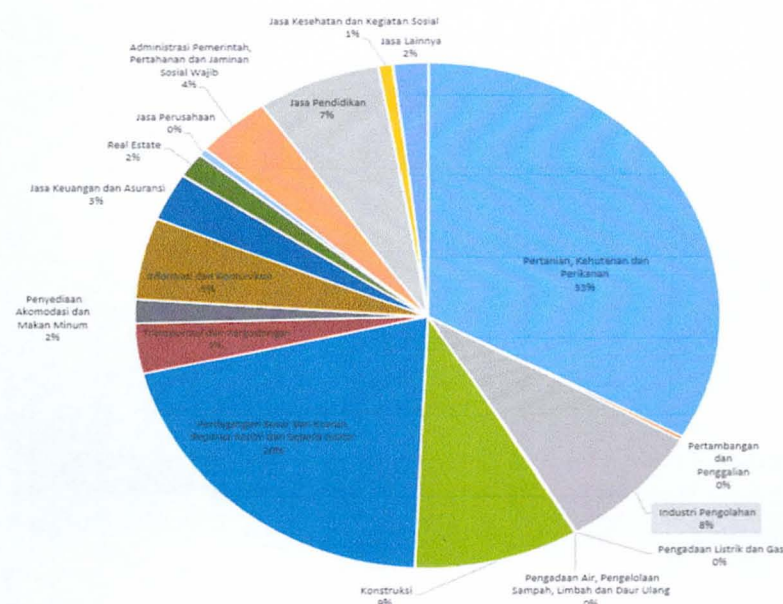
Tabel II. 6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2015–2019

Lapangan Usaha	PDRB Berdasarkan Harga Konstan (milyar rupiah)									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	RP	%	RP	%	RP	%	RP	%	RP	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.073,80	35,98	7.395,91	35,51	7.780,41	35,26	8.031,42	34,44	8.156,66	33,17
Pertambangan dan Penggalian	60,01	0,31	59,69	0,29	59,83	0,27	61,89	0,27	61,39	0,25
Industri Pengolahan	1.457,77	7,41	1.553,07	7,46	1.655,41	7,50	1.817,90	7,80	1.988,530	8,09
Pengadaan Listrik dan Gas	14,82	0,08	15,58	0,07	16,16	0,07	16,97	0,07	17,41	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,63	0,02	3,84	0,02	4,14	0,02	4,55	0,02	4,95	0,02
Konstruksi	1.684,50	8,57	1.778,41	8,54	1.917,81	8,69	2.063,53	8,85	2.238,21	9,10
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.095,24	20,83	4.334,85	20,82	4.481,94	20,31	4.698,01	20,15	5.040,10	20,50

Lapangan Usaha	PDRB Berdasarkan Harga Konstan (milyar rupiah)									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	RP	%	RP	%	RP	%	RP	%	RP	%
Transportasi dan Pergudangan	644,52	3,28	683,91	3,28	728,27	3,30	769.53	3.30	824.84	3.35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	277,81	1,41	288,26	1,38	313,38	1,42	341.40	1.46	375.02	1.53
Informasi dan Komunikasi	802,48	4,08	918,45	4,41	1.034,66	4,69	1.137.83	4.88	1.263.35	5.14
Jasa Keuangan dan Asuransi	610,40	3,10	655,22	3,15	681,89	3,09	715.33	3.07	737.16	3.00
Real Estate	286,06	1,45	293,89	1,41	323,18	1,46	356.03	1.53	390.64	1.59
Jasa Perusahaan	83,07	0,42	90,69	0,44	99,69	0,45	108.84	0.47	118.90	0.48
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	931,91	4,74	953,46	4,58	962,10	4,36	980.43	4.20	1.014.26	4.13
Jasa Pendidikan	1.188,01	6,04	1.316,20	6,32	1.457,05	6,60	1.604.20	6.88	1.692.35	6.88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	126,13	0,64	140,23	0,67	158,03	0,72	175.57	0.75	192.87	0.78
Jasa Lainnya	322,34	1,64	343,15	1,65	389,32	1,76	436.42	1.87	470.29	1.91
Total	19.662,50	100,00	20.824,81	100,00	22.063,27	100,00	23.3190,91	100,00	24.586,93	100,00

Sumber : Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka, BPS, 2020

Tabel II. 7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliyar Rupiah) 2015–2029

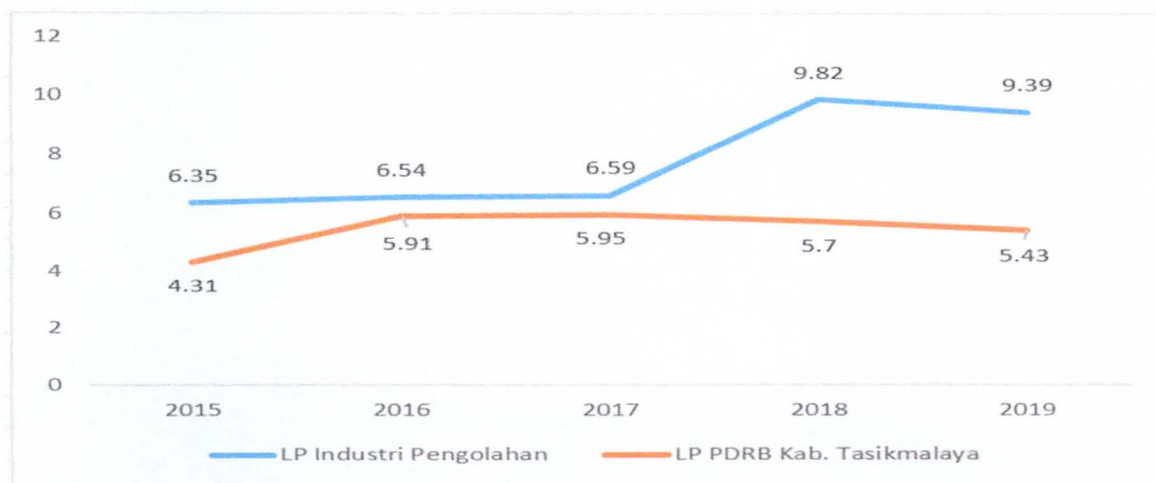


Meskipun laju pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Tasikmalaya tidak termasuk yang tertinggi, namun sektor tersebut selalu mencatat laju pertumbuhan yang positif dan relatif konstan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2019, laju pertumbuhan sektor ini adalah 8,09%.

Tabel II. 8 Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Tasikmalaya 2016 – 2020 (Persen)

LAPANGAN USAHA	Laju pertumbuhan PDRB					Rata-Rata Pertumbuhan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,31	4,55	5,20	3,23	1,56	2.85
Pertambangan dan Penggalian	0,39	-0,54	0,24	3,43	-0,81	0.54
Industri Pengolahan	6,35	6,54	6,59	9,82	9,39	7.74
Pengadaan Listrik dan Gas	4,00	5,11	3,76	4,96	2,66	4.10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,41	5,68	7,98	9,98	8,81	7.17
Konstruksi	5,90	5,57	7,84	7,60	8,46	7.07
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,51	5,85	3,39	4,82	7,28	5.37
Transportasi dan Pergudangan	9,82	6,11	6,49	5,67	7,19	7.06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,69	3,76	8,72	8,94	9,84	7.19
Informasi dan Komunikasi	16,98	14,45	12,65	9,97	11,03	13.02
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,43	7,34	4,07	4,90	3,05	5.56
Real Estate	4,16	2,74	9,97	10,17	9,72	7.35
Jasa Perusahaan	8,76	9,18	9,92	9,18	9,24	9.26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,49	2,31	0,91	1,91	3,45	2.21
Jasa Pendidikan	11,51	10,79	10,70	10,10	5,49	9.72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,55	11,18	12,69	11,10	9,85	11.27
Jasa lainnya	9,86	6,46	13,45	12,10	7,76	9.93
KAB. TASIKMALAYA	4,31	5,91	5,95	5,70	5,43	5.46

Sumber : Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka, BPS, 2020



Gambar II. 10 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

B. Sumber Daya Industri

1. Sumber Daya Manusia Sektor Industri

a. Angkatan Kerja dan Struktur Mata Pencaharian

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat partisipasi angkatan kerja disini dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}}$$

Tingkat Pengangguran dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Pengangguran Terbuka}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}$$

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2019 adalah 66,66% dan tingkat pengangguran sebesar 6,25%.

Tabel II. 9 Kegiatan Utama Penduduk Usia Kerja Kabupaten Tasikmalaya

Kegiatan Utama	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja	845.869	792.039	816.033	830.877	867.603
Bekerja	787.281	724.664	762.133	774.131	813.411
Pengangguran Terbuka	58.588	67.375	53.900	56.746	54.192
Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, dsb)	405.467	471.854	467.890	462.691	433.946
Jumlah Penduduk Usia Kerja	1.251.336	1.263.893	1.283.923	1.293.568	1.301.549
Tingkat Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%)	93,07	91,49	93,39	93,17	93,75
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,60	62,67	63,56	64,23	66,66
Tingkat Pengangguran (%)	6,93	8,51	6,61	6,83	6,25

Sumber: Hasil Analisis data Kependudukan, Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2016 Sampai 2020

b. Penduduk yang Bekerja Sesuai Lapangan Usaha

Berdasarkan struktur lapangan usaha, penduduk Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. Pekerja di sektor industri pengolahan partisipasinya cenderung menurun dimulai dari 2011 yang semula mencapai 26,18 % menjadi 16,58% pada Tahun 2014, kemudian mulai meningkat partisipasinya pada Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Tabel II. 10 Penduduk Usia Kerja yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tasikmalaya

Lapangan Usaha	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja menurut Lapangan Usaha													
	2011		2012		2013		2014		2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	206.140	30,43	237.393	29,26	277.217	35,23	206.140	30,43	237.393	29,26	277.217	35,23	198.150	25,60
Industri Pengolahan	177.332	26,18	195.772	24,13	154.656	19,65	177.332	26,18	195.772	24,13	154.656	19,65	143.357	18,52
Perdagangan, Hotel, Rumah Makan	125.181	18,48	169.242	20,86	161.131	20,48	125.181	18,48	169.242	20,86	161.131	20,48	201.193	25,99
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	71.984	10,63	101.983	12,57	105.693	13,43	71.984	10,63	101.983	12,57	105.693	13,43	103.141	13,32
Lainnya	96.816	14,29	106.932	13,18	88.230	11,21	96.816	14,29	106.932	13,18	88.230	11,21	128.290	16,57
TOTAL	677.453	100	811.323	100	786.927	100	677.453	100	811.323	100	786.927	100	774.131	100

Sumber: Hasil Analisis data Kependudukan, Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2019

2. Potensi Sumber Daya Alam dan Komoditas Unggulan

Sumber daya alam di Kabupaten Tasikmalaya cukup beragam terutama pada sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Potensi sumber daya alam dari berbagai sektor antara lain:

a. Pertanian

Dari sektor pertanian tanaman pangan, produksi padi merupakan yang paling potensial disini, luas areal tanam padi di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 128.589 Ha dan jumlah produksinya sebesar 814.372 ton per tahun.

Tabel II. 11 Produksi Pertanian Kabupaten Tasikmalaya

No.	Komoditas	Luas Areal Tanam (Ha)	Produksi/th (ton)	Lokasi Kecamatan
1.	Padi	128.589	814.372	Tersebar di seluruh Kecamatan
2.	Jagung	10.355	37.801	Karangnunggal, Salopa, Salawu, Bantarkalong, Parungponteng, Pancatengah, Cipatujah, Kadipaten Cigalontang, Rajapolah, Pagerageung, Cibalong, Sodonghilir, Culamega, Cineam, Sukaraja
3.	Kedelai	5.047	6.476	Cipatujah, Jatiwaras, Sukaraja, Culamega, Pancatengah, Parungponteng, Rajapolah, Jamanis, Manonjaya, Bojongasih, Cibalong, Karangnunggal dan Bantarkalong
4.	Ubi Kayu	9.273	299.705	Cipatujah, Cikatomas, Bantarkalong, Jatiwaras, Karangnunggal, Karangjaya, Salopa, Cineam, Culamega, Pancatengah dan Pagerageung
5.	Ubi Jalar	1.474	20.876	Bojongasih, Bantarkalong, Karangnunggal Cineam, Karangjaya, Tanjungjaya dan Sodonghilir
6.	Kacang Tanah	2.449	5.565	Salopa, Pancatengah, Cikalong, Jatiwaras, Cipatujah, Kadipaten, Karangnunggal, Cineam, Sukaresik, Cikatomas dan Sukaraja

Sumber : Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

b. **Peternakan**

Komoditas ternak strategis di Kabupaten Tasikmalaya meliputi sapi potong, domba, sapi perah, kambing, ayam ras pedaging dan itik. Pada Tahun 2019 perkembangan populasi ternak tersebut berkisar antara 1,52 sampai dengan 23,87%, sedangkan jenis ternak yang prospektif untuk dikembangkan saat ini adalah sapi potong, sapi perah, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik.

Sektor peternakan khususnya sapi potong sangat terbuka untuk dikembangkan karena Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi daya dukung Sumber Daya Agribisnis dan Sumber Daya Manusia untuk pengembangan peternakan/sapi potong antara lain : potensi tanah pangan seluas 8.600,52 Ha, kebun rumput intensif seluas 483 Ha, produksi rumput 185.877,75 ton/bahan kering/tahun, kapasitas tampung ternak sebanyak 182.325,22 satuan ternak, dan Rumah Potong Hewan 3 buah.

c. **Perkebunan**

Sumber daya dari hasil perkebunan dan hortikultura yang dibutuhkan untuk perkembangan industri unggulan di sini antara lain kelapa, aren, dan pandan, komoditas tersebut merupakan beberapa dari sepuluh komoditas unggulan sektor perkebunan di

Tasikmalaya. Kelapa sebagai bahan baku keperluan rumah tangga, gula Kelapa sebagai bahan baku pabrik Kecap dan industri makanan ringan pada umumnya. Pandan merupakan bahan baku untuk kerajinan.

Luas areal perkebunan Kabupaten Tasikmalaya seluas 60.474,41 hektar yang terdiri dari:

- 1) Perkebunan Rakyat seluas 51.301,79 hektar
- 2) Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan luas HGU 6.444,16 hektar
- 3) PTP Nusantara VIII Bagjanegara dengan luas HGU 2.728,46 hektar

Tabel II. 12 Produksi Perkebunan, Kabupaten Tasikmalaya

No.	Komoditas	Luas Areal (ha)	Produksi/th (ton)	Lokasi Tanaman Menghasilkan (Kecamatan)
1	Kelapa	25.693,68	37.381,60	Tersebar di 39 Kecamatan
2	Teh	6.662,37	13.240,99	Bojonggambir, Ciawi, Cigalontang, Cisayong, Culamega, Kadipaten, Karangnunggal, Leuwisari, Mangunreja, Pagerageung, Puspahiang, Salawu, Sariwangi, Sodonghilir, Sukahening, Taraju.
3	Kopi	1.144,75	1.363,91	Tersebar di 39 Kecamatan.
4	Cengkeh	1.615,48	809,96	Tersebar di 39 Kecamatan
5	Aren	1.387,71	11,398,27	Tersebar di 39 Kecamatan
6.	Pandan	281,30	192,51	Cikalong, Cipatujah, Pagerageung, Parungponteng, Sukaresik, Rajapolah.
7	Kakao	223,86	169,79	Cibalong, Cineam, Kadipaten, pancatengah Parungponteng, Salopa, Sodonghilir, Sukahening.
8	Lada	454,56	351,55	Bojonggambir, Cibalong, Cikatomas, Cineam, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jatiwaras, Kadipaten, Karangjaya, Karangnunggal, Manonjaya, Padakembang, Pancatengah, Parungponteng, Salopa, Sodonghilir, Sukaraja, Tanjungjaya.
9	Karet	135,41	217,80	Bojongasih, Cipatujah, Karangjaya, Karangnunggal, Pancatengah, Salopa, Sodonghilir.
10	Jarak	118,25	314,98	Bojongasih, Karangnunggal, pancatengah.

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tasikmalaya Tahun 2019

Selain itu, dari bidang agribisnis yaitu nilam yang diolah menjadi minyak nilam. Bisnis ini memiliki prospek ekonomi yang cukup cerah, ada juga salak, dan bisnis yang paling menggiurkan ialah ekspor manggis. Manggis memiliki sumbangan cukup besar dalam

menopang perekonomian masyarakat wilayah Tasikmalaya. Komoditas ini juga sudah mampu menembus pasar manca negara. Sentra pemasaran manggis di Tasikmalaya adalah Kecamatan Puspahiang dengan volume penjualan 212 ton per tahun. Rantai pemasaran manggis di sentra produksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu untuk pasar lokal dan ekspor. Untuk pasar ekspor rantai pemasarannya adalah: petani—tengkulak—bandar—supplier—eksportir, dan untuk pasar lokal yaitu: petani—tengkulak—pasar lokal, atau petani—ngkulak—bandar—pasar lokal. Untuk pemasaran lokal, selain Tasikmalaya dan kabupaten sekitarnya, manggis juga dikirim ke Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Belum banyak industri pengolahan manggis disini, sehingga kedepannya perlu direncanakan perkembangan industri berbahan baku manggis, mengingat manggis juga merupakan komoditas unggulan disini.

d. Perikanan

Kabupaten Tasikmalaya sejak dahulu dikenal sebagai salah satu sentra budidaya ikan air tawar di Provinsi Jawa Barat. Komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan meliputi ikan mas, nilem, gurame, nila dan udang galah dan udang vaname. Produksi ikan air tawar di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019 yaitu sebanyak 44.536 ton.

Tabel II. 13 Potensi Perikanan, Kabupaten Tasikmalaya

N o.	Cabang Usaha	Potensi	Pemanfaatan	%
1.	Tambak	2.000 Ha	20	1,00
2.	Kolam Air Tenang (KAT):			
	Pembesaran	6.000Ha	3.295,20 Ha	54,92
	Pembenihan	366,59 Ha	299,86 Ha	81,80
3.	Sawah ikan	6.961,77 Ha	4.859 Ha	89,17
4.	Kolam Air Deras (KAD)	84 unit	27 unit	32,14
5.	KJA	150 unit	30 unit	20,00
6.	Keramba	100 unit	74 unit	74,00

Sumber : Profil Investasi Kabupaten Tasikmalaya, Tahun 2019

e. Kehutanan

Dari hasil hutan, komoditas bambu merupakan hasil hutan yang sangat membantu untuk bahan baku industri di Kabupaten Tasikmalaya. Kerajinan dan anyaman berbahan dasar bambu merupakan salah satu unggulan disini. Luas tanam bambu disini adalah 3.631,20 Ha dengan produktivitas 2.149.169 batang/tahun. Jumlah tersebutpun masih belum dapat memenuhi seluruh permintaan bambu disini. Kabupaten ini masih mendatangkan bambu dari luar Tasikmalaya seperti Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Potensi hutan memiliki peluang usaha yang cukup baik untuk dikembangkan dalam rangka produksi kayu-kayuan maupun hasil perkebunan. Kerjasama pengembangan hutan rakyat maupun

perkebunan rakyat sangat dimungkinkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun potensi kehutanan dan perkebunan secara terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel II. 14 Produksi Hutan, Kabupaten Tasikmalaya

No	Komoditas	Luas Areal (Ha)	Produksi/Tahun	Lokasi Kecamatan
1.	Hutan Rakyat	41.594,18 Ha	131.694,55 m ³	Tersebar di 39 Kecamatan
2.	Bambu	3.631,20 Ha	2.149.169,00 btg	Tersebar di 39 Kecamatan
3.	Lebah Madu	1.799 Stup	1.453,00 Kg	Cibalong, Cineam, Karangjaya, Cikalong, Salawu, Sodonghilir, Salopa, Parungponteng, Jatiwaras, Cigalontang, Puspahiang, Culamega, Pagerageung, Karangnunggal, Cipatujah, Bojongasih, Cikatomas dan Sukaratu
4.	Jamur Kayu	616.550 Log	133.672,00 Kg	Tanjungjaya, Sariwangi, Cibalong, Cineam, Bojonggambir, Singaparna, Pancatengah, Ciawi, Cikalong, Cisayong, Rajapolah, Salawu, Manonjaya, Sukaraja, Sodonghilir, Salopa, Parungponteng, Sukarame, Gunungtanjung, Puspahiang, Pagerageung, Karangnunggal, Bojongasih, Sukaresik, Leuwisari, Kadipaten, dan Padakembang

*Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019*

f. Pertambangan

Kabupaten Tasikmalaya memiliki cukup banyak potensi bahan galian yang secara ekonomi dapat dikembangkan, terdiri dari potensi bahan galian Industri, bahan galian keramik, bahan galian setengah permata (batu mulia), bahan galian logam, bahan galian energi dan memiliki potensi PLTMH serta manivestasi potensi panas bumi. Sumber daya hasil tambang di Tasikmalaya antara lain:

- 1) Pasir Besi (*Iron Sand*), Penyebarannya di sepanjang pantai Selatan Kabupaten Tasikmalaya meliputi Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal dan Cikalong, dengan panjang pantai Kabupaten Tasikmalaya ± 50,314 km. Jumlah Sumber Daya: ± 2.752.752,392 MT. Potensi Industri yaitu: industri semen, industri pengecoran logam;

- 2) Bijih Besi (*Iron Ore*), Penyebarannya di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir; Desa Muncang, Kecamatan Sodonghilir; Desa Sukahurip, Padawaras, Cipatujah, Cikawungading, Bantarkalong di Kecamatan Cipatujah; Desa Cikapinis, Ciawi, Sarimukti, di Kecamatan Karangnunggal; Desa Cogreg, Kecamatan Cikatomas. Jumlah Sumber Daya Tereka (*Inferred Resources*) : > 13.782.000 m³ atau > 41.346.000 MT. Potensi Industri yaitu: Industri baja, industri pengecoran logam;
- 3) Emas, Perak dan Galena (Au, Ag & Pb), Penyebarannya di Kecamatan Cineam yaitu Desa Cisarua dan Desa Pasirmukti; Kecamatan Karangjaya di Desa Karanglayung; Kecamatan Salopa di Blok Ciniru – Cikuya ± 40 Km² dan Blok Cikondang – Citambal – Ciseel ± 40 Km²; Kecamatan Pancatengah di Desa Cibuniasih. Potensi industrinya yaitu industri perhiasan dan industri elektronik;
- 4) Zeolite, Penyebarannya do Kecamatan Cipatujah (± 132 Hektar), Kecamatan Karangnunggal (± 56 Hektar), Kecamatan Cikalong (±19 Hektar); Kegunaannya antara lain untuk industri peternakan, perikanan, pertanian, kesehatan, bahan bangunan, industri kertas, industri ban, industri sabun, industri migas; dan
- 5) Bentonit, Penyebarannya di Kecamatan Karangnunggal, Bantarkalong, Bojongasih, Sukaraja, Taraju, Cikatomas, Pancatengah, Cibalong. Jumlah Sumber Daya Tereka (*Inferred Resources*) sebesar > 5.000.000 m³ atau > 11.500.000 MT. Kegunaannya antara lain untuk Industri cat, industri minyak goreng, industri kimia, dan lain-lain.
- 6) Gypsum, Penyebaran : Desa Cidadap Kecamatan Karangnunggal dan Desa Cibeber Kecamatan Cikalong. Jumlah Sumber Daya Tereka (*Inferred Resources*) sebesar > 1.449.115 MT. Kegunaannya yaitu untuk Industri semen, bahan bangunan, kedokteran.

Tabel II. 15 Bahan Galian Industri

No	Jenis Bahan Galian	Genesa	Lokasi	Pemanfaatan	Sumberdaya / Cadangan
1	Andesit	Merupakan batuan beku yang terbentuk akibat pembekuan magma intermediet-basa dipermukaan bumi dengan struktur batuan porfir	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Karangnunggal - Kecamatan Sukaratu - Kecamatan Ciawi - Kecamatan Rajapolah - Kecamatan Parungponteng - Kecamatan Cibalong - Kecamatan Sukaraja 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan kontruksi bangunan - Bahan pondasi bangunan - Pembuatan jembatan - Pembuatan bendungan - Pembuatan tunnel - Dll 	Sumberdaya juta ton

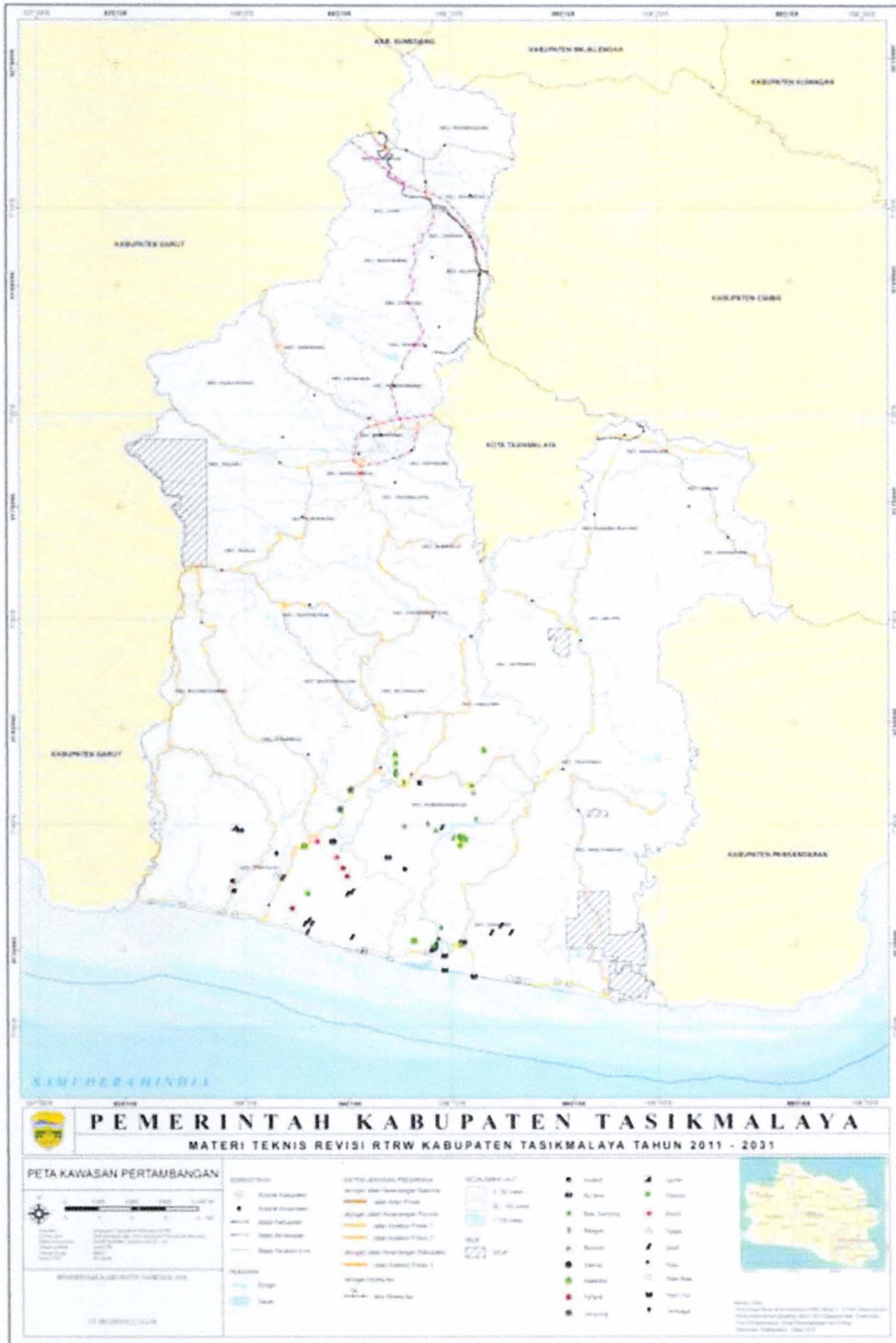
No	Jenis Bahan Galian	Genesa	Lokasi	Pemanfaatan	Sumberdaya / Cadangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Cikatomas - Kecamatan Cipatujah - Kecamatan Cikalong 		
2	Sirtu	Merupakan komposisi batu dan pasir dengan ukuran tidak beragam, terbentuk karena akumulasi batuan dan pasir yang diendapkan pada daerah alluvial atau daerah tepian sungai	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Sukaratu - Kecamatan Ciawi - Kecamatan Cikatomas - Kecamatan Cikalong 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan agregat beton - Pengerasan jalan - Batu hias - Bahan pondasi - DII 	Sumberdaya jutaan ton
3	Tras	Adalah produk gunung api bersifat tufa dengan ukuran halus-kasar yang telah mengalami tingkat pelapukan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Sodonghilir - Kecamatan Pancatengah - Kecamatan Cikatomas - Kecamatan Parungponteng - Kecamatan Sukaraja - Kecamatan Pancatengah - Kecamatan Cikalong 	Bahan pembuat Pozzolan semen	Sumberdaya ton jutaan
4	Marmer (CaCO ₃)	Berasal dari ubahan fisik dari batuan gamping dan dolomit akibat proses metamorfisme karena adanya perubahan tekanan dan temperatur	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Parungponteng - Kecamatan Cibalong - Kecamatan Sukaraja - Kecamatan Karangnunggal - Kecamatan Bantarkalong 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan pembuat lantai - Bahan pembuat dinding - Bahan pembuat kerajinan - Batu hias 	Sumberdaya ton ribu
5	Batu Gamping (CaCO ₃)	Terbentuk karena akumulasi koral pada lingkungan laut dangkal yang membentuk terumbu karang (gamping terumbu)	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Sukaraja - Kecamatan Parungponteng - Kecamatan Cibalong - Kecamatan Karangnunggal - Kecamatan Bantarkalong - Kecamatan Sodonghilir - Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan pembuat semen - Bahan pembuat cat - Bahan pembuat kertas - Industri farmasi - Industri kosmetik - Pembuatan pasta gigi - Bahan 	<p>120.000.000 m³</p> <p>Belum diketahui</p> <p>Belum diketahui</p> <p>Belum diketahui</p> <p>Belum diketahui</p> <p>Belum diketahui</p> <p>Belum diketahui</p> <p>Belum diketahui</p> <p>80.000.000 m³</p> <p>Belum diketahui</p>

No	Jenis Bahan Galian	Genesa	Lokasi	Pemanfaatan	Sumberdaya / Cadangan
			Cikatomas - Kecamatan Cikalong - Kecamatan Taraju - Kecamatan Pancatengah	pembuatan kapur tohor - Bahan pembuatan kapur padam	
6	Batu apung	Terbentuk akibat magma yang tersemburkan keluar sehingga gas yang terkandung didalamnya keluar dengan cepat membentuk batuan yang sangat berpori dan ringan	- Kecamatan Sukaratu - Kecamatan Padakembang	- Bahan penggosok - Batu hias - Konstruksi ringan - Bahan isolator	Cadangan diketahui belum
7	Obsidian	Terbentuk karena pendinginan magma basa-intermediet didalam celah atau pipa kepundan dan membeku dengan cepat berwarna hitam, apabila dibakar hingga 850 °C akan mengeluarkan gas dan air yang berubah menjadi seperti batuapung	- Kecamatan Sukaratu - Kecamatan Padakembang	- Bahan penggosok - Batu hias - Bahan isolator	Cadangan diketahui belum
8	Dasit	Merupakan batuan beku intermediet diendapkan pada lingkungan sedang sehingga mineral utama dengan ukuran sedang dengan tekstur porfiritik	Kecamatan Cipatujah	- Bahan bangunan - Ornamen	Sumberdaya ton jutaan
9	Diorit	Merupakan batuan beku intermediet diendapkan pada lingkungan dalam sehingga mineral utama dengan ukuran kasar dengan tekstur porfiritik	- Kecamatan Cineam - Kecamatan Cipatujah	- Bahan bangunan - Ornamen	Sumberdaya ton jutaan

No	Jenis Bahan Galian	Genesa	Lokasi	Pemanfaatan	Sumberdaya / Cadangan
10	Granodiorit	Merupakan batuan beku intermediet-basa diendapkan pada lingkungan dalam sehingga mineral utama dengan ukuran kasar dengan tekstur porfiritik	- Kec. Cipatujah	- Bahan pembuat lantai - Bahan bangunan - Ornamen - Batu hias	Sumberdaya ton jutaan
11	Pasir	Merupakan material lepas hasil letusan gunung api	- Kecamatan Sukaratu - Kecamatan Padakembang - Kecamatan Singaparna - Kecamatan Sukaraja - Kecamatan Cibalong - Kecamatan Karangnunggal - Kecamatan Cikatomas - Kecamatan Cikalong - Kecamatan Sodonghilir	- Konstruksi bangunan - Konstruksi jalan - Konstruksi irigasi - Konstruksi jembatan - Dll	Sumberdaya ton jutaan
12	Fosfat (P ₂ O ₅)	Terbentuk karena akumulasi kotoran burung/kelelawar yang tinggal di dalam gua-gua kalsit sehingga kotoran yang jatuh bereaksi membentuk fosfat	- Kecamatan Cikalong - Kecamatan Sukaraja - Kecamatan Taraju - Kecamatan Karangnunggal	- Pupuk alam - Industri farmasi - Industri kimia	Belum diketahui - 700 m ³ Belum diketahui Belum diketahui
13	Zeolit (Na ₄ K ₄) ₆ H ₂ O (Al ₁₂ Si ₂₄ O ₇₂) ₂	Adanya senyawa alumina silikat dengan logam alkali yang merupakan kelompok mineral yang berbagai jenis, biasanya merupakan ubahan batuan tufa yang diendapkan pada lingkungan laut	- Kecamatan Karangnunggal - Kecamatan Cipatujah - Kecamatan Cikalong - Kecamatan Cikatomas - Kecamatan Pancatengah	- Industri peternakan - Industri perikanan - Industri pertanian - Kesehatan - Bahan bangunan - Industri kertas - Industri ban - Industri sabun - Industri migas	- Karangnunggal (56Ha) : 6.000.000 ton - Cipatujah (132Ha) : 4.158.000 ton - Cikalong (19 Ha) : 2.750.000 ton
14	Bentonit (OH) ₄ Si ₈	Terbentuk karena proses pelapukan,	- Kecamatan Karangnunggal	- Pengeboran minyak bumi	Belum diketahui

No	Jenis Bahan Galian	Genesa	Lokasi	Pemanfaatan	Sumberdaya / Cadangan
	Al ₂ O ₃ ·nH ₂ O	hidrotermal, diagenesa terhadap batuan tuff kaca yang diendapkan pada lingkungan Ph tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Bantarkalong - Kecamatan Bojongasih - Kecamatan Sukaraja - Kecamatan Taraju - Kecamatan Cikatomas - Kecamatan Pancatengah - Kec. Cibalong 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan membran tahan air - Industri cat - Industri minyak goreng - Bahan pengisi - Industri baja - Industri kimia 	<p>Belum diketahui</p> <p>Belum diketahui - 1.200.000 m³</p> <p>Belum diketahui</p> <p>Belum diketahui</p> <p>Belum diketahui</p>
15	Gips (CaSO ₄ ·2H ₂ O)	Terbentuk karena senyawa asam sulfida yang bereaksi dengan batuan yang mengandung kalsium (gamping)	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Karangnunggal - Kecamatan Cikalong - Kecamatan Cibalong 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri semen - Kedokteran - Bahan bangunan 	Cadangan jutaan ton
16	Belerang (S)	Ditemukan dalam senyawa sulfida dalam urat bijih dan dalam belerang murni pada daerah sublimasi, biasanya berhubungan dengan aktifitas gunung api	<ul style="list-style-type: none"> - Kawah Karaha Kecamatan Kadipaten - Gunung Galunggung Kecamatan Sukaratu 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri kimia - Industri cat - Industri karet - Industri pupuk - Industri minyak - Industri metalurgi - Bahan peledak - Film selulosa - Industri kertas - Industri farmasi - Industri kecantikan - Industri tekstil - Bahan korek api 	Cadangan diketahui
17	Dolomit (CaCO ₃ ·MgCO ₃)	Senyawa kembar kalsium dan magnesium yang terbentuk karena proses resapan air laut kedalam batu gamping (proses dolomitan)	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Cibalong - Kecamatan Cipatujah 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan batu tahan api - Peleburan besi - Pengatur Ph 	Cadangan diketahui belum
18	Kalsit	Mineral kalsium karbonat yang terbentuk karena penghabluran kembali batugamping akibat pengaruh air tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Parungponteng - Kecamatan Pancatengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan pemutih - Pengisi cat - Industri pasta gigi 	Sumberdaya ton
19	Diatome	Sedimen yang terbentuk karena timbunan fosil atau cangkang diatome. Diatome adalah sejenis tumbuhan atau ganggang yang kaya akan silika	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Manonjaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan penyaring - Bahan pemutih - Katalisator - Bahan keramik 	Cadangan diketahui

Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya, 2016



Sumber : RTRW Kabupaten Tasikmalaya

Gambar II. 10 Peta Kawasan Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya

3. Teknologi, Inovasi dan Kreativitas Industri

Teknologi kini sangatlah penting mengingat banyak aspek dari kehidupan sehari-hari yang bergantung kepadanya. Kemajuan sebuah industri pun tak akan terlepas dari kemampuan teknologi yang dipunyai. Dengan mengandalkan strategi *technology push*, sebuah industri dapat memenuhi permintaan yang telah ada dengan lebih baik atau bahkan membuat permintaan pasar yang baru. Dengan mengandalkan teknologi, sebuah industri dapat berkembang dengan pesat. Dengan demikian dalam perencanaan perindustrian perlu diperhatikan teknologi-teknologi apa saja yang telah dimiliki.

Dalam upaya untuk pengembangan industri pengolahan di Kabupaten Tasikmalaya, pada saat ini kabupaten ini memiliki Sub Unit Pengembangan Kerajinan. Inovasi dan kreativitas tidak dapat dipungkiri lagi merupakan salah satu sumber daya penting untuk meningkatkan daya saing industri. Dengan inovasi dan kreativitas, sebuah jasa, produk, atau proses baru yang memiliki nilai tambah dapat tercipta. Dengan demikian, inovasi dan kreativitas dapat meningkatkan atau bahkan membuat sebuah keunggulan saing dalam berbagai jenis industri. Tugas regulator terkait inovasi dan kreativitas adalah memastikan sebuah ekosistem yang baik untuk tumbuh kembangnya inovasi dan kreativitas. Salah satu caranya adalah dengan membuat sebuah *technopark* di mana dalam *technopark* tersebut terdapat program dan fasilitas yang dapat menumbuhkan inovasi dan kreativitas serta mengkomersialisasikannya menjadi sebuah produk, jasa, atau proses. Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki 1 *technopark* yang berfokus pada pertanian, peternakan, agroforesti, yang berbasis teknologi.

Selain *technopark*, ekosistem yang baik untuk tumbuh kembangnya inovasi dan kreativitas dapat ditemukan pada inkubator bisnis. Inkubator bisnis berbeda dengan *technopark* terutama pada dedikasi pada perusahaan startup. *Technopark* cenderung berfokus pada proyek berskala besar, sedang inkubator berfokus pada perusahaan startup. Selain itu, inkubator juga memberikan dukungan bisnis agar perusahaan *startup* naungannya dapat benar-benar mengkomersialisasikan inovasi dan teknologi yang dimilikinya. Dengan demikian peran inkubator bisnis sangatlah penting bagi tumbuhnya inovasi dan teknologi terkini.

Inkubasi tersebut pada umumnya masih berfokus pada pendampingan UKM yang padat karya. Masih sedikit inkubasi bisnis yang berfokus pada bidang usaha yang memiliki nilai tambah tinggi atau padat teknologi. Oleh karena itu diperlukan sebuah dukungan atau perancangan ekosistem agar terjadi pertumbuhan inkubator bisnis yang berfokus pada bisnis dengan nilai tambah tinggi.

4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aspek penting yang perlu diperhatikan pada saat membentuk sebuah industri baru atau mengembangkan yang telah ada untuk menangkap peluang yang ada di pasar. Bank sebagai rekanan

dalam penyertaan modal sangat membantu dalam perkembangan industri di Kabupaten Tasikmalaya.

5. Kebijakan Pengembangan Industri

a. Disusunnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam pengembangan industri bermanfaat untuk mendorong percepatan investasi dengan mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Kebijakan strategis dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini antara lain:

- 1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- 2) Perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- 3) Kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- 4) Peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional. Dengan terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan iklim investasi akan menjadi lebih kondusif sehingga dapat menyerap lebih banyak pekerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga pengangguran berkurang, serta produktivitas pekerja meningkat.

Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia. Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan dan jaminan bagi pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja:

- 1) Pengaturan Upah Minimum ditetapkan pada tingkat Provinsi (UMP/Upah Minimum Provinsi);
- 2) Upah Minimum kabupaten/kota ditetapkan bila memenuhi syarat tertentu;
- 3) Upah Minimum Sektoral dihapus namun yang lebih tinggi dari Upah Minimum kabupaten/kota tidak diturunkan;
- 4) Kenaikan Upah Minimum mengacu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan koefisien produktivitas;
- 5) Adanya program jaminan kehilangan pekerjaan;
- 6) Penggunaan tenaga kerja asing diberi kemudahan hanya bagi Tenaga Kerja Asing ahli seperti *maintenance* (darurat), vokasi, peneliti, serta investor dan *buyer*.

Dari sisi usaha mikro dan kecil (UMK), melalui Undang-Undang Cipta kerja, Pemerintah memberi kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan kepada UMK dalam bentuk:

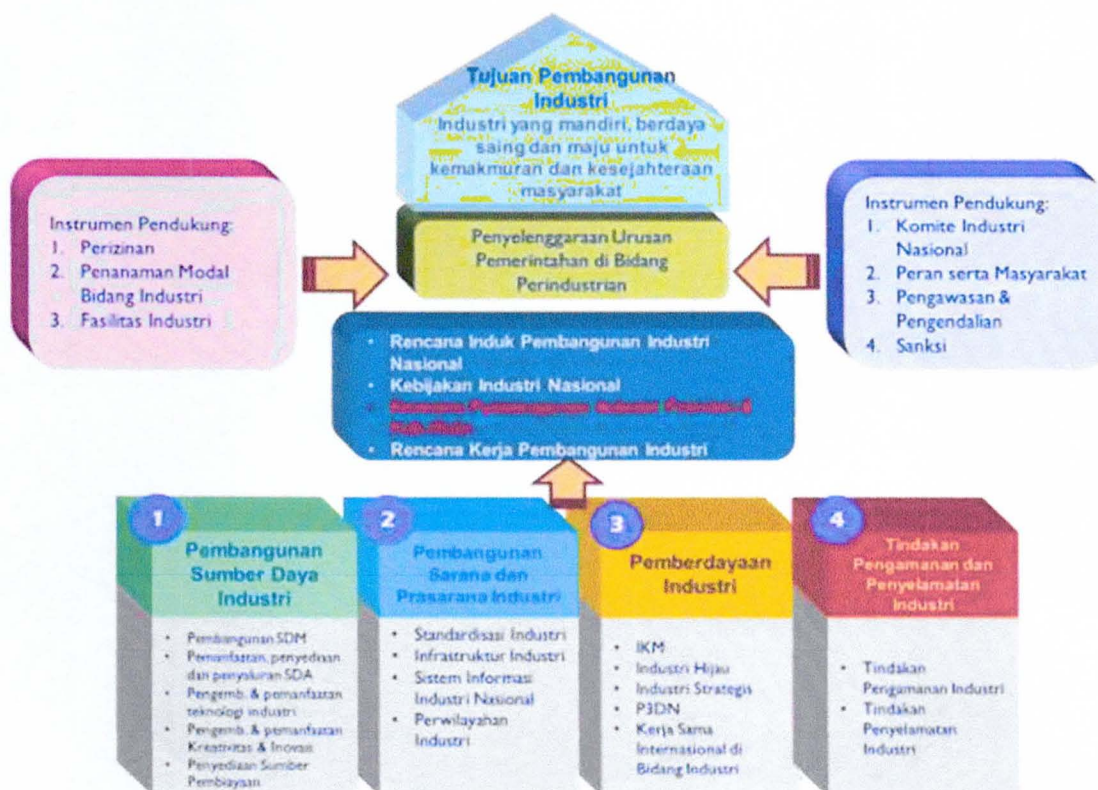
- 1) Izin tunggal bagi UMK dengan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui perizinan berusaha secara elektronik yang berlaku untuk semua kegiatan usaha : izin usaha, izin edar, standar nasional indonesia (SNI) dan sertifikasi produk halal;
- 2) Terdapat insentif dan kemudahan berusaha yang ditawarkan pemerintah pusat dan/atau daerah bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMK;
- 3) Adanya pengelolaan terpadu UMK dalam bentuk: a) sinergi pemerintah pusat, daerah dan stakeholder; b) pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran dan sarana-

- prasarana; c) pemberian fasilitasi lokasi, sertifikasi, promosi, dan pemasaran;
- 4) Kemudahan pembiayaan dan insentif fiskal dengan bentuk:
 - a. penyederhanaan administrasi perpajakan;
 - b. pengajuan izin usaha tanpa biaya;
 - c. insentif pajak penghasilan; dan
 - d. insentif kepabeanan bagi UMK ekspor.
 - 5) Pemerintah prioritaskan penggunaan DAK bagi pengembangan UMK Bantuan dan perlindungan hukum;
 - 6) Produk UMK diprioritaskan dalam pengadaan jasa Pemerintah dengan minimal 40% untuk produksi UMK;
 - 7) Kemitraan UMK di rest area, stasiun dan terminal untuk promosi dan penjualan produk UMK; dan
 - 8) Kemudahan untuk koperasi dengan pembentukan koperasi primer.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten merupakan amanat dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
- 1) Potensi sumber daya Industri Daerah;
 - 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Pembangunan industri bertujuan untuk menghasilkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi dalam melakukannya yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, kebijakan industri nasional, rencana pembangunan industri provinsi dan Kabupaten/Kota, serta rencana kerja pembangunan industri. Dalam penyusunannya perlu memenuhi aspek-aspek seperti:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Industri
 - a) Pembangunan sumber daya manusia;
 - b) pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
 - c) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - d) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
 - e) Penyediaan sumber pembiayaan.
- 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - a) Standardisasi Industri;
 - b) Infrastruktur Industri;
 - c) Sistem Informasi Industri Nasional; dan
 - d) Perwilayahan Industri.

- 3) Pemberdayaan Industri
 - a) Industri Kecil Menengah;
 - b) Industri Hijau;
 - c) Industri Strategis;
 - d) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN); dan
 - e) Kerja Sama Internasional di Bidang Industri.
- 4) Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri
 - a) Tindakan Pengamanan Industri; dan
 - b) Tindakan Penyelamatan Industri.



Gambar II. 11 Kerangka Pikir

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pengembangan industri juga perlu dilakukan melalui kebijakan perwilayahan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengamanatkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah. Selama ini pembangunan dan pengembangan industri lebih banyak menggunakan pendekatan sektoral sehingga mengakibatkan industri manufaktur lebih banyak berkembang. Di sisi lain, sumber daya alam yang jumlahnya cukup besar belum diolah secara optimal,

dan diekspor dalam bentuk bahan mentah yang belum mempunyai nilai tambah.

Perwilayahan industri dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2) Pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
- 3) Peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
- 4) Peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.

Pembangunan dan pengembangan industri perlu pula penyediaan infrastruktur pendukung industri. Berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur industri. Penyediaan infrastruktur industri dilakukan di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri. Infrastruktur industri paling sedikit meliputi:

- 1) lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri;
- 2) fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
- 3) fasilitas jaringan telekomunikasi;
- 4) fasilitas jaringan sumber daya air;
- 5) fasilitas sanitasi; dan
- 6) fasilitas jaringan transportasi.

Dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap bupati/walikota diamanahkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

- f. Kebijakan Industri sesuai Arahan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tasikmalaya penetapan kawasan peruntukan industri hanya tercantum dalam dokumen teks dan materi teknis RTRW, tidak terdelineasi dalam peta pola ruangnya. Arahan pengembangan industri di Kabupaten Tasikmalaya menyebar di beberapa kecamatan dan skala kegiatannya masih didominasi oleh industri menengah dan kecil. Kawasan Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Industri dalam materi teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- 1) Pemantapan sentra-sentra industri, yaitu antara lain bordir, teh, zeolit, batik, kerajinan batok kelapa, anyaman mendong, anyaman pandan, kerajinan pandan, anyaman bambu, lampit rumbia, pengolahan makanan (sale pisang, opak ketan, dodol susu, gula kelapa, gula semut, gula aren, dodol wajit, keripik, dodol salak,

makanan ringan, dodol sirsak), bahan bangunan (kapur, batu onik, bata merah, genteng);

- 2) Pengembangan sarana dan prasarana produksi industry;
- 3) Pengembangan sarana pengolahan hasil pertanian;
- 4) Optimalisasi pusat promosi “Imah Tasik”;
- 5) Optimalisasi sarana prasarana kelembagaan kelompok pengrajin;
- 6) Optimalisasi pemanfaatan lahan kurang produktif; dan
- 7) Pengembangan bahan baku produksi industri.

Beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya sedang melakukan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR), salah satunya RDTR Perkotaan Rajapolah dan terdapat zona industri di dalamnya. Rencana kegiatan industri di Kawasan Perkotaan Rajapolah tetap mempertahankan kegiatan yang sudah ada, yaitu Industri Kimia Dasar dengan luas 0,58 ha atau 0,06 % dari luas perkotaan Rajapolah. Rajapolah juga memiliki potensi industri kreatif kerajinan skala home industri. Berdasarkan kebijakan RTRW Kabupaten Tasikmalaya, BWP Rajapolah akan mengemban fungsi sebagai kawasan industri dan ekonomi kreatif dengan penekanan pada pengembangan kegiatan kepariwisataan. Kegiatan industri kecil (home industri) diperbolehkan berada di pemukiman dengan syarat tidak mengganggu lingkungan sekitar dan non polutan.

Dalam RDTR Perkotaan Ciawi, ditetapkan pula zona industri seluas 18,37 hektar. Tujuan penetapan zona industri dalam RDTR Perkotaan Ciawi adalah:

- 1) Menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan produksi barang yang mempunyai nilai lebih untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perkerjasama yang berkaitan dengan lapangan kerja perekonomian lainnya; dan
- 2) Memberikan kemudahan pertumbuhan industri baru dengan mengendalikan pemanfaatan ruang lainnya, untuk menjaga keserasian lingkungan sehingga mobilitas antar ruang tetap terjamin serta terkendalinya kualitas lingkungan.

Pada Kawasan Perkotaan Ciawi terdapat beberapa industri kecil dan mikro yang bergerak di bidang makanan serta kayu olahan. Arahan penggunaan lahan industri eksisting dipertahankan bahkan ke depan keberadaan industri ini lebih dikembangkan lagi. Arahan pengembangan industri di Kawasan Perkotaan Ciawi adalah untuk aneka industri. Aneka Industri adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen, antara lain:

- 1) Aneka pengolahan pangan yaitu yang menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan) seperti garam, gula, margarine, minyak goreng, rokok, susu, tepung terigu.
- 2) Aneka pengolahan sandang yaitu yang menghasilkan kebutuhan sandang, seperti bahan tenun, tekstil, industri kulit dan pakaian jadi. Aneka kimia dan serat: yang mengolah bahan baku melalui

proses kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan, seperti ban kendaraan, pipa paralon, pasta gigi, sabun cuci, dan korek api.

- 3) Aneka bahan bangunan yaitu yang mengolah aneka bahan bangunan, seperti industri kayu, keramik, kaca, marmer.

Zona industri dalam RDTR Perkotaan Cikatomas diperuntukan untuk industri kecil dan aneka industri. Zona industri kecil memiliki luas total sebesar 0,36 Ha dan Zona aneka industri dengan luas total sebesar 23,70Ha.

Untuk Kecamatan Cisayong, saat ini sudah terdapat kegiatan industri besar yaitu kegiatan industri garment, industri topi, sedangkan industri kecil berupa industri rumahan berupa pengolahan makanan dan kerajinan serta industri batu bata. Sedangkan industri yang akan dikembangkan adalah industri sedang yang ramah lingkungan serta industri rumah tangga yang memanfaatkan ruang-ruang kosong yang ada (berpotensi untuk dikembangkan). Adapun lokasi kawasan industri di Kecamatan Cisayong tersebar dengan luas kurang lebih 2,54 ha. Rencana kawasan peruntukan industri di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II. 16 Resume Mengenai Kawasan Peruntukan Industri Dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya

Kelas Industri	Lokasi	Jenis Industri
Berdasarkan Perda dan Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya		
Industri Menengah	Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Karangnunggal dan Kecamatan Tanjungjaya	Industri kerajinan bordir
	Kecamatan Cisayong	Industri pembuatan paving block
	Kecamatan Taraju, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Bojongsambir dan Kecamatan Cigalontang	Industri pembuatan teh hijau
	Kecamatan Karangnunggal dan Cipatujah	Industri pengolahan bahan tambang
	Kecamatan Singaparna	Industri pembuatan gula
	Kecamatan Cisayong	Industri topi dan jaket
Industri Kecil	Kecamatan Cikalong, Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Pagerageung, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Jamanis dan Kecamatan Rajapolah	Industri kerajinan dan anyaman pandan
	Kecamatan Cineam, Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Gunung Tanjung, Kecamatan Salopa, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Sukahening, Kecamatan Manonjaya, dan Kecamatan Cikatomas	Industri kerajinan dan anyaman mendong

Kelas Industri	Lokasi	Jenis Industri
	Kecamatan Salopa, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Sukahening, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Sariwangi, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Pagerageung, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Jamanis, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Bojongasih, Kecamatan Puspahiang, Kecamatan Sukaratu.	Industri kerajinan bambu
	Kecamatan Bojonggambir, Kecamatan Mangunreja; dan Kecamatan Salawu	
	Kecamatan Cikalong, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Karangnunggal dan Kecamatan Rajapolah	Industri kerajinan batok dan sabut Kelapa
	Kecamatan Sukaraja	Industri batik tulis
	Kecamatan Cineam, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Salopa, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Cikalong, Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sariwangi, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Bojongasih, Kecamatan Puspahiang, Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Taraju, Kecamatan Culamega, Kecamatan Sukahening dan Kecamatan Salawu	Industri bordir
	Kecamatan Cigalontang dan Kecamatan Tanjungjaya	Industri lampit rumbia
	Kecamatan Singaparna, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Cineam, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Pagerageung, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Salawu, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Taraju, Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Salopa, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan, Cikatomas, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Culamega, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Cikalong, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Parungponteng	Industri pengolahan makanan

Kelas Industri	Lokasi	Jenis Industri
	Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Pagerageung, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cipatujah, Kec. Karangnunggal, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cikalong dan Kecamatan Sukaresik	Industri bahan bangunan bata merah
	Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Cikatomas dan Kecamatan Singaparna	Industri pengguna logam berupa Golok
	Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Cineam, dan Kecamatan Salawu	Industri konveksi
	Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Jamanis, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Bojongasih, Kecamatan Puspahiang, Kecamatan Cineam, dan Kecamatan Salawu	Industri mebel kayu
	Kecamatan Cikalong, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Cibalong	Industri kapur
	Kecamatan Parungponteng dan Kecamatan Karangnunggal	Industri batu onix
	Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Cipatujah dan Kecamatan Parungponteng	Industri genteng
Kawasan Strategis	Kecamatan Rajapolah	Kawasan Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah
RDTR Perkotaan Rajapolah		
Zona Industri	Kawasan Perkotaan Rajapolah, Desa Manggungjaya	Industri Kimia Dasar --> Rencana kegiatan industri lebih kepada mempertahankan kegiatan yang sudah ada, yaitu Industri Kimia Dasar dengan luas 0,58 ha
Home Industri	Tersebar di zona pemukiman Kawasan Perkotaan Rajapolah	Industri Kreatif
RDTR Perkotaan Ciawi		
Zona Industri	Kawasan Perkotaan Ciawi	Aneka Industri --> Industri kecil, aneka industri dan kegiatan pengolahan hasil pertanian
RDTR Perkotaan Cikatomas		
Zona Industri	Tersebar di Kawasan Perkotaan Cikatomas	Industri Kecil
Zona Industri	Tersebar di Kawasan Perkotaan Cikatomas	Aneka Industri

Kelas Industri	Lokasi	Jenis Industri
RDTR Perkotaan Cisayong		
Zona Industri	Tersebar di Kawasan Perkotaan Cisayong	industri sedang yang ramah lingkungan serta industri rumah tangga yang memanfaatkan ruang-ruang kosong

Sumber : RTRW dan RDTR Kabupaten Tasikmalaya

C. Sarana dan Prasarana

1. Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah merupakan suatu faktor penting yang harus dipenuhi untuk mendukung pengembangan industri. Infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan industri termasuk aksesibilitas, sumber daya energi, air, sistem pengolahan limbah, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Berikut adalah profil infrastruktur wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Hadirnya infrastruktur strategis dapat menentukan kecepatan tumbuhnya industri. Kehadiran infrastruktur akan memberikan aksesibilitas bagi industri, baik aksesibilitas terhadap jalur perdagangan, sumber daya alam dan manusia, maupun terhadap pembiayaan.

2. Aksesibilitas/Jaringan Transportasi

a. Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan harus memperhatikan sistem hirarki yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangannya, baik jalan dengan kewenangan pusat (nasional), provinsi, dan kabupaten. Untuk klasifikasi jalan Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, disusun mengacu KEPMEN PU No. 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1). Berdasarkan Permen PU No 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).



Sumber : Lampiran PERMEN PU No 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1)

Gambar II. 13 Peta Jaringan Jalan Nasional (Arteri Primer dan Kolektor Primer) Provinsi Jawa Barat

Tabel II. 17 Jaringan Jalan Nasional yang Melintasi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No Ruas Dalam Kepmen	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	
		Jalan Arteri Primer (JAP)	Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)
041	Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut – Rajapolah	18,50	
	Jln. Raya Ciawi (Ciawi)	5,73	
042	Rajapolah - Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis	1,22	
043	Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis – Ancol	13,14	
044	Bts. Kota Rajapolah - Bts. Kota Tasikmalaya		4,78
	Jln. Raya Rajapolah (Rajapolah)		2,14
	Jln. Raya Indihiang (Indihiang)		3,42

Sumber : Lampiran PERMEN PU No 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

Selain kebijakan nasional, konsep rencana pengembangan jaringan jalan merujuk pada kebijakan RTRW Provinsi, terkait dengan rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Cileunyi-Nagrek-Ciamis-Banjar, melalui ruas jalan Kadipaten–Rajapolah yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Berikut rencana pengembangan jaringan jalan Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel II. 18 Rencana Jaringan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Jaringan Jalan	Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Berdasarkan
1	Jalan Nasional	
	(1) Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol)	Pembangunan jalan tol berupa jalan tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya melalui ruas jalan Provinsi berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Pembangunan jalan tol berupa jalan tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (exit tol Cigalontang) Pembangunan jalan tol Cileunyi – Garut – Tasikmalaya
	(2) jalan arteri primer	Pengembangan Jalan Arteri Primer (AP) : 1. Ruas jalan Kadipaten – Rajapolah; 2. Ruas jalan Rajapolah – Cisayong; dan 3. Ruas jalan Ciawi – Kadipaten
	(3) Jalan kolektor primer 1	Pengembangan jalan kolektor primer 1 (JKP-1): 1. Ruas jalan Rajapolah – Indihiang; 2. Ruas jalan Cibeureum – Manonjaya; 3. Ruas jalan Manonjaya – Cimaragas; 4. Ruas jalan Urug – Karangnunggal; 5. Ruas jalan Karangnunggal – Cipatujah; 6. Ruas jalan Salawu – Singaparna; 7. Ruas jalan Singaparna – Mangkubumi; 8. Ruas jalan Cikaengan – Cipatujah; dan 9. Ruas jalan Cipatujah – Kalapagenep.
2	Jaringan jalan Provinsi	
	Jalan kolektor primer 2	Pengembangan jalan kolektor primer 2 (JKP-2), termasuk peningkatan dan pemeliharaan pada ruas :

No	Jaringan Jalan	Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Berdasarkan
		a. Ruas jalan Ciawi – Singaparna; b. Ruas jalan Manonjaya – Salopa; c. Ruas jalan Sukaraja – Karangnunggal - Cipatujah; d. Ruas jalan Papayan -Cikalong; dan e. Ruas jalan Mangunreja - Sukaraja.
3	Jaringan jalan Kabupaten	
	(1) Jalan kolektor primer 3	Pengembangan jalan kolektor primer 3 (tiga) meliputi ruas jalan : 1) Ruas jalan Ciawi – Singaparna; 2) Ruas jalan Ciawi – Panumbangan; 3) Ruas jalan Ciawi – Pasirhuni; 4) Ruas jalan Cibalong – Derah; 5) Ruas jalan Cikatomas– Cimedang, 6) Ruas jalan Cilangkap – Cineam, 7) Ruas jalan Cineam - Sirnajaya – Citalahab, 8) Ruas jalan Cirenude – Cihanura, 9) Ruas jalan Cisaruni – Padakembang; 10) Ruas jalan Ciseda – Sayuran; 11) Ruas jalan Ciwatin – Kalapagenep; 12) Ruas jalan dalam kota Ciawi; 13) Ruas jalan dalam kota Rajapolah; 14) Ruas jalan dalam kota Singaparna; 15) Ruas jalan dalam kota Mangunreja; 16) Ruas jalan dalam kota Manonjaya; 17) Ruas jalan dalam kota Sukaraja; 18) Ruas jalan dalam kota Cikatomas; 19) Ruas jalan dalam Kota Taraju; 20) Ruas jalan Darawati – Culamega – Bojonggambir; 21) Ruas jalan Derah – Simpang Urmi; 22) Ruas jalan Eureunpalay – Bojongasih; 23) Ruas jalan Gunungsari – Cipanas; 24) Ruas jalan Terminal Ciawi; 25) Ruas jalan Kudang – Cibauti; 26) Ruas jalan Mangunraja – Sukaraja; 27) Ruas jalan Manonjaya – Salopa; 28) Ruas jalan Pagendingan – Cisayong; 29) Ruas jalan Pamoyanan – Suryalaya; 30) Ruas jalan Papayan – Cikalong; 31) Ruas jalan Pasirgintung – Lengkongbarang; 32) Ruas jalan Rajapolah – Kiarajangkung; 33) Ruas jalan Simpang – Arjasari – Cisaruni; 34) Ruas jalan Singaparna – Sariwangi; 35) Ruas jalan Singaparna – Cigalontang; 36) Ruas jalan Sindangreret – Cidadap; 37) Ruas jalan Taraju – Bojonggambir; 38) Ruas jalan Taraju – Sodonghilir – Derah; 39) Ruas jalan Warungpeuteuy- Taraju; 40) Ruas jalan Sukagalih – Ciponyo; 41) Ruas jalan Sariwangi -Parentas.
	(2) Jalan lokal	Pemeliharaan jalan lokal (kewenangan kabupaten) sebanyak 176 ruas Jalan

No	Jaringan Jalan	Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Berdasarkan
	(3) Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Perkotaan	Pengembangan Jalan Lingkar Utara dan Selatan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya (Singaparna): Kecamatan yang dilalui jalan lingkar utara: 1) Kecamatan Mangunreja; 2) Kecamatan Singaparna; 3) Kecamatan Sukarame; 4) Kecamatan Cigalontang; 5) Kecamatan Leuwisari; dan 6) Kecamatan Padakembang Kecamatan yang dilalui jalan lingkar selatan: 7) Kecamatan Cipatujah; 8) Kecamatan Karangnunggal; dan 9) Kecamatan Pancatengah
4	Pembangunan dan penggantian jembatan	1) Pembangunan jembatan masuk kawasan Ibukota; 2) Pembangunan jembatan pada ruas jalan Ciawi - Singaparna; 3) Pembangunan jembatan pada jalan Kabupaten meliputi : a) Jembatan Cikalapa berada di ruas jalan Cibatu-Sukarame; b) Jembatan Lintungnaga berada di ruas jalan Mangunreja Sukaraja-Kawasan ibukota; c) Jembatan Cimedang berada di ruas jalan Ciwatin- Kalapagenep; d) Jembatan Cilonggan berada di ruas jalan Parungponteng-Barumekar; dan e) Jembatan pada jalan lingkar Utara Selatan Ibukota. Rencana penggantian jembatan di Kabupaten Tasikmalaya meliputi beberapa jembatan.

Sumber: Hasil analisis dan Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

- b. Sistem Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tasikmalaya saat ini baru memiliki 1 terminal Tipe B di Singaparna dan terminal tipe C, yang terletak di Kecamatan Pagerageung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Cineam, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Cikalong, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Taraju, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Bojonggambir dan Kecamatan Cipatujah. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tasikmalaya, rencana pengembangan terminal meliputi:

Tabel II. 19 Rencana Pengembangan Terminal Penumpang di Kabupaten Tasikmalaya

No	Pengembangan Prasarana Lalu Lintas & Angkutan Jalan	Lokasi (Kecamatan)
A	Terminal Penumpang	
1	Peningkatan terminal penumpang tipe C menjadi tipe B	PKL Singaparna
2	Optimalisasi terminal penumpang tipe C	1) Kecamatan Pagerageung; 2) Kecamatan Ciawi; 3) Kecamatan Rajapolah; 4) Kecamatan Cineam; 5) Kecamatan Sukaraja; 6) Kecamatan Cikatomas; 7) Kecamatan Cikalong; 8) Kecamatan Bantarkalong; 9) Kecamatan Taraju; 10) Kecamatan Tanjungjaya; 11) Kecamatan Sodonghilir; 12) Kecamatan Bojonggambir; dan 13) Kecamatan Cipatujah.
3	Pembangunan terminal penumpang tipe C	1) Kecamatan Manonjaya; 2) Kecamatan Cibalong; 3) Kecamatan Salopa; 4) Kecamatan Cisayong; 5) Kecamatan Bantarkalong; 6) Kecamatan Bojongasih; 7) Kecamatan Sukaratu; 8) Kecamatan Kadipaten; 9) Kecamatan Pancatengah; dan 10) Kecamatan Tanjungjaya.
B	Optimalisasi Alat Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Jalan	Optimalisasi alat pengawasan, pengendalian dan pengamanan jalan di Kabupaten Tasikmalaya adalah berada di Kecamatan Kadipaten yang merupakan bagian dari kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat
C	Optimalisasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	Optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor statis di Kabupaten Tasikmalaya adalah berada di Kecamatan Singaparna

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Lokasi pekerjaan terminal di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 20 terminal pada tahun 2010 yaitu SWP I terdiri dari terminal Ciawi, Cisayong, Rajapolah, Pageurageung, SWP II terminal Singaparna dan Sukaraja, SWP III terminal Taraju, Sodonghilir, Bojonggambir, SWP IV terminal Manonjaya, Salopa, Cineam, SWP V terminal Karangnunggal, Cibalanarik, Cibalong, Cipatujah, Pamijahan, Simpang dan SWP VI terminal Cikatomas dan Cikalong.

c. Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tasikmalaya berupa pengembangan jaringan trayek, sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 20 Rencana Pengembangan Jaringan Trayek

Jaringan trayek antar kota dalam provinsi	Jaringan Trayek antar kota antar provinsi	Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan
a) Singaparna – Bandung; b) Singaparna – Bekasi; c) Singaparna – Cikarang; d) Karangnunggal – Depok; dan e) Karangnunggal –Bandung.	a) Singaparna –Tangerang; b) Karangnunggal – Jakarta; c) Karangnunggal - Tangerang; d) Singaparna – Jakarta; e) Singaparna - Purwokerto; f) Singaparna - Yogyakarta.	Pengembangan jaringan trayek angkutan kota Pengembangan jaringan trayek angkutan perdesaan: a. Singaparna – Batubelah; b. Singaparna – Galunggung; c. Singaparna – Cibalanarik; d. Singaparna – Sukarame; e. Singaparna – Tenjowaringin; f. Singaparna – Tanjungjaya; g. Singaparna Leuwisari/Sariwangi

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

d. Rencana Sistem Jaringan Kereta Api

Pengembangan Sistem jaringan jalur perkeretaapian di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, terdiri atas:

- 1) Pengembangan jalur kereta api : Manojaya – Awipari, jalur Rajapolah – Indihiang; dan jalur Ciawi – Rajapolah;
- 2) Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur kereta api lintas Utara – Selatan berada antara Galunggung – Tasikmalaya; dan
- 3) Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta – Cikampek – Purwakarta – Bandung - Tasikmalaya - Banjar - Kroya - Kebumen - Kutoarjo -Yogyakarta-Klaten – Surakarta - Kertosono – Jombang -Surabaya.

Pengembangan stasiun kereta api melalui program renovasi bangunan stasiun meliputi:

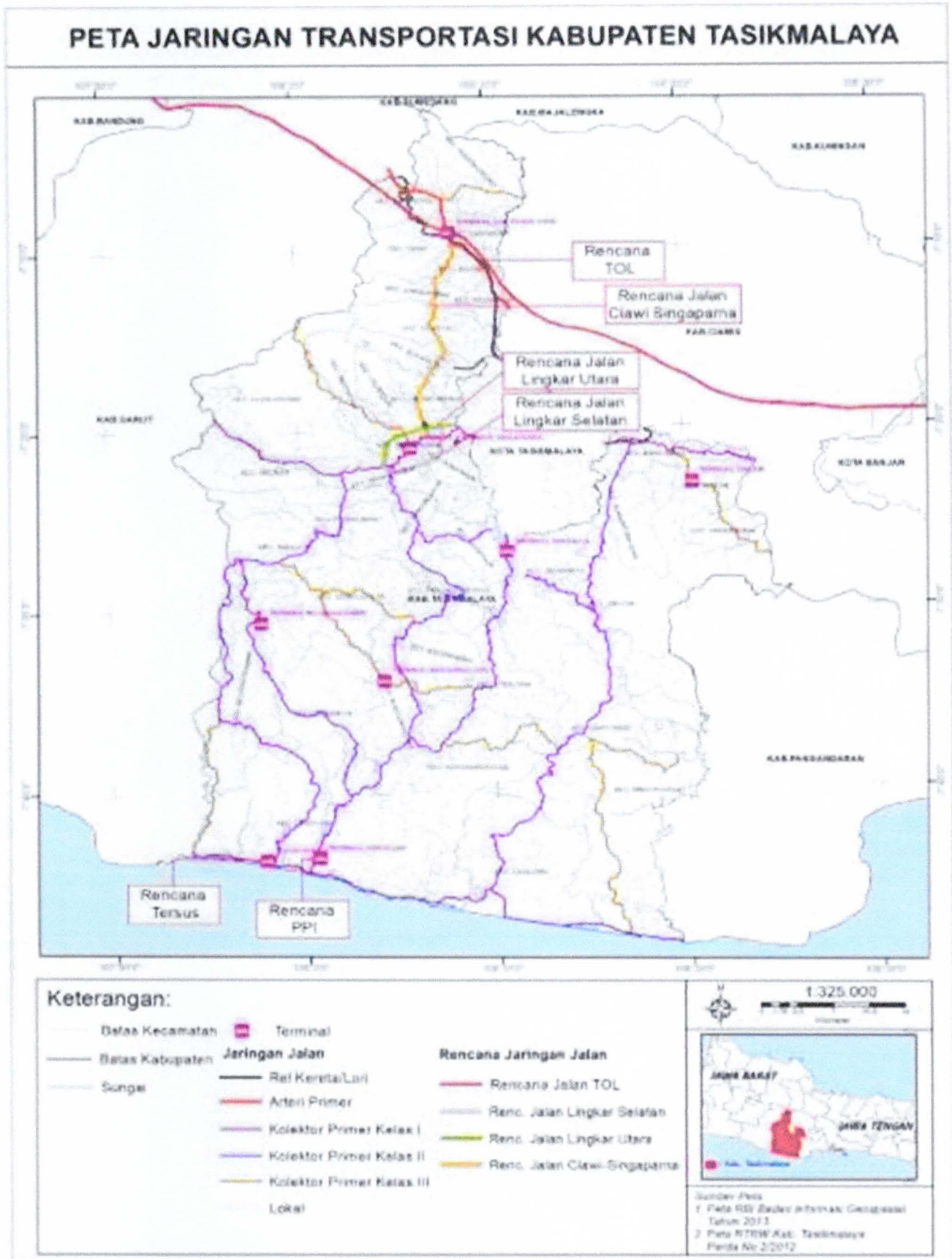
- 1) Stasiun Manonjaya;
- 2) Stasiun Rajapolah; dan
- 3) Stasiun Ciawi.

e. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Untuk sistem transportasi udara, telah dibuka Bandar Udara Wiriadinata yang terletak di kota Tasikmalaya. Sebelum dibukanya bandara ini, bandara terdekat adalah Bandara Husein Sastranegara yang berada di Bandung. Selain itu, aksesibilitasnya ditunjang dengan akses kereta api dengan stasiun pemberhentian di Kota Tasikmalaya.

f. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Untuk pelabuhan, direncanakan akan dibangun Pelabuhan Khusus Terminal Khusus (TERSUS) pendukung pengembangan komoditas unggulan pertambangan di Kecamatan Cipatujah dan Kecamatan Cikalong, juga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Cipatujah.



Gambar II. 14 Peta Jaringan Transportasi Kabupaten Tasikmalaya

3. Jaringan Energi dan Kelistrikan

a. Jaringan Energi

Pengembangan energi alternatif meliputi ;

- 1) Pengembangan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga panas bumi) berada di Karaha Bodas Kecamatan Kadipaten;
- 2) Pengembangan energi potensial air meliputi Kecamatan Salopa dan Kecamatan Cikalong;
- 3) Pengembangan bioenergi reaktor biogas meliputi beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Puspahiang, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cikalong, Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Pageurageung, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Mangunreja; dan
- 4) Energi alternatif PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Cineam dan Cigalontang

Sumber daya listrik dengan jaringan SUTET baru terdapat di bagian utara. Dengan gardu induk yaang terletak di kabupaten Tasikmalaya yaitu gardu induk karangnunggal, dan direncanakan akan dibangun pembangkit listrik baru, yaitu : PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Karaha Bodas di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dengan kapasitas 30 MW. Untuk mencukupi konsumsi listrik disini, Kabupaten Tasikmalaya mendapat saluran energi dari Kota Tasikmalaya, Kab. Garut, dan Pangandaran. Untuk energi alternatif lain sebagai penunjang kebutuhan energi di Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan pengembangan sebagai berikut:

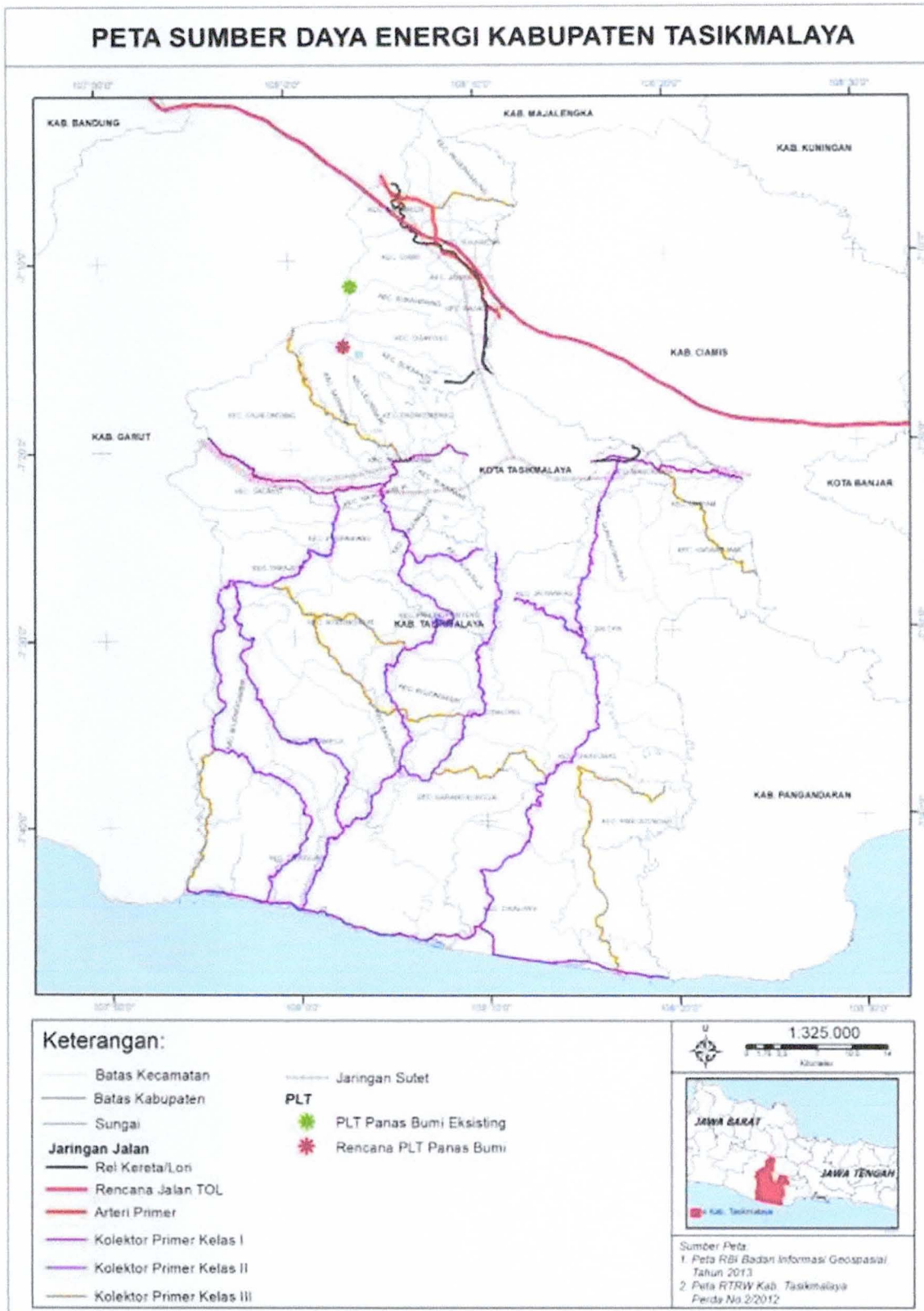
- 1) pengembangan panas bumi berada di Karaha Bodas Kecamatan Kadipaten;
- 2) pengembangan energi potensial air di Kecamatan Salopa dan Kecamatan Cikalong; dan
- 3) pengembangan bioenergi reaktor biogas di Kecamatan Puspahiang, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cikalong, Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Pageurageung, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Mangunreja.

b. Jaringan Listrik

- 1) Gardu Induk Tasikmalaya: Trafo No. II (1 x 30 MVA) Trafo No. III (1 x 15 MVA); Trafo No. IV (1 x 60 MVA) ;
- 2) Gardu Induk Malangbong: Trafo No. II (1 x 30 MVA); Trafo No. III (1 x 20 MVA);
- 3) Gardu Induk Tasik Baru : Trafo No. I (1 x 30 MVA);
- 4) Gardu Induk Garut : Trafo No. II (1 x 30 MVA);
- 5) Gardu Induk Pangandaran: Trafo No. I (1 x 20 MVA);
- 6) Gardu Induk Karangnunggal; dan
- 7) Juga direncanakan akan dibangun pembangkit listrik baru, yaitu : PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Karaha Bodas di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dengan kap. 30 MW.

Konsep dan Rencana Pengembangan yang diarahkan dalam RTRW Kabupaten Tasikmalaya meliputi:

- 1) Konsep Pengembangan pelayanan energi listrik:
 - a) Peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik;
 - b) Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani, utamanya bagi kawasan- kawasan permukiman yang belum memperoleh pelayanan energi listrik yang bersumber dari PLN;
 - c) Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dapat diasumsikan bahwa setiap KK akan memperoleh layanan jaringan listrik, sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani; dan
 - d) Pengembangan alternatif bentuk energi lain yang bisa dikembangkan untuk peningkatan pelayanan listrik di Kabupaten Tasikmalaya meliputi mikrohidro dan *solarcell* serta biogas.
- 2) Rencana Pengembangan
 - a) Pengembangan Jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas meliputi:
 - Pengembangan jaringan pipa minyak melintasi wilayah Kabupaten; dan
 - Pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) berada di Kecamatan Jamanis dan Kecamatan Rajapolah.
 - b) Pengembangan Jaringan prasarana tenaga listrik terdiri atas:
 - Pembangunan pembangkit tenaga listrik yang meliputi Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Cikalong dan Kecamatan Salopa.
 - Pembangunan gardu induk berada di Kecamatan Karangnunggal;
 - Pembangunan gardu distribusi berada di seluruh kecamatan.
 - c) Pengembangan Jaringan prasarana transmisi tenaga listrik meliputi:
 - Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi Kecamatan Cineam, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Mangunreja, Kecamatan Salawu dan Kecamatan Kadipaten.
 - Penambahan dan perbaikan jaringan listrik meliputi seluruhkecamatan; dan
 - Optimalisasi pelayanan listrik meliputi seluruh kecamatan.



Gambar II. 15 Peta Jaringan Energi Kabupaten Tasikmalaya

4. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan komunikasi di Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup bagus. Telepon kabel terpasang 69.064 SST, yang dilayani oleh 5 buah Kantor Cabang PT. Telkom dan menjangkau hampir seluruh Kecamatan.

Sedangkan jaringan telepon seluler untuk semua operator telekomunikasi telah menjangkau seluruh Kecamatan.

Adapula rencana pengembangan sistem telekomunikasi di Kabupaten Tasikmalaya meliputi pengembangan jaringan teresterial dan

pengembangan jaringan satelit. Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi berupa pengembangan sistem untuk menjangkau seluruh kecamatan, sedangkan pengembangan jaringan teresterial berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik.

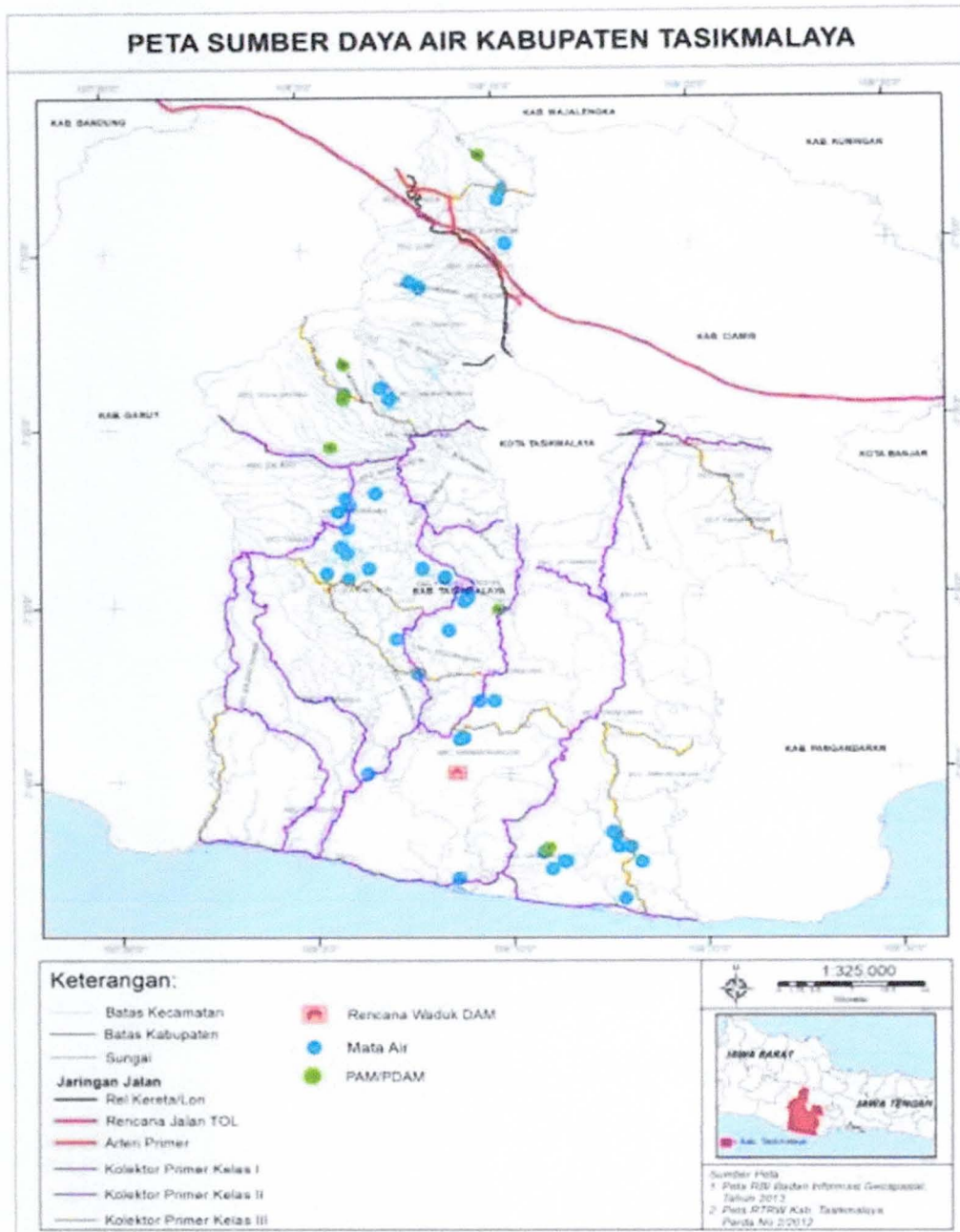
- a. Pengembangan jaringan satelit meliputi sebagai berikut:
- b. Pengembangan jaringan telekomunikasi internet berada di setiap ibukota kecamatan;
- c. Pengembangan perdesaan berbasis internet; dan
- d. Pengembangan menara telekomunikasi bersama.

5. Jaringan Sumber daya Air

Sistem sumberdaya air di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas:

- a. Wilayah Sungai Citanduy meliputi :
 - 1) Sungai Citanduy;
 - 2) Sungai Ciparagangan;
 - 3) Sungai Cijolang;
 - 4) Sungai Cipambokongan; dan
 - 5) Sungai Cipanerekan.
- b. Wilayah Sungai Ciwulan – Cilaki meliputi :
 - 1) Sungai Ciwulan;
 - 2) Sungai Cilaki;
 - 3) Sungai Cidadap;
 - 4) Sungai Cipatujah;
 - 5) Sungai Ciawi;
 - 6) Sungai Cimerak;
 - 7) Sungai Cikaso;
 - 8) Sungai Cimari; dan
 - 9) Sungai Cilayu.
- c. Cekungan air tanah meliputi :
 - 1) Kecamatan Salawu;
 - 2) Kecamatan Sukaratu;
 - 3) Kecamatan Cigalontang;
 - 4) Kecamatan Leuwisari; dan
 - 5) Kecamatan Kadipaten.

Terdapat rencana pembangunan waduk di Kecamatan Karangnunggal. Dan rencana pembangunan Bendungan Bendungan Leuwikeris dan Cikembang di Kecamatan Cineam, Bendungan Manonjaya dan Bendungan Pasirangin di Kecamatan Manonjaya. Selain itu ada pula sumber air bersih dari mata air meliputi Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Sariwangi, Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Puspahiang, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikalong, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Sukahening, Kecamatan Sukaresik dan Kecamatan Pagerageung.



Gambar II. 16 Peta Sumber dan Jaringan Air Kabupaten Tasikmalaya

6. Sanitasi

Pada saat ini, Kabupaten Tasikmalaya memiliki 1 (satu) TPPAS (Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah) yaitu TPPAS Cinangsi yang terletak di Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja dengan luas lahan sebesar 3,4 Ha. TPPAS Cinangsi sudah beroperasi selama \pm 23 tahun. Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan pembangunan TPPAS baru untuk menggantikan TPPAS Cinangsi, dikarenakan TPPAS ini sudah tidak mampu menampung seluruh buangan di Tasikmalaya. Beberapa alternatif adalah:

- a. TPPAS Nangkaleah yang terletak di Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja. Kendala yang dihadapi di lokasi tersebut adalah adanya Jaringan SUTET yang melintasi lokasi, sehingga tidak direkomendasikan untuk menjadi TPA baru.

- b. TPPAS Guranteng yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kendala yang dihadapi adalah akses menuju lokasi sulit dan berbahaya, sehingga tidak direkomendasikan untuk menjadi TPA baru.

Selain itu terdapat pula rencana Pembangunan dan Pengelolaan TPA di Kecamatan Singaparna, Manonjaya, Ciawi, Karangnunggal, dan Cikatomas. Untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) akan dibangun di seluruh kecamatan. Sedangkan sistem jaringan sanitasi di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas:

- a. Pengelolaan limbah domestik dengan sistem septiktank perorangan meliputi perkotaan Singaparna, perkotaan Ciawi, perkotaan Karangnunggal, perkotaan Rajapolah dan perkotaan Manonjaya.
- b. Pengelolaan limbah domestik dengan sistem komunal meliputi Kecamatan Singaparna, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Cipatujah dan Kecamatan Cineam.
- c. Pengelolaan limbah industri dengan instalasi pengolahan air limbah terpadu meliputi Kecamatan Singaparna, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Taraju dan Kecamatan Cineam.



Gambar II. 17 Peta Sistem Persampahan Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan yang dikemukakan tersebut berikut adalah resume kondisi infrastruktur wilayah di Kabupaten Tasikmalaya per-kecamatan.

Tabel II. 21 Kondisi Infrastruktur Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

NO	KECAMATAN	Aksesibilitas	Energi dan Kelistrikan	Telekomunikasi	Sumber & Jaringan Air Baku	Saluran Pembuangan dan Badan Penerima Air Limbah
1	Cipatujah	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas I; Terdapat Pelabuhan/Terminal Khusus dan PPI; Terdapat Terminal 1C	Pengembangan Bioenergi Reaktor Biogas	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Mata Air; Sungai	Pengelolaan limbah domestik sistem komunal; Pengelolaan limbah industri dengan IPLT; TPS
2	Karangnunggal	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas I	Pengembangan Bioenergi Reaktor Biogas; Terdapat Gardu Induk	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Terdapat Waduk; Sungai; Situ	Renc. TPA; Pengelolaan limbah domestik dengan sistem septiktank perorangan; Pengelolaan limbah domestik sistem komunal; TPS
3	Cikalong	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas I; Terdapat Terminal 1C	Pengembangan energi potensial air ; Pengembangan Bioenergi Reaktor Biogas	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Mata Air; PDAM; Sungai; Situ	TPS
4	Pancatengah	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas III	Pengembangan Bioenergi Reaktor Biogas	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Mata Air; Sungai	TPS
5	Cikatomas	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas II; Terdapat Terminal 1C	Pengembangan Bioenergi Reaktor Biogas	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai	Renc. TPA; Pengelolaan limbah industri dengan IPLT; TPS

NO	KECAMATAN	Aksesibilitas	Energi dan Kelistrikan	Telekomunikasi	Sumber & Jaringan Air Baku	Saluran Pembuangan dan Badan Penerima Air Limbah
6	Cibalong	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas II		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	PDAM; Sungai; Situ	TPS
7	Parungponteng	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas II		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Mata Air; Sungai	TPS
8	Bantarkalong	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas II; Terdapat Terminal 1C	Pengembangan Bioenergi Reaktor Biogas	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Mata Air; Sungai	Pengelolaan limbah industri dengan IPLT; TPS
9	Bojongasih	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas II		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai	TPS
10	Culamega	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas II		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai	TPS
11	Bojonggambir	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas II; Terdapat Terminal 1C		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai; Situ	TPS
12	Sodonghilir	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas III; Terdapat Terminal 1C		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Mata Air	TPS
13	Taraju	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas II; Terdapat Terminal 1C		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Situ	Pengelolaan limbah industri dengan IPLT; TPS
14	Salawu	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas I	Dilalui SUTET	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	CAT; Sungai	TPS
15	Puspahiang	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas II	Pengembangan Bioenergi Reaktor Biogas	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Mata Air	TPS

NO	KECAMATAN	Aksesibilitas	Energi dan Kelistrikan	Telekomunikasi	Sumber & Jaringan Air Baku	Saluran Pembuangan dan Badan Penerima Air Limbah
16	Tanjungjaya	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas II; Terdapat Terminal 1C		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai; Situ	TPS
17	Sukaraja	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas II; Terdapat Terminal 1C		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai	TPS
18	Salopa	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas II	Pengembangan energi potensial air	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet		TPS
19	Jatiwaras	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Arteri Primer		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai	TPS
20	Cineam	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas I; Terdapat Terminal 1C	Dilalui SUTET	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Bendungan; Sungai; Situ	Pengelolaan limbah domestik sistem komunal; Pengelolaan limbah industri dengan IPLT; TPS
21	Karangjaya	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas III		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai	TPS
22	Manonjaya	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas I	Pengembangan Bioenergi Reaktor Biogas; Dilalui SUTET	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Bendungan; Sungai; Situ	Renc. TPA; Pengelolaan limbah domestik dengan sistem septiktank perorangan; Pengelolaan limbah domestik sistem komunal; Pengelolaan limbah industri dengan IPLT; TPS
23	Gunungtanjung	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas II		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet		TPS

NO	KECAMATAN	Aksesibilitas	Energi dan Kelistrikan	Telekomunikasi	Sumber & Jaringan Air Baku	Saluran Pembuangan dan Badan Penerima Air Limbah
24	Singaparna	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas I; Rencana Jalan Ciawi-Singaparna; Rencana Jalan Lingkar Perkotaan Singaparna; Terdapat Terminal 1B	Dilalui SUTET	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai	Renc. TPA; Pengelolaan limbah domestik dengan septiktank perorangan; Pengelolaan limbah domestik sistem komunal; Pengelolaan limbah industri dengan IPLT; TPS
25	Sukarame	Rencana Jalan Lingkar Perkotaan Singaparna	Dilalui SUTET	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai	TPS
26	Mangunreja	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas I; Rencana Jalan Lingkar Perkotaan Singaparna	Pengembangan Bioenergi Reaktor Biogas; Dilalui SUTET	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	PDAM; Sungai	TPPAS Eksisting; TPPAS Alternatif; TPS
27	Cigalontang	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas III	Dilalui SUTET	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	CAT; PDAM; Sungai	TPA Regional; TPS
28	Leuwisari	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas III; Rencana Jalan Lingkar Perkotaan Singaparna		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	CAT; Mata Air	TPS
29	Sariwangi	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas III		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Mata Air; PDAM; Sungai	TPS
30	Padakembang	Rencana Jalan Ciawi-Singaparna; Rencana Jalan Lingkar Perkotaan Singaparna		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai; Situ	TPS
31	Sukaratu	Rencana Jalan Ciawi-Singaparna		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	CAT; Situ; Sungai	TPS

NO	KECAMATAN	Aksesibilitas	Energi dan Kelistrikan	Telekomunikasi	Sumber & Jaringan Air Baku	Saluran Pembuangan dan Badan Penerima Air Limbah
32	Cisayong	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas I	Dilalui SUTET	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Mata Air; Sungai	TPS
33	Sukahening	Rencana Jalan Ciawi-Singaparna		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Mata Air	TPS
34	Rajapolah	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Arteri Primer; Rencana TOL; Terdapat Terminal 1C	Dilalui SUTET	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai	TPS; Pengelolaan limbah domestik dengan sistem septiktank perorangan; Pengelolaan limbah domestik sistem komunal; TPS
35	Jamanis	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas I; Rencana TOL	Dilalui SUTET	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai	TPS
36	Ciawi	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Arteri Primer; Rencana TOL; Rencana Jalan Ciawi-Singaparna; Terdapat Terminal 1C	Dilalui SUTET	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Sungai	Renc. TPA; TPS; Pengelolaan limbah domestik dengan sistem septiktank perorangan; Pengelolaan limbah domestik sistem komunal; Pengelolaan limbah industri dengan IPLT; TPS
37	Kadipaten	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Arteri Primer; Rencana TOL	Pengembangan panas bumi ; Dilalui SUTET	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	CAT	TPS
38	Pagerageung	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Kolektor Primer Kelas III; Terdapat Terminal 1C	Pengembangan Bioenergi Reaktor Biogas	Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Mata Air; PDAM; Sungai	TPPAS Alternatif; TPS

NO	KECAMATAN	Aksesibilitas	Energi dan Kelistrikan	Telekomunikasi	Sumber & Jaringan Air Baku	Saluran Pembuangan dan Badan Penerima Air Limbah
39	Sukaresik	Tipe Jalan Tertinggi Jalan Arteri Primer; Rencana TOL		Jaringan telepon seluler; Jaringan Internet	Mata Air; Sungai	TPS

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

1. Jumlah Unit Usaha Sektor Industri

Tiap tahunnya terdapat pertumbuhan positif terhadap jumlah unit usaha industri di Kabupaten Tasikmalaya seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel II. 22 Jumlah Unit Usaha Sektor Industri

NO	URAIAN	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Sektor Industri							
	- Sentra	375	381	383	391	399	405	410
	- Unit Usaha	14,746	14,983	15,118	15,250	15,663	16,008	16.188
	- Tenaga Kerja (Orang)	110,884	112,086	112,692	117,371	119,082	121,688	121.888
	- Nilai Investasi (juta Rp.)	120,926	137,614	152,910	158,955	165,719	177,330	179.324
	Terdiri dari :							
1	<u>Industri Kecil Non Formal</u>							
	- Unit Usaha	12,870	13,043	13,138	13,234	13,641	13,915	13,925
	- Tenaga Kerja (Orang)	92,571	93,103	93,532	93,962	95,423	97,648	97,798
	- Nilai Investasi (juta Rp.)	40,922	41,836	43,003	43,392	44,281	46,760	46,832
2	<u>Industri Kecil Formal</u>							
	- Unit Usaha	1,800	1,822	1,839	1,865	1,870	1,941	2,058
	- Tenaga Kerja (Orang)	17,354	17,650	17,804	21,952	22,022	22,403	22,754
	- Nilai Investasi (juta Rp.)	45,085	45,771	47,376	48,899	49,774	58,906	59,829
3	<u>Industri Menengah Formal</u>							
	- Unit Usaha	76	118	141	151	152	152	152
	- Tenaga Kerja (Orang)	959	1,333	1,356	1,457	1,637	1,637	1,637
	- Nilai Investasi (jutaRp.)	34,920	50,007	62,531	66,664	71,664	71,664	71,664

Sumber: Data Industri Kabupaten Tasikmalaya, Tahun 2020

2. Potensi Industri Kecil-Menengah

Kabupaten Tasikmalaya telah dikenal sebagai produsen produk industri kecil yang handal, terutama di bidang kerajinan seperti kerajinan berbahan baku mendong, pandan, dan bambu. Selain itu bordir dari tasikmalaya juga terkenal hingga ke mancanegara. Industri lain yang cukup banyak ditemukan di Tasikmalaya adalah industri Gula Aren. Untuk itu, program pengembangan industri kecil menengah diarahkan pada peningkatan daya saing dengan pemanfaatan sumberdaya lokal dalam menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif. Berdasarkan hasil survei, Kabupaten Rajapolah memiliki potensi industri yang cukup mumpuni untuk pengembangan industri lanjut dengan jenis industrinya adalah industri kerajinan. Berikut adalah industri yang dapat ditemukan di Tasikmalaya:

Tabel II. 23 Jumlah Unit Usaha, dan Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Nilai Produksi, dan Nilai Bahan Baku Industri Kecil Non-Formal Berdasarkan Jenis Industri di Kab. Tasikmalaya

Jenis Industri	Jumlah sentra	JUMLAH		NILAI INVESTASI (Rp 000)	NILAI PRODUKSI (Rp 000)	NILAI BAHAN BAKU (Rp 000)
		Unit usaha	TK			
1	2	3	4	5	6	7
Rajutan	1	10	90	450,000	675,000	441,000
Tas	1	15	60	148,532	1,101,600	459,000
Minyak Kelapa	1	10	47	150,500	540,000	48,000
Sapu Ijuk	5	220	756	114,000	39,690,000	34,020,000
Peng. Logam - Golok	4	323	1,664	1,369,615	124,800,000	49,920,000
Peng. Logam - Emas	1	73	510	320,113	50,895,000	45,240,000
Konveksi	7	295	889	649,349	64,008,000	58,674,000
Meubel	16	598	1,804	992,625	550,776,000	430,908,000
Barang dari Semen	3	70	175	1,648,718	50,320,000	13,094,250
Batik Yulis	2	17	50	49,540	9,600,000	7,500,000
Anyaman Mendong	23	1556	7029	2,850,882	105,435,000	30,365,326
Anyaman/Kerajinan Pandan	32	979	15926	4,510,613	344,916,000	82,806,900
Olahan Makanan - Dodol Sirsak	2	31	255	255,194	4,702,500	3,081,078
Olahan Makanan - Makanan Ringan	14	340	858	383,600	25,740,000	12,355,200
Olahan Makanan - Dodol Salak	4	40	130	73,000	4,875,000	3,295,500
Olahan Makanan - Keripik	9	492	2,690	1,345,000	80,700,000	54,553,200
Olahan Makanan - Dodol Wajit	2	45	183	189,016	4,941,000	3,804,570
Olahan Makanan - Gula Aren/cetak/semut	40	1,912	10,152	1,816,350	322,670,400	274,769,820
Olahan Makanan - Gula Kelapa	13	563	5,085	366,200	91,530,000	82,377,000
Olahan Makanan - Dodol Susu	2	14	130	67,500	1,560,000	1,404,000
Olahan Makanan - Opak Ketan	8	179	733	201,427	21,990,000	15,832,800
Olahan Makanan - Tempe	16	346	849	261,100	142,632,000	61,128,000
Olahan Makanan - Sale Pisang	4	115	357	44,337	16,065,000	11,781,000
Olahan Makanan - Tahu	16	330	994	206,000	141,943,200	60,832,800
Olahan Makanan - Gulampo	1	7	23	13,800	331,200	138,000
Bahan Konstruksi - Kapur	4	175	1,370	504,656	8,827,932	4,763,067
Bahan Konstruksi - Batu Onix	2	35	311	138,251	13,010,700	7,697,250
Bahan Konstruksi - Bata Merah	19	602	4,107	2,932,222	392,607,505	120,021,154
Bahan Konstruksi - Genteng	5	223	957	419,987	609,600,000	27,940,000

Anyaman Bambu	47	1,547	17,18 5	4,479,717	340,333,400	15,469,700
Bordir	97	2,582	21,42 9	19,294,853	1,247,167,800	1,234,310,400
Lampit Rumbia	4	171	850	513,000	13,176,000	5,270,400
JUMLAH	405	13,915	97,648	46,759,697	4,827,160,237	2,754,301,415

Sumber: Data Industri Kabupaten Tasikmalaya, Tahun 2018

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa industri kecil dan menengah yang paling potensial di kabupaten ini berdasarkan jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang diserap adalah Industri anyaman bambu, anyaman mendong, anyaman dan kerajinan pandan, bordir, dan gula aren.



Gambar II. 18 Bahan Baku Industri Kerajinan Pandan, Rajapolah



Gambar II. 19 Hasil Produksi Aneka Industri Kerajinan, Kab Tasikmalaya



Gambar II. 20 Hasil Produksi Industri Kerajinan Pandan, Kab Tasikmalaya

Sedangkan untuk jenis industri kecil formal, terdapat 19 industri pengolahan tembakau yang cukup potensial dan saat ini sedang berkembang.

Tabel II. 24 Industri Kecil Formal Pengolahan Tembakau

No	Nama Perusahaan	Nama Pengusaha	Alamat	Desa	Kecamatan	No Telephone
1	234 Mekar Wangi	H. Jajang Rahman	-	Wakap	Bojongsambir	-
2	Bintang Putra	Ujang Rusmana	Panyingkiran Rt. 05 Rw. 02	Banyuasih	Taraju	081-323-771-088
3	Sembilan	H. Elim (alm)	Toblong Rt. 01 Rw. 02	Mangunreja	Mangunreja	085-223-821-119
4	Son Singaparna	Permana	Bojongkoneng Rt.04 Rw.01	Sukaasih	Singaparna	081-323-582-818
5	Delima	Momo	Jl. Raya Barat Ciputri Rt. 010 Rw. 04	Arjasari	Leuwisari	085-723-464-222 08572443222
6	Kuda Terbang	H. Endang Komara	Bale Endah Rt 05. Rw. 01	Sukamanah	Cigalontang	081-223-520-46
7	Padi Golok	Asep S Hidayat	Jl. Raya Utara No 63 Citeureup	Singaparna	Singaparna	081-222-802-228
8	Jaya Ritel	Rahmat Setiawan SH	Jl. Raya Utara No. 63 Citeureup	Singaparna	Singaparna	0822-1432-2998
9	Zahril	Hj. Ai Elin	Sukawangi No. 42 Rt. 30 Rw. 03	Sukarame	Sukarame	081-222-882-224
10	Hm. Putra	Heri Kuswanto	Kp. Jareged Rt. 04 Rw. 01	Jaya Putra	Sariwangi	0852-9426-5034
11	Sumber Tani Jaya	H. Tatang Effendi	Sindang Tanjung	Cisayong	Cisayong	081-323-142-470
12	Sanding Tiga Mas	H. Asep Badru	Kebon Kalapa Rt. 03 Rw. 01	Rajapolah	Rajapolah	081-323-102-777
13	Jangkar	H. Yudi Yudiana	Pangligaran Rt. 03 Rw. 08	Rajapolah	Rajapolah	081-323-102-777
14	Tombak Jaya	H. Asep Badru	KebonKalapa Rt. 03 Rw. 01	Rajapolah	Rajapolah	081-323-102-777
15	Zalza	H. Usep Suherman	Walagar Rt. 02 Rw. 01	Kamulyan	Manonjaya	085-222-290-879
16	Zaza	H. Muhamad Riswan	Situ Kaler Rt. 01 Rw. 03	Kalimanggis	Manonjaya	085-222-290-800
17	Zaz	H. Agus Hermanto	Selakaso Rt. 03 Rw. 06	Margahayu	Manonjaya	085-222-290-773 085323344551
18	Makmur	H. Muhamad Riswan	Dusun Cisitua Kaler Rt.001 Rw, 003	Kalimanggis	Manonjaya	0852-1015-1128
19	Makbul	H. Usep Suherman	Walagar Rt. 02 Rw. 01	Kamulyan	Manonjaya	085-222-290-879

Berdasarkan Kecamatan, berikut adalah potensinya :

KECAMATAN	Rajutan	Tas	Minyak Kelapa	Sapu ijuk	Pengrajin		Konveksi	Meubel Kayu	Kerajinan semen	Batik Tulis	Anyaman Mendong	Anyaman Pandan	Makanan	Konstruksi	Anyaman Bambu	Bordir	Lampit Rumbia	Jumlah
					Logam													
					Golok	Emas												
Cipatujah	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	130	423	237	0	169	0	1071
Karangnunggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	68	0	234	0	395
Cikalong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	301	40	0	221	0	772
Pancatengah	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	118	111	25	150	0	494
Cikatomas	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	88	25	10	172	0	399
Cibalong	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	85	80	16	0	0	265
Parungponteng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	66	0	20	0	147
Bantarkalong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	107	0	29	0	212
Bojongasih	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	4	42	0	75
Culamega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	37	0	122
Bojonggambir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	30	0	73
Sodonghilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	0	86	0	312
Taraju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	94	0	0	23	0	212
Salawu	0	0	0	0	0	0	18	109	0	0	0	0	136	0	227	37	0	527
Puspahiang	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	121	58	0	211
Tanjungjaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	24	24	74	36	177
Sukaraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	120	0	348	0	485
Salopa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	198	0	60	198	0	696
Jatiwaras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	353	0	10	127	0	576
Cineam	0	0	10	52	0	0	94	150	0	0	50	0	365	0	0	20	0	741
Karangjaya	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	215
Manonjaya	0	0	0	0	212	0	42	0	0	0	320	0	254	13	0	30	0	871
Gunungtanjung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853	0	0	0	0	0	0	853
Singaparna	0	0	0	0	7	0	0	0	20	0	0	0	192	27	60	35	0	341
Sukarame	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	78	0	125
Mangunreja	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	36	0	0	52
Cigalontang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	55	0	135	301
Leuwisari	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	195	50	0	437
Sariwangi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	87	0	106
Padakembang	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	213	55	0	409
Sukaratu	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	78	0	40	92	0	267
Cisayong	0	15	0	0	0	0	0	38	34	0	0	0	85	45	249	5	0	471
Sukahening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	72	60	0	139
Rajapolah	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	322	47	0	0	15	0	457
Jamanis	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	25	38	0	36	0	0	137
Ciawi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	10	0	0	223
Kadipaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	93
Pagerageung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	216	50	22	0	0	424
Sukaresik	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	32
Kabupaten Tasikmalaya	10	15	10	220	323	73	295	598	70	17	1,556	979	4,414	1,035	1,547	2,582	171	13,915

Sumber: Data Industri Kabupaten Tasikmalaya, Tahun 2019

3. Produk Industri Kerajinan

Kabupaten Tasikmalaya sudah diketahui baik di tingkat regional maupun internasional sebagai produsen industri kerajinan yang handal karena masyarakatnya punya kreativitas dan keterampilan dalam mengolah bahan baku menjadi aneka ragam produk kerajinan. Jenis produk yang dihasilkan sangat bervariasi dan memiliki prospek pasar yang cukup baik bahkan beberapa sektor industri seperti anyaman mendong, bambu, pandan dan bordir telah memasuki pasar ekspor. Industri unggulan antara lain anyaman bambu, mendong, pandan, dan bordir.

Jika ditelaah, meskipun tersedia bambu di kabupaten ini, dan memang sudah ada yang membuat anyaman bambu, namun masih terbatas, sehingga dibutuhkan distribusi dari daerah lain seperti Kabupaten Ciamis, dan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oleh karena itu, pengembangan industri anyaman perlu lebih ditingkatkan.

Selain itu terdapat barang lain yang tidak tersedia industrinya di Kabupaten Tasikmalaya, namun banyak didistribusikan disini, yaitu benang. Kebutuhan akan benang disini sangatlah tinggi. Benang dibutuhkan sebagai bahan baku penunjang industri bordir, dan industri pakaian/konveksi yang sedang tumbuh dan berkembang di Kabupaten ini. Berikut gambaran beberapa produk industri kerajinan di Tasikmalaya.

a. Industri Kerajinan Bordir

Lokasi sentra bordir tersebar di 90 desa pada 29 kecamatan. Perkembangan industri bordir, mengalami peningkatan yang sangat pesat, baik skala usaha maupun perkembangan teknologinya. Yang pada awalnya menggunakan mesin jahit kecil (kejek) ke mesin jahit cepat sampai dengan saat ini menggunakan mesin bordir komputer. Penggunaan mesin border computer dimaksudkan untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat dan memiliki pangsa pasar yang cukup luas untuk dikembangkan.

Pengembangan industri kecil bordir masih membutuhkan pembangunan industri penunjang, terutama industri bahan baku kain dan benang yang selama ini dipasok dari luar daerah (Bandung, Jakarta). Dengan adanya industri penunjang, diharapkan terjadinya sinergi ekonomi yang berujung pada efisiensi produk dan peningkatan daya saing. Sesuai dengan arah kebijakan pengembangan industri bordir Jawa Barat dimana Tasikmalaya diarahkan pada pengembangan fashion busana muslim nasional untuk memasok kebutuhan fashion dunia. Disamping itu, juga dibutuhkan investor untuk perluasan pangsa pasar, baik skala nasional maupun internasional.

Rantai pasok industri ini membuka peluang pasar untuk pasar dalam negeri dan pasar ekspor antara lain ke Malaysia, Singapura dan beberapa Negara Timur Tengah. Rantai nilai yang dihasilkan antara lain pakaian jadi seperti baju kurung, baju muslim, kebaya, dan lain-lain.

b. Industri Kerajinan Mendong

Lokasi sentra industri mendong tersebar di 29 desa pada 10 Kecamatan. Bahan baku mendong untuk industri ini masih dipasok dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Sehingga pengembangannya baik

dilakukan untuk peeningkatan bahan baku di daerah lokal. Rantai nilai industri ini antara lain produk kerajinan (*Handy Craft*) dan tikar sajadah untuk calon jemaah haji. Rantai pasoknya berada di pasar lokal, nasional dan ekspor ke Malaysia, Jepang ,Inggris, Jerman dan Arab Saudi.

c. Industri Kerajinan Pandan

Lokasi industri kecil pandan tersebar di 28 desa pada 6 kecamatan. Industri kerajinan pandan sangat potensial untuk dikembangkan karena produk pandan desainnya tidak statis, juga pendekatan fungsi produk, bentuk maupun motif sudah dapat memenuhi permintaan pasar, baik pasar lokal maupun pasar internasional. Rantai nilai industri ini cukup banyak, termasuk kerajinan pajangan, barang-barang keperluan sehari-hari seperti tas, lampu, sandal, kotak peralatan, dan sebagainya. Rantai nilai industri ini termasuk pasar lokal dan internasional seperti Australia, Amerika, Malaysia, Jepang, Perancis dan negara Eropa lainnya

d. Industri Kerajinan Bambu

Sentra bordir tersebar di 44 desa pada 20 kecamatan. Industri kerajinan bambu merupakan kegiatan/usaha yang dilakukan secara turun temurun dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Industri ini mampu menyerap tenaga kerja/perajin yang cukup banyak dengan kemampuan dan teknologi serta desain yang sederhana, serta mampu membuka permintaan pasar yang cukup luas untuk dikembangkan lebih lanjut.

Nilai yang dihasilkan dari industri ini hampir sama dengan industri kerajinan anyaman lainnya. Rantai pasoknya adalah skala pasar lokal, nasional dan ekspor ke Malaysia. Perluasan pangsa pasar, baik skala Nasional maupun Internasional perlu ditingkatkan.

4. Potensi Industri Besar

Terdapat beberapa industri besar di Kecamatan Tasikmalaya, antara lain:

- a. PT. Hini Daiki Indonesia, berada di Kecamatan Cisayong. Produk utama yang dihasilkan adalah Topi dan Jaket. Jumlah Tenaga Kerja ±660 orang (sumber: hinidaiki.co.id).

Tabel II. 26 PT. Hini Daiki Indonesia

Analisis Demand	Industri PT. Hini Daiki Indonesia
Hasil Produk	Hasil Garmen, Topi, Jaket
Orientasi Lokasi	Desa Mekarsari, Kecamatan Cisayong
Lahan	Lahan eksisting ± 1 ha

- b. PT. Theodore Pan Garmindo, yang berada di Kecamatan Cisayong. Bergerak pada Industri Garmen. Jumlah tenaga kerja \pm 200 orang. PT ini baru beroperasi, dan perkiraan ke depannya dibutuhkan hingga 1000 orang tenaga kerja.

Tabel II. 27 Theodore Pan Garmindo, Kabupaten Tasikmalaya

Analisis Demand	Industri PT Theodore Pan Garmindo
Hasil Produk	Garmen
Orientasi Lokasi	Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong
Lahan	Lahan eksisting \pm 1 ha

- c. PT. San N Garmindo, Kecamatan Rajapolah. PT ini juga bergerak di Industri Garmen. Jumlah tenaganya 240 orang (pada 2013).

Tabel II. 28 PT. San N Garmindo, Kabupaten Tasikmalaya

Analisis Demand	Industri PT. San N Garmindo
Hasil Produk	Garmen
Orientasi Lokasi	Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah
Lahan	Lahan eksisting \pm 2 ha

- d. Raya Sugar Indo Inti. PT. Industri ini berada di Kec. Singaparna. Produk yang dihasilkan gula.

Tabel II. 29 Industri Raya Sugar Indo Inti. PT, Kab. Tasikmalaya

Analisis Demand	Industri Raya Sugar Indo Inti. PT
Hasil Produk	Gula, Glukosa
Orientasi Lokasi	Desa Cikadongdong, Kec. Singaparna
Lahan	Lahan eksisting \pm 5 ha

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN
SASARAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

1. Visi

Visi pembangunan daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016–2021 adalah:

**“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ ISLAMI, DINAMIS,
DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS
BERBASIS PERDESAAN”**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Religius/Islami merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Kalimat “Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami” sebagaimana terumuskan dalam "visi" dimaksud adalah menjadikan spirit kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat;
- b. Dinamis adalah semangat untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah;
- c. Berdaya Saing di bidang Agribisnis bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing di bidang agribisnis bermakna kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

- dalam bidang agribisnis. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industri dan agro teknologi; dan
- d. Berbasis Perdesaan. Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah dengan mayoritas berciri perdesaan. Sangat logis apabila perencanaan pembangunan disusun berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada di perdesaan. Berbasis perdesaan mengandung pengertian bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan pada dua paradigma utama yaitu, Membangun Desa dan Desa Membangun yang diarahkan pada pencapaian Desa yang maju, sejahtera dan demokratis. Berbasis perdesaan bermakna pula Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yaitu meningkatnya derajat kesanggupan-kemampuan warga di kawasan perdesaan yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*); peningkatan penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber daya yang diperlukan; meningkatnya kesadaran akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya; serta meningkatnya kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- a. Misi Pertama, mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan Berkualitas. Hal ini untuk menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi;
- b. Misi Kedua, Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata. Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- c. Misi Ketiga, mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilandasi *spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah* guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik; dan
- d. Misi Keempat meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. Menciptakan sosok

Kabupaten Tasikmalaya yang mampu menyediakan ruang dan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas serta selaras dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah, konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya dan daerah lain.

B. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, visi pembangunan industri Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KETERPADUAN INDUSTRI BERBASIS POTENSI
LOKAL YANG MEMILIKI DAYA SAING GLOBAL”**

Makna utama dari visi disini dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Terwujudnya Keterpaduan Industri Berbasis Potensi Lokal, maksudnya adalah memberdayakan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya mulai dari hasil sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keunggulan kabupaten lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan industri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dari segala sektor; dan
2. Memiliki daya saing global, maksudnya adalah diharapkan industri yang tumbuh nantinya dapat menjadi unggulan bukan hanya dikabupaten, namun secara nasional, dan dapat menembus pasar internasional. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Tasikmalaya mengemban misi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan potensi sumber daya alam untuk pemenuhan bahan baku industri dengan pengembangan teknologi secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya sebagai kabupaten yang ramah untuk investasi;
 - c. Meningkatkan peran industri Kabupaten Tasikmalaya dalam peningkatan kualitas, kuantitas dan pemasaran produk industri dengan daya saing industri yang mandiri dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. Meningkatkan peran industri Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan merata serta memperluas kesempatan kerja.

C. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri Kabupaten Tasikmalaya, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya 20 (dua puluh) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan produksi sumber daya alam dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi serta integrasi ketersediaan bahan baku dari seluruh wilayah kecamatan dengan kebutuhan bahan baku industri;

2. Tersedianya lahan untuk memudahkan investor industri yang ingin berinvestasi dengan konsep perwilayahan industri, pengembangan jaringan teknologi dan komunikasi untuk memudahkan investasi serta perijinan;
3. Meningkatnya rantai nilai, rantai pasok juga desain produk dan kemasan untuk menciptakan industri bernilai tambah tinggi, inovatif, dan berkualitas tanpa mengurangi perannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Meningkatnya pemasaran produk industri baik secara lokal, nasional, dan internasional; dan
5. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan dan industri kerajinan dalam PDRB kabupaten serta meningkatnya tenaga kerja sektor industri juga mengurangi tingkat pengangguran.

D. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya

Berikut adalah sasaran pembangunan industri Kabupaten Tasikmalaya:

1. Terpenuhinya 70% kebutuhan bahan baku industri dari sumber daya alam lokal;
2. Teralokasinya lahan investasi industri dengan konsep perwilayahan. Yaitu dengan tersedianya lahan peruntukan industri yang menghasilkan limbah secara terpusat dengan dibangunnya kawasan industri seluas ± 327 ha di Ciawi-Kadipaten dan Cipatujah, terbangunnya sentra IKM by design terintegrasi wisata di Salawu, serta alokasi lahan untuk Kawasan Industri Kecil-Menengah di Cineam, Cikalong, dan Manonjaya;
3. Bertambahnya nilai tambah atau rantai nilai produk dengan terciptanya produk-produk turunan baru industri hilir;
4. Terbentuk lembaga penelitian dan pengembangan industri untuk meningkatkan nilai tambah dan pengembangan industri secara inovatif dan berdaya saing, juga menciptakan industri yang ramah lingkungan;
5. Meningkatnya pasar ditingkat lokal dengan menarik pengunjung untuk datang ke Kabupaten Tasikmalaya, serta pengembangan pusat pemasaran produk kerajinan Rajapolah menjadi *Mall* Produk Kerajinan;
6. Tercapainya pertumbuhan investasi industri sebesar 10% pertahun dan meningkatkan kontribusi dalam PDRB kabupaten sebesar 15%;
7. Turunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya menjadi 3% serta meningkatkan kesempatan kerja di bidang industri sebesar 10% per tahun; dan
8. Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan SDM yang mampu menopang keberlanjutan kompetensi inti industri melalui koperasi.

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Tasikmalaya selain menggunakan data historis, proyeksi juga dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang diestimasi akan terjadi selama kurun waktu tersebut. Sasaran pembangunan industri Kabupaten Tasikmalaya untuk kurun waktu hingga 2040 ditunjukkan pada Tabel di bawah ini:

**Tabel III. 1 Sasaran Pembangunan Industri
Kabupaten Tasikmalaya**

No.	Sasaran	Indikator	Data Awal	Tahun				
				2020	2025	2030	2035	2040
1.	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Industri	Kontribusi PDRB Industri (mencapai share 15% pada tahun ke-20)	7,5% (th. 2017)	8%	10%	12%	14%	15%
2.	Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri (meningkat 10% per tahun)	121.688 orang (th.20 18)	133.857 orang	195.980 orang	315.627 orang	508.321 orang	818.656 orang
3.	Peningkatan Sektor Industri	Nilai Investasi Industri (meningkat 10% per tahun)	177.330 juta Rp. (th.2018)	195.063 juta Rp.	285.592 juta Rp.	459.948 juta Rp.	740.751 juta Rp.	1.192.988 juta Rp.
		Terwujudnya Sentra Industri Potensial	405 sentra (th.2018)	410 sentra	417 sentra	426 sentra	440 sentra	456 sentra

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan industri sesuai yang diharapkan, berikut adalah strategi yang perlu diupayakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut:

1. Strategi pembangunan industri untuk mencapai tujuan meningkatnya produksi sumber daya alam dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi serta integrasi ketersediaan bahan baku industri, yaitu:
 - a. Pemberdayaan petani dan kelompok penghasil bahan baku untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya;
 - b. Melakukan inventarisasi dan pemetaan hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, dan *agroforestry*;
 - c. Pembangunan website terintegrasi antara kelompok penghasil bahan bak(pertanian, peternakan, perkebunan, agroforestry) dengan pelaku industri untuk meningkatkan penyerapan bahan baku lokal;
 - d. Pembangunan Technopark sebagai pusat pengembangan rekayasa produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan *agroforestry*.
2. Strategi pembangunan industri untuk mencapai tujuan tersedianya lahan untuk memudahkan investor industri yang ingin berinvestasi dengan konsep perwilayahan industri, serta pengembangan jaringan teknologi dan komunikasi untuk memudahkan investasi serta perijinan, yaitu:
 - a. Pembangunan Sentra IKM by *Design* yang terintegrasi dengan wisata;
 - b. Pembangunan Kawasan Industri di Ciawi dan Cipatujah dengan total luas kurang lebih 327 ha untuk memenuhi permintaan lahan investasi industri menengah – besar;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan peruntukan industri (aksesibilitas, energi kelistrikan, sumber daya air, telekomunikasi, saluran pengelola limbah);
 - d. Pemasaran lahan ke investor industri, serta pemasaran wilayah Kawasan industri ke pengelola Kawasan industri.
3. Strategi pembangunan industri untuk mencapai tujuan meningkatnya rantai nilai, rantai pasok juga desain produk dan kemasan untuk menciptakan industri bernilai tambah tinggi, inovatif, dan berkualitas tanpa mengurangi perannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - a. Pembangunan pusat penelitian dan pengembangan industri untuk meningkatkan rantai nilai dan rantai produk industri
 - b. Meningkatkan inovasi produk industri
 - c. Pengembangan teknologi untuk meminimalisir limbah hasil industri serta membangun sarana pengelolaan limbah secara terpadu
 - d. Meningkatkan desain produk dan kemasan sehingga lebih menarik dan sesuai standar.

4. Strategi pembangunan industri untuk mencapai tujuan meningkatnya pemasaran produk industri baik secara lokal, nasional, dan internasional, yaitu:
 - a. Memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran hasil produk industri;
 - b. Pembangunan Mail Kreatif sebagai pusat pemasaran produk industri di Rajapolah secara modern;
 - c. Mengakomodir pelaku industri kecil menengah untuk melakukan ekspor produk sehingga dapat memperpendek rantai pemasaran; dan
 - d. Pelatihan manajemen dan pemasaran produk bagi pelaku industri kecil menengah.
5. Strategi pembangunan industri untuk mencapai tujuan meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan dan industri kerajinan dalam PDRB kabupaten serta meningkatnya tenaga kerja sektor industri juga mengurangi tingkat pengangguran, yaitu:
 - a. Meningkatkan kapasitas produksi dan pemberdayaan kepada pelaku industri dengan pemberian diklat dan pendampingan untuk pelaku industri;
 - b. Pemberian modal usaha bagi pelaku industri kecil – menengah untuk meningkatkan produksinya;
 - c. Kemudahan perijinan investasi industri dengan membuat website perijinan online;
 - d. Pengembangan kapasitas tenaga kerja local berbasis kompetensi melalui Pendidikan vokasi industri dan pembangunan sekolah kejuruan yang berorientasi dengan pengembangan industri pengolahan;
 - e. Pelatihan rutin dan memberikan pendampingan untuk sentra-sentra IKM yang sedang maupun yang berpotensi untuk berkembang;
 - f. Pembuatan SKKNI industri dan pengadaan sertifikasi tenaga kerja sesuai SKKN.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan, berikut tahapan strategi dasar pembangunan industri.

Tabel IV. 1 Pentahapan Pembangunan Industri

No	Tahun	Pentahapan Pembangunan Industri
1	2020-2025	Optimalisasi industri eksisting
2	2026-2030	Perluasan komoditas baru sesuai potensi
3	2031-2035	Perluasan Pasar
4	2036-2040	Evaluasi dan pemantapan pengembangan industry

Tabel IV. 2 Rencana Pembangunan Industri

No	Tahun	Rencana Pembangunan Industri
1	2020-2025	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri eksisting dan industri pengolahan berbasis bahan baku local • Menjamin kontinuitas ketersediaan dan penyaluran bahan baku • Pengembangan SDM yang kompeten • Optimalisasi sentra IKM eksisting • Implementasi inovasi teknologi dalam pengembangan produk • Pemanfaatan teknologi untuk mendukung industri
2	2026-2030	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri baru yang potensial • Penerapan system standarisasi produk • Pengembangan pusat-pusat desain dan pusat inovasi teknologi dalam pengembangan produk • Pengembangan balai latihan kerja untuk meningkatkan kompetensi SDM • Peningkatan sumber pembiayaan
3	2031-2035	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pasar produk di Kabupaten Tasikmalaya • Perluasan kegiatan ekspor • Peningkatan akses hasil industri ke pasar regional • Pengembangan promosi produk ke pasar regional
4	2036-2040	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi perkembangan industri untuk mengembangkan potensi industri lain • Penyusunan rencana pengembangan industri lanjutan

Selain pembangunan industri secara sektoral, perlu adanya pengembangan industri secara perwilayahan dalam bentuk perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, yang didalamnya berupa Kawasan Industri, Kawasan Industri Kecil menengah (KIKM), dan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) by *Design*. Berikut adalah pentahapan dalam perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Tabel IV. 3 Pentahapan Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

No	Tahun	Pentahapan Perwujudan KPI
1	2020-2025	Penetapan dan pembangunan Kawasan peruntukan industri dan infrastruktur
2	2026-2030	Peningkatan pengelolaan Kawasan dan pemasaran lokasi KPI ke investor
3	2031-2035	Modernisasi industri berbasis teknologi
4	2036-2040	Evaluasi dan pemantapan KPI/Kawasan Industri

Tabel IV. 4 Rencana Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

No	Tahun	Rencana Perwujudan KPI
1	2020-2025	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan penetapan KPI • Penyusunan masterplan • Pembangunan KPI berbasis potensi eksisting dan Kawasan industri prioritas • Peningkatan akses menuju KPI dan pengembangan infrastruktur pendukung (Energi, sumber daya air, pengolahan limbah, dll) • Mengarahkan kegiatan industri di lokasi KPI
2	2026-2030	<ul style="list-style-type: none"> • Replikasi dan peningkatan KPI untuk industri baru • Peningkatan pengelolaan Kawasan industri • Pemasaran Kawasan industri dan peningkatan kelembagaan • Peningkatan pengembangan infrastruktur dan akses di lokasi KPI • Pengebangan infrastruktur dan utilitas pendukung di lokasi KPI
3	2031-2035	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Kawasan industri berbasis teknologi • Peningkatan teknologi pendukung menunjang infrastruktur pengolahan limbah dan utilitas pendukung lain • Peningkatan kemampuan SDM
4	2036-2040	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kebutuhan KPI baru (KI/KIKM/SIKM) • Pemantapan pengembangan industri dan kelembagaan

B. Program Pengembangan Industri

1. Penetapan, Sasaran, dan Program Pengembangan Industri Unggulan RIPIN 2015-2035 yang kemudian dijabarkan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 10 jenis industri unggulan yang menjadi prioritas pembangunan. Sepuluh industri unggulan tersebut adalah:
 - a. Industri Pangan;
 - b. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
 - c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
 - d. Industri Alat Transportasi;
 - e. Industri Elektronika dan Telematika/ICT;
 - f. Industri Pembangkit Energi;
 - g. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri;
 - h. Industri Hulu Agro;
 - i. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan
 - j. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Penetapan industri unggulan Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada industri prioritas nasional dan Industri Prioritas Provinsi Jawa Barat dan dilakukan dengan memperhatikan kompetensi inti industri yang dimiliki atau akan dikembangkan oleh Kabupaten Tasikmalaya. Industri unggulan kabupaten ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kesiapan

teknologi, kesiapan infrastruktur dan jaringan rantai pasok, kontribusi (tangible maupun yang intangible), serta kesiapan regulasi dan pembiayaan. Terdapat 3 industri unggulan berdasarkan jenis industri, dan 2 jenis industri baru yang akan tumbuh dengan melihat sumber daya yang ada dan berkembang di Kabupaten Tasikmalaya:

- Industri unggulan berdasarkan jenis industri:
 - a. Industri Pangan;
 - b. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka; dan
 - c. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam.
- Industri Unggulan berdasarkan jenis industri baru yang akan tumbuh:
 - a. Industri Elektronika dan Telematika/ICT; dan
 - b. Industri Barang Modal, Komponen , Bahan Penolong, dan Jasa Industri.

Tabel IV. 5 Industri Unggulan Berdasarkan Jenis Industri

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI	LOKASI
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Minyak Kelapa	Cineam
		Industri tahu dan tempe	Singaparna, Sukarame, Bantarkalong, Ciawi, Cineam, Karangnunggal, Rajapolah, Pagerageung, Leuwisari, Cikatomas, Sukaratu, Manonjaya, Taraju
		Industri Pengolahan Manggis	Puspahiang, Mangunreja
		Industri gula semut, gula aren, dan gula kelapa	Singaparna, Cineam, Cigalontang, Kadipaten, Culamega, Sodonghilir, Taraju, Salawu, Ciawi, Karangjaya, Salopa, Pagerrageung, Pancatengah, Cikatomas, Leuwisari, Padakembang, Cipatujah, Cibalong, Cisayong
		Industri makanan ringan	Singaparna; Leuwisari, Cineam, Manonjaya, Ciawi, Pageurageung, Cisayong, Salawu, Cipatujah, Taraju, Karangjaya, Salopa, Jatiwaras, Pancatengah, Cikatomas, Padakembang, Sodonghilir, Culamega, Kadipaten, Cikalong, Bantarkalong, Sukarame, Sukaratu
		Industri Pengolahan Tembakau	Bojonggambir, Taraju, Mangunreja, Singaparna, Leuwisari, Cigalontang, Singaparna, Sukarame, Sariwangi, Cisayong, Rajapolah, Manonjaya
		Industri Teh Hijau	Taraju, Sodonghilir, Bojonggambir, Cigalontang

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI	LOKASI
2.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil	Cisayong, Rajapolah
		Industri bordir	Cineam, Manonjaya, Salopa, Jatiwaras, Karangnunggal, Cikalong, Cikatomas, Cisayong, Leuwisari, Padakembang, Singaparna, Sariwangi, Tanjungjaya, Sukaraja, Rajapolah, Bantarkalong, Sodonghilir, Cipatujah, Bojongasih, Puspahiang, Sukaratu, Pancatengah, Taraju, Culamega, Sukahening dan, Salawu.
		Industri Rajutan	Sukaresik
		Industri Tas	Rajapolah
		Industri konveksi	Sukaratu, Manonjaya, Cibalong, Cineam dan, Salawu
		Industri Sapu Ijuk	Karangjaya, Leuwisari, Padakembang, Cineam
		Industri Batik Tulis	Sukaraja
		Industri Topi dan Jaket	Cisayong.
		industri kerajinan dan anyaman mendong	Cineam, Karangjaya, Gunung Tanjung, Salopa, Jatiwaras Sukahening, Manonjaya dan, Cikatomas.
		industri kerajinan dan anyaman pandan	Rajapolah, Jamanis
		industri lampit rumbia	Cigalontang dan Tanjungjaya.
		3.	Industri Logam Dasar dan Bukan Logam
Industri Bahan Galian Non Logam (Bentonit, Zeolit, dll)	Bantarkalong, Cikalong dan Kecamatan Karangnunggal		
Industri Emas Perhiasan	Rajapolah		
Industri Barang dari Semen	Cisayong, Singaparna, Mangunreja		
pembuatan paving block	Cisayong		
Industri batu bata merah	Manonjaya, Karangjaya, Cisayong, Singaparna, Cikalong,		

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI	LOKASI
			Pagerageung, Tanjungjaya, Sukaraja, Cipatujah, Karangnunggal, Pancatengah, Parungponteng, Sukaresik
		Industri kapur	Cikalong, Pancatengah, Sukaraja, Cibalong.
		industri batu onix	Parungponteng dan Karangnunggal.
		industri genteng	Pancatengah, Cikatomas , Cipatujah, Parungponteng.

Tabel IV. 6 Industri Unggulan Berdasarkan Jenis Industri Baru Yang Akan Tumbuh

NO.	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI	LOKASI
1.	Industri Elektronika dan Telematika/ICT	Industri Perfilman, Iklan, Animasi	Ciawi
		Aplikasi Komputer dan Smartphone	Ciawi
2.	Industri Barang Modal, Komponen , Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Kemasan (Basis Karton dan Plastik)	Ciawi
		Zat Pewarna Tekstil	Ciawi

Adapun program dan kegiatan bagi setiap industri unggulan dijabarkan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel IV. 7 Program Pengembangan Industri Pangan

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1.	Inventarisasi dan pemetaan potensi industri pengolahan pangan			Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, BPS		√						
2.	Mendayagunakan potensi sumberdaya lokal sebagai bahan baku industri pengolahan pangan: industri pengolahan manggis Industri teh hijau Industri gula Industri pengolahan minyak nabati (minyak kelapa) Industri Tahu dan Tempe Industri Makanan Ringan Industri pengolahan tembakau	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Perkebunan, Dinas terkait Pangan dan Peternakan, Dinas terkait Pertanian,	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan, Dinas terkait pertanian dan pangan,		√	√	√	√	√	√	√
3.	Mengupayakan ketersediaan bahan baku industri pengolahan manggis Industri teh hijau Industri gula Industri pengolahan minyak nabati (minyak kelapa) Industri Tahu dan Tempe Industri Makanan Ringan Industri Pengolahan tembakau	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Perkebunan, Dinas terkait Pangan dan Peternakan, Dinas terkait Pertanian, Dinas terkait Bina Marga	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan, Dinas terkait pertanian dan pangan, Dinas terkait Bina Marga		√	√	√	√	√	√	√

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
4.	Mengupayakan ketersediaan dan penyaluran bahan baku industri pangan industri pengolahan manggis Industri teh hijau Industri gula Industri pengolahan minyak nabati (minyak kelapa) Industri Tahu dan Tempe Industri Makanan Ringan Industri Pengolahan Tembakau	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Perkebunan, Dinas terkait Pangan dan Peternakan, Dinas terkait Pertanian, Dinas terkait Bina Marga	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan, Dinas terkait pertanian dan pangan, Dinas terkait Bina Marga		√	√	√	√	√	√	√
5.	Membangun kerjasama dengan lembaga litbang & perguruan tinggi untuk meningkatkan implementasi inovasi teknologi industri pangan	Kementrian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan	Perguruan Tinggi, Balai Litbang		√					
6.	Menyiapkan SDM berkompeten di bidang industri pangan melalui diklat dan pendampingan serta berkoordinasi dengan lembaga pendidikan terkait;		Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Ketenagakerjaan	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja	Perguruan Tinggi dan Sekolah Vokasi		√	√	√	√	√	√
7.	Menfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;		Dinas terkait Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas terkait Penanaman Modal	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan, Dinas terkait pertanian dan Pangan			√	√	√	√		

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
8.	Memantapkan zonasi/ kawasan peruntukan industri untuk industri pangan	Kementrian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan		√						
9.	Mengupayakan promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar Kabupaten Tasikmalaya		Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan			√					
10.	Mendorong tumbuhnya Sentra IKM pangan di Kabupaten Tasikmalaya		Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan		√	√	√	√	√	√	√

Tabel IV. 8 Program Pengembangan Industri Tekstil, dan Aneka (Tekstil)

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1.	Inventarisasi dan pemetaan potensi industri tekstil dan aneka			Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, BPS		√						
2.	Mengarahkan industri tekstil dan aneka baru di rencana kawasan industri Ciawi-Kadipaten atau Cipatujah			Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Tata Ruang			√					
3.	Mendukung pengembangan Industri tekstil dan aneka eksisting dengan Memfasilitasi peningkatan Kemampuan industri untuk perluasan pasar global: <ul style="list-style-type: none"> - Industri Tekstil - Industri Bordir - Industri Rajutan - Industri Tas - Industri Sapu Ijuk - Industri Batik Tulis - Industri Topi dan Jaket - Industri kerajinan dan anyaman mendong - Industri kerajinan dan anyaman pandan - industri lampit rumbia - industri kerajinan dan anyaman bambu industri mebeul/furniture	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan				√				√

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
	kayu											
4.	Penyusunan standar minimal pembangunan industri tekstil yang ramah lingkungan	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan			√					
5.	Mendukung pembangunan industri tekstil dan manufaktur baru yang ramah lingkungan	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan		√						
6.	Mengembangkan kompetensi kerja SDM industri tekstil sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)		Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja	Perguruan Tinggi dan Sekolah Vokasi		√					
7.	Memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri bordir, konveksi, dan batik tulis	Kementrian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan				√				
8.	Mendukung kebijakan sistem agunan untuk pembiayaan industri;		Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Dinas terkait Penanaman	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan				√				

Adapun program dan kegiatan bagi setiap industri unggulan berdasarkan jenis industri baru yang akan tumbuh dijabarkan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel IV. 10 Program Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika/ICT

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1.	Inventarisasi dan pemetaan potensi Industri Elektronika dan Telematika/ICT			Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, BPS		√						
2	Mengarahkan Industri Elektronika dan Telematika/ICT di rencana kawasan industri Ciawi-Kadipaten			Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, DPMPPTSP, Dinas Tata Ruang			√					
3.	Mendukung peningkatan Industri Elektroni dan Telematika/ICT	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan		Perguruan Tinggi			√				
4.	Menyiapkan SDM lokal yang kompeten melalui kegiatan diklat industri;	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan			√	√	√	√	√	√
5.	Menerapkan SKKNI bidang Industri Elektronika dan Telematika/ICT	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan			√					

Tabel IV. 11 Program Pengembangan Industri Barang Modal, Komponen , Bahan Penolong, dan Jasa Industri

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1.	Inventarisasi dan pemetaan potensi Industri Barang Modal, Komponen , Bahan Penolong, dan Jasa Industri			Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, BPS		√						
2	Mengarahkan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri di rencana kawasan industri Ciawi-Kadipaten dan Cipatujah			Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Tata Ruang		√						
3.	Mendukung peningkatan Industri Elektronika dan Telematika/ICT	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan		Perguruan Tinggi			√				
4.	Menyiapkan SDM lokal yang kompeten melalui kegiatan diklat industri;	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan			√	√	√	√	√	√
5.	Menerapkan SKKNI bidang Industri Elektronika dan Telematika/ICT	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan	Dinas terkait UKM Perindustrian Perdagangan			√					

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan. Lokasi KPI ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah). Lahan pada KPI digunakan untuk membangun baik Kawasan Industri, Sentra Industri Kecil Menengah, Kawasan Industri Kecil Menengah, dan lokasi industri yang belum/tidak memiliki kawasan industri, atau telah memiliki kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis.

Kawasan industri adalah lokasi pemusatan industri yang didalamnya dapat berupa berbagai jenis industri. Pembangunan kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi.

Sentra Industri Kecil Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah. SIKM yang dimaksud dalam konsep perwilayahan industri ini adalah SIKM by Design, yaitu SIKM yang dibuat dengan mengintegrasikan lokasinya dengan kawasan wisata, atau diintegrasikan dengan pusat promosi IKM.

Perwilayahan industri berbentuk KIKM merupakan pemusatan industri menengah dan/atau industri kecil di satu lokasi namun tidak terpaku pada produk/bahan baku sejenis (variasi jenis industri).

Industri di luar perwilayahan industri yaitu industri dengan tidak dipusatkan di suatu tempat dan produksinya bercampur dengan permukiman, dan tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

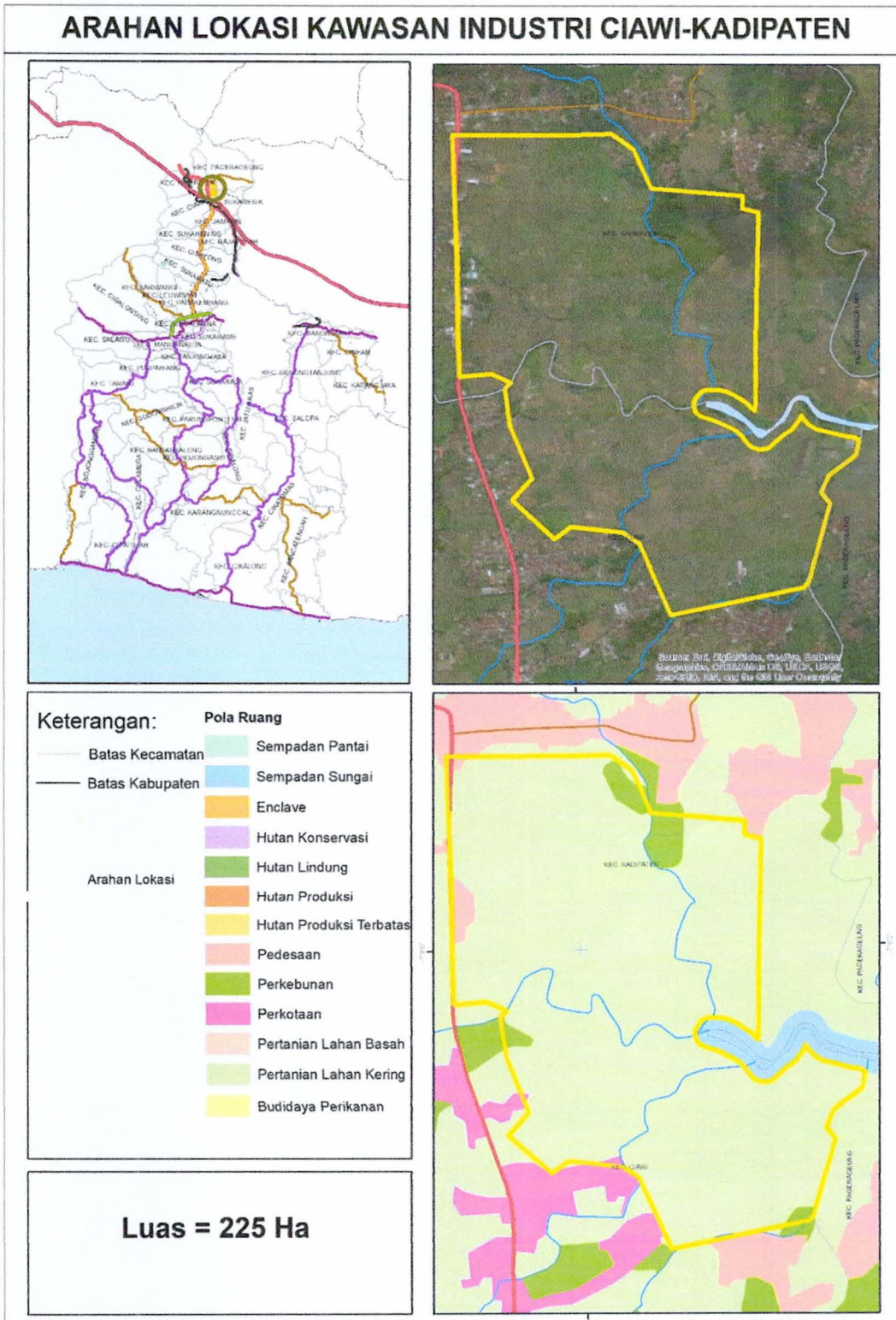
Tabel IV. 12 Arahannya Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

No	Lokasi	Bentuk Lokasi Pengembangan KPI	Jenis Industri
1	Ciawi-Kadipaten	Kawasan Industri Luas = 225 Ha	Industri Kreatif, industri manufaktur, industri benang, konveksi (pakaian jadi)
2	Cipatujah	Kawasan Industri Luas = 102 Ha	Industri Kreatif, industri manufaktur, industri pengolahan tambang, industri pengolahan bahan konstruksi

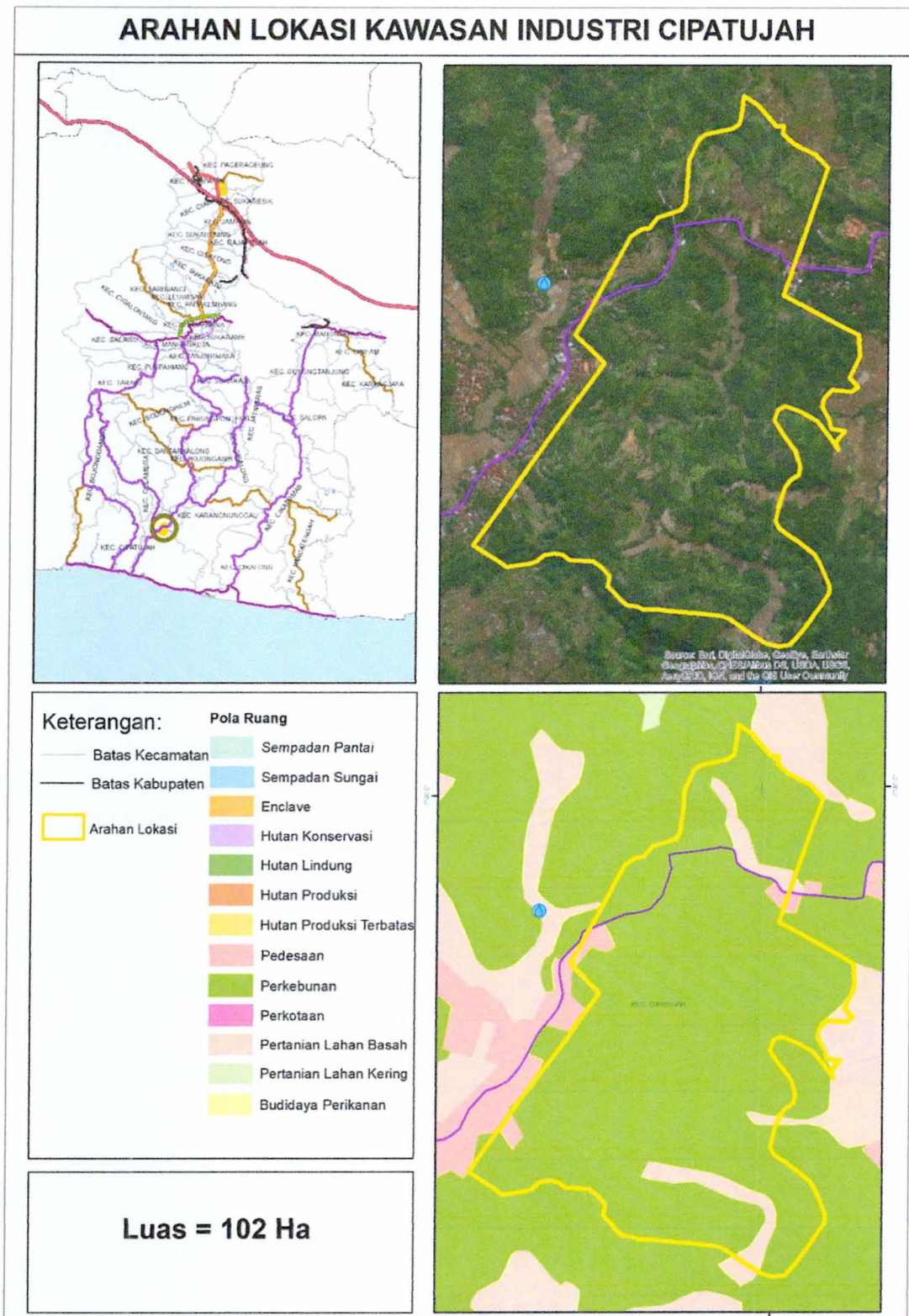
No	Lokasi	Bentuk Lokasi Pengembangan KPI	Jenis Industri
3	Salawu	SIKM by Design Berbasis Wisata Luas = 2,8 Ha	industri kecil agro hasil perkebunan (misal olahan manggis, alpukat, durian, dll) serta sentra industri kerajinan bambu. Pusat promosi dan pemasaran produk serta tujuan wisata baru
4	Cineam	Kawasan Industri Kecil-Menengah Luas = 65 Ha	aneka industri, termasuk industri olahan makanan, pengolahan logam, konveksi, dan bordir
5	Cikalong	Kawasan Industri Kecil-Menengah Luas = 48 Ha	Pengolahan hasil tambang, aneka industri kerajinan
6	Manonjaya	Kawasan Industri Kecil-Menengah Luas = 72 Ha	Industri agro (pengolahan hasil pertanian), pengolahan tembakau, kerajinan golok, konveksi, anyaman mendong, olahan makanan, bahan konstruksi, border

- a. Kawasan industri Ciawi – Kadipaten, dan Kawasan Industri Cipatujah
- Lokasi yang diarahkan untuk pengembangan kawasan industri adalah lokasi yang memiliki satu hamparan yang luas dan memiliki infrastruktur yang sudah memadai, dan didukung pula dengan infrastruktur lain di wilayah sekitarnya, atau terdapat rencana pengembangan infrastruktur strategis. Lokasi yang diarahkan untuk kawasan industri tidak perlu memiliki potensi industri yang cukup besar, karena industri dapat bersifat *foot loose*/industri yang tidak mendekati bahan baku, atau diperuntukkan sebagai industri baru untuk mengakomodir investor yang ingin menanamkan modal untuk industri.

Gambar A.1. Lokasi Kawasan Industri Ciawi-Kadipaten



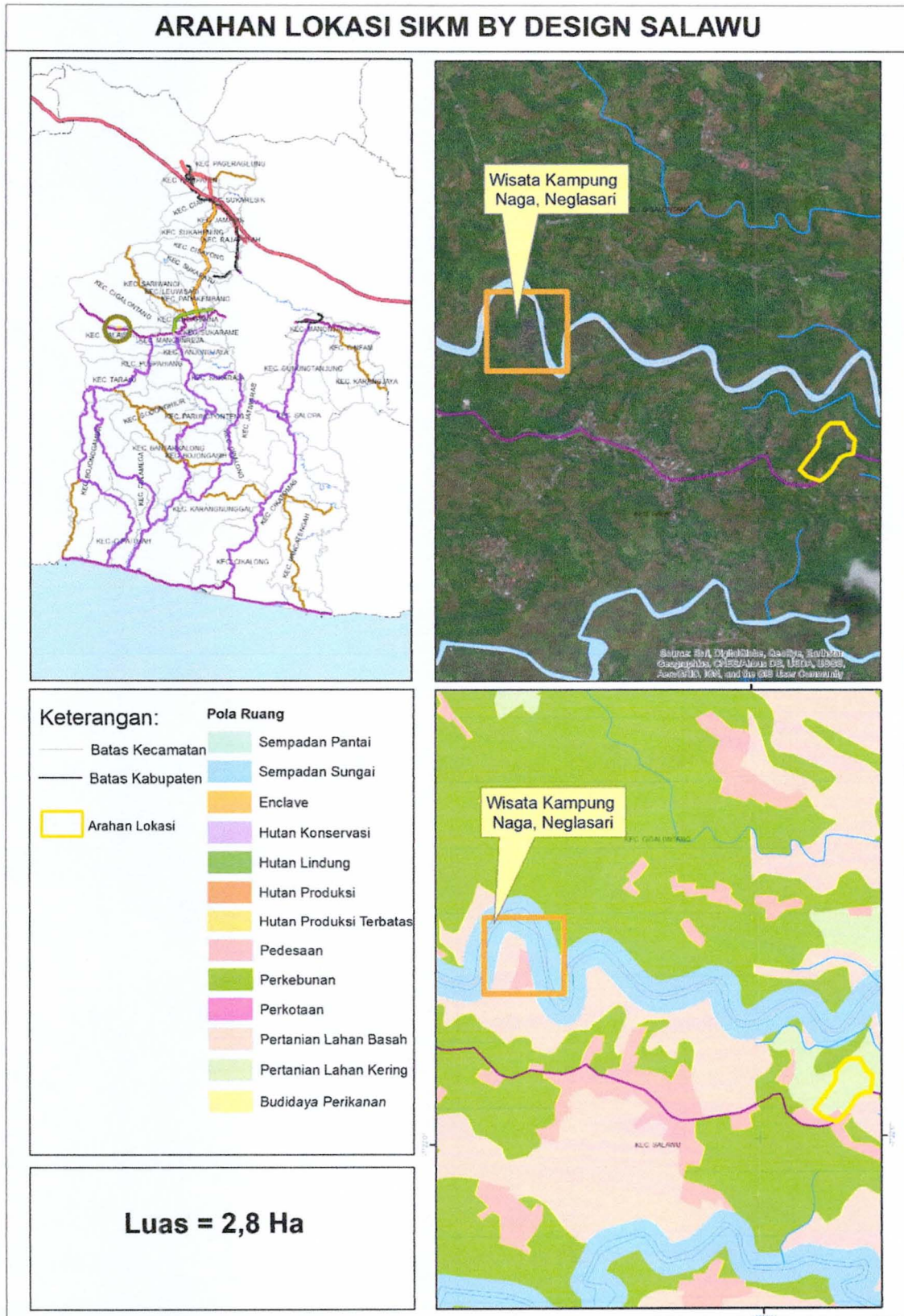
Gambar A.2. Lokasi Kawasan Industri Cipatujah



b. Sentra Industri Kecil Menengah *by design*

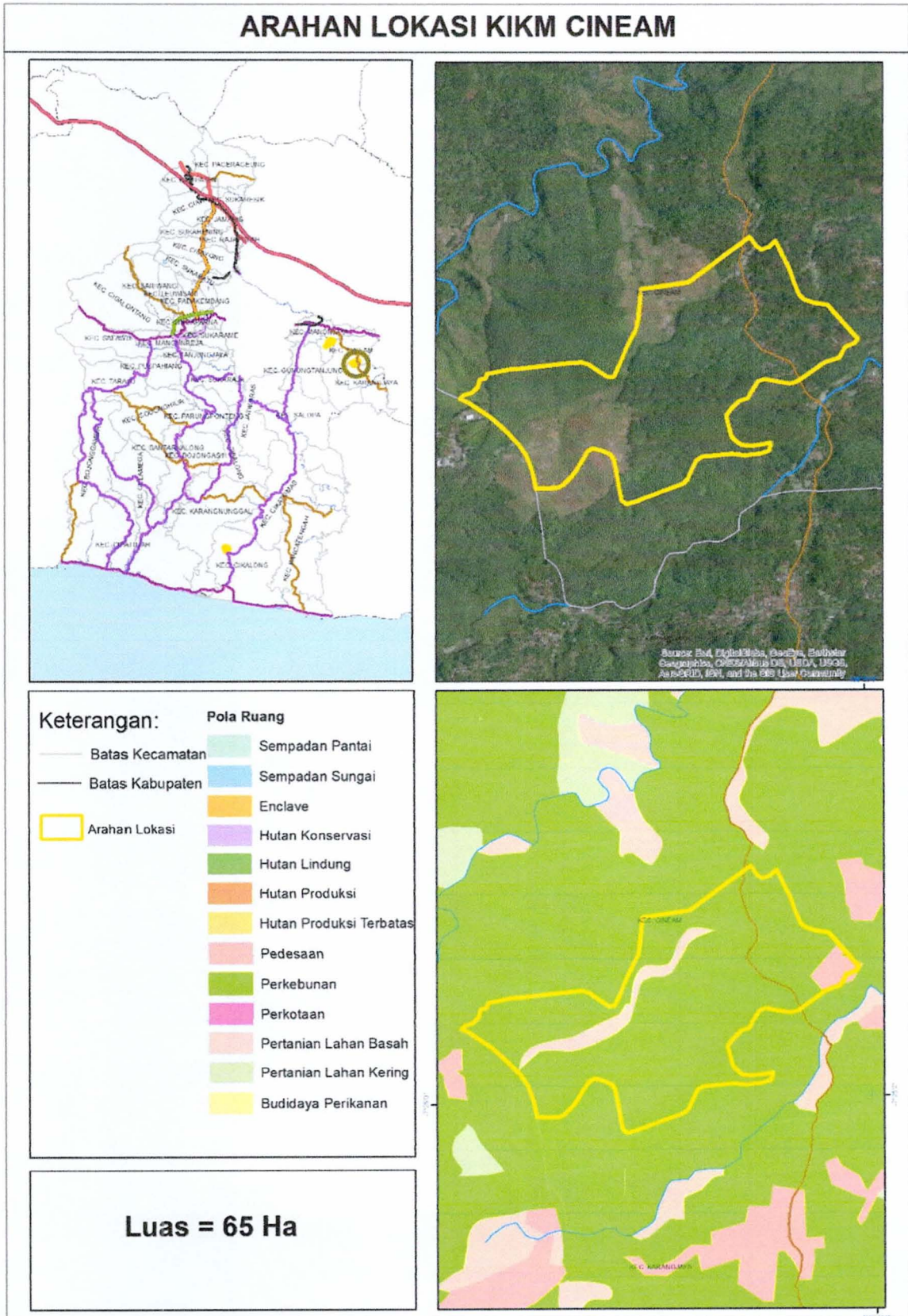
Lokasi yang diarahkan menjadi SIKM *by Design* yaitu untuk mengakomodir potensi sentra industri yang unggul di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Salawu memiliki potensi industri yang cukup besar untuk dijadikan SIKM *by Design*. SIKM ini ini dibuat dengan mengintegrasikan lokasinya dengan kawasan wisata kampung naga di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu.

Gambar B. Lokasi Sentra Industri Kecil Menengah Salawu

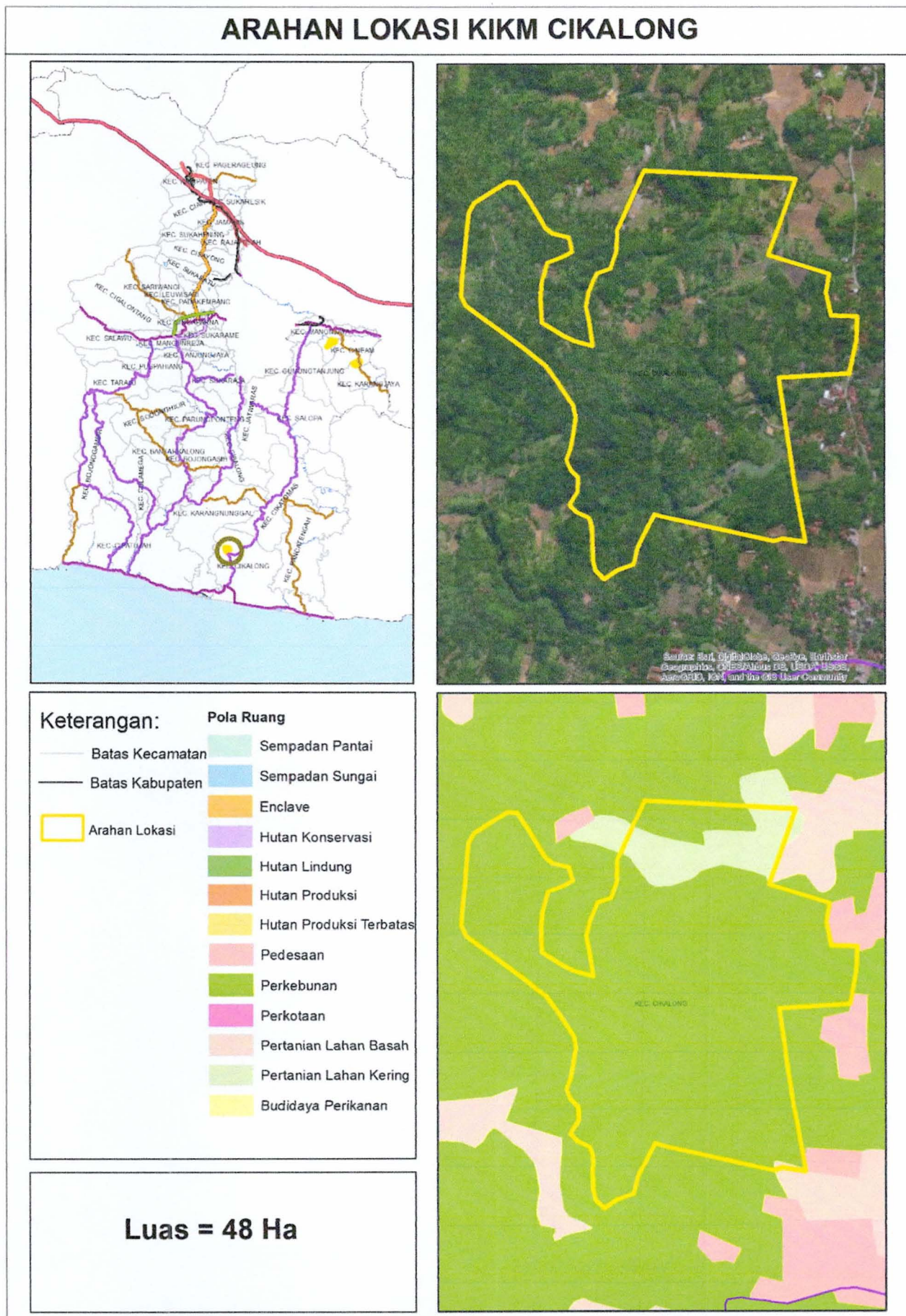


- c. Lokasi Kawasan Industri Industri Kecil Menengah (KIKM)
 Lokasi yang diarahkan sebagai KIKM adalah lokasi yang memiliki variasi jenis industri kecil menengah yang beragam, sehingga kedepannya pengembangan industri diharapkan dapat terpusat. KIKM diarahkan di kecamatan Cicalong, Cineam, dan Manonjaya.

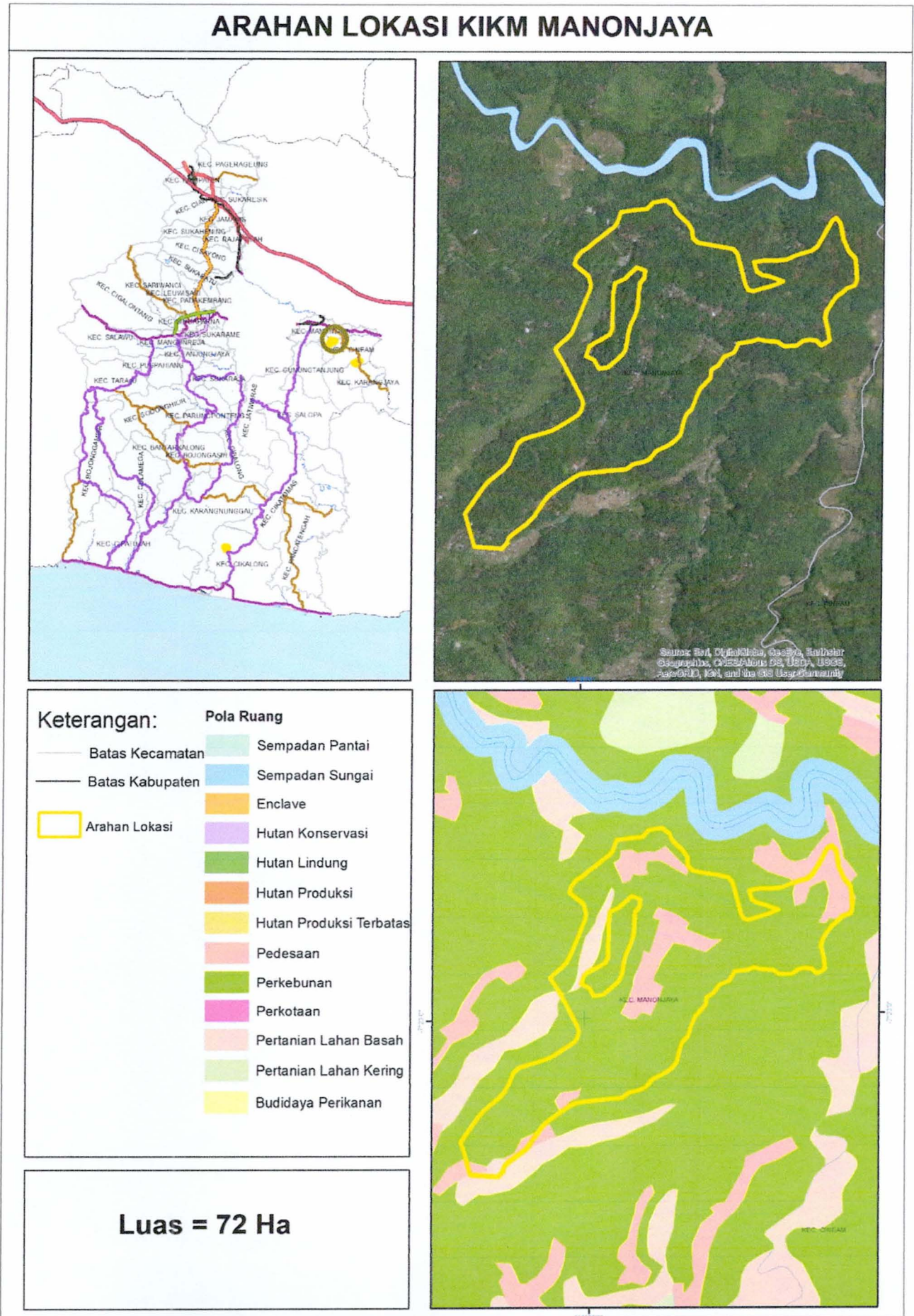
Gambar C.1. Lokasi KIKM Cineam



Gambar C.2. Lokasi KIKM Cikalong



Gambar C.3 Lokasi KIKM Manonjaya



- d. Pengembangan Industri Kecil diluar perwilayahan industri
 Industri yang dapat berada di luar kawasan industri salah satunya adalah industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas. Mengingat besarnya potensi industri kecil di Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan bercampur dengan pemukiman warga, maka hal ini perlu diakomodir. Hal ini terbatas untuk industri eksisting saja, sedangkan untuk pengembangan jenis industri baru harus diakomodir dalam perwilayahan industrinya. Berikut adalah arahan pengembangan industri yang dapat dikembangkan bercampur dengan pemukiman.

Tabel D, Pengembangan Industri Kecil Diluar Perwilayahan Industri

No	KECAMATAN	JENIS INDUSTRI KECIL
1	Bantarkalong	Olahan Makanan - (Tempe, Tahu), Bordir
2	Bojongasih	Meubel, Anyaman Bambu, Bordir
3	Bojonggambir	Anyaman Bambu, Bordir, Olahan Tembakau
4	Ciawi	Olahan Makanan - (Gula Semut, Makanan Ringan, Gula Aren, Tempe, Tahu), Anyaman Bambu
5	Cibalong	Konveksi, Olahan Makanan (Dodol Wajit, Gula Aren, Sale Pisang), Bahan Konstruksi - Kapur, Anyaman Bambu
6	Cigalontang	Olahan Makanan - (Gula Semut, Gula Aren), Anyaman Bambu, Lampit Rumbia, Olahan Tembakau
7	Cikalong	Anyaman Pandan, Olahan Makanan (Gula Kelapa, Opak Ketan, Gulampo), Bahan Konstruksi (Kapur, Bata Merah), Bordir
8	Cikatomas	Peng. Logam - Golok, Olahan Makanan (Gula Aren, Tempe, Tahu), Bahan Konstruksi - Genteng, Anyaman Bambu, Bordir
9	Cineam	Minyak Kelapa, Sapu Ijuk, Konveksi, Meubel, Anyaman Mendong, Olahan Makanan (Makanan Ringan, Dodol Salak, Keripik, Gula Aren, Gula Semut, Tempe, Opak Ketan), Bordir
10	Cipatujah	Meubel, Anyaman Pandan, Olahan Makanan (Keripik, Gula Aren, Gula Kelapa, Sale Pisang), Bahan Konstruksi (Bata Merah, Genteng), Bordir
11	Cisayong	Tas, Meubel, Barang dari Semen, Anyaman Bambu, Olahan Makanan (Makanan Ringan, Gula Aren, Tahu), Bahan Konstruksi (Bata Merah), Bordir, Olahan Tembakau
12	Culamega	Olahan Makanan (Gula Aren, Gula Semut, Gula Kelapa), Bordir
13	Gunung Tanjung	Anyaman Mendong
14	Jamanis	Meubel, Anyaman Pandan, Olahan Makanan (Makanan Ringan), Anyaman Bambu
15	Jatiwaras	Anyaman Mendong, Olahan Makanan (Gula Aren, Opak Ketan), Anyaman Bambu, Bordir
16	Kadipaten	Olahan Makanan (Gula Semut)
17	Karangjaya	Olahan Makanan (Makanan Ringan, Gula Aren, Gula Semut, Sale Pisang)

No	KECAMATAN	JENIS INDUSTRI KECIL
18	Karangnunggal	Olahan Makanan (Opak Ketan, Tempe), Bahan Konstruksi (Batu Onix, Bata Merah), Bordir
19	Leuwisari	Sapu Ijuk, Olahan Makanan (Dodol Sirsak, Gula Aren, Tempe, Tahu), Anyaman Bambu, Bordir, Olahan Tembakau
20	Mangunreja	Barang dari Semen, Anyaman Bambu, Olahan Tembakau
21	Manonjaya	Peng. Logam - Golok, Konveksi, Anyaman Mendong, Olahan Makanan (Makanan Ringan, Dodol Salak, Keripik, Sale Pisang, Tahu), Bahan Konstruksi (Bata Merah), Bordir, Olahan Tembakau
22	Padakembang	Sapu Ijuk, Olahan Makanan (Gula Aren), Anyaman Bambu, Bordir
23	Pagerageung	Anyaman Pandan, Olahan Makanan (Makanan Ringan, Gula Aren, Gula Semut, Dodol Susu, Opak Ketan, Tempe, Tahu), Bahan Konstruksi (Bata Merah), Anyaman Bambu
24	Pancatengah	Meubel, Olahan Makanan (Gula Aren, Opak Ketan), Bahan konstruksi (Kapur, Bata Merah, Genteng), Anyaman Bambu, Bordir
25	Parungponteng	Anyaman pandan, Bahan Konstruksi (Batu Onix, Bata Merah), Bordir
26	Puspahiang	Meubel, Anyaman Bambu, Bordir
27	Rajapolah	Peng. Logam (Emas), Kerajinan Pandan, Olahan Makanan (Tempe, Tahu), Bordir, Olahan Tembakau
28	Salawu	Konveksi, Meubel, Olahan Makanan (Makanan Ringan, Gula Aren, Gula Semut, Dodol Susu), Anyaman Bambu, Bordir
29	Salopa	Anyaman Mendong, Olahan Makanan (Gula Aren, Gula Semut, Gula Kelapa), Anyaman Bambu, Bordir
30	Sariwangi	Anyaman Bambu, Bordir, Olahan Tembakau
31	Singaparna	Peng. Logam (Golok), Barang dari Semen, Olahan Makanan (Dodol Sirsak, Keripik, Tempe, Tahu), (Bahan Konstruksi (Bata Merah), Anyaman Bambu, Bordir, Olahan Tembakau
32	Sodonghilir	Olahan Makanan (Gula Aren, Gula Semut), Bordir
33	Sukahening	Anyaman Mendong, Anyaman bambu, Bordir
34	Sukaraja	Batik Tulis, Bahan Konstruksi (Kapur, Bata Merah), Bordir
35	Sukarame	Olahan Makanan (Tempe), Bordir, Olahan Tembakau
36	Sukaratu	Konveksi, Olahan Makanan (Gula Aren, Tempe, Tahu), Anyaman Bambu, Bordir
37	Sukaresik	Rajutan, Bahan Konstruksi (Bata Merah)
38	Tanjungjaya	Olahan Makanan (Tahu), Bahan Konstruksi (Bata Merah), Anyaman Bambu, Bordir, Lampit Rumbia
39	Taraju	Olahan Makanan (Dodol Wajit, Gula Semut, Tahu), Bordir, Olahan Tembakau

Tabel IV. 13 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1.	Identifikasi dan Penetapan lokasi KPI serta deliniasi rencana kawasan industri Ciawi-Kadipaten dan Cipatujah	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas Perindustrian		√						
2	Survei dan pemetaan potensi pembangunan KPI	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian		√						
3	Penyusunan Masterplan Industri di KPI	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian			√					
4	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung KI Ciawi-Kadipaten, KI Cipatujah	Kementerian PUPR, kemenhub	Dinas PU	Dinas PU, terkait infrastruktur	Swasta			√	√	√	√	√
5	Penetapan zonasi KI Ciawi- Kadipaten, KI Cipatujah	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait infrastruktur	Swasta				√			
6	Pemasaran KI Ciawi-Kadipaten, KI Cipatujah		Dinas PM-PTSP	Dinas PM-PTSP	Swasta				√	√	√	√
7	Pembentukan pengelola kawasan industri di KI Ciawi-Kadipaten dan Cipatujah		Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait infrastruktur	Swasta					√		

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
8	Penguatan KPI, dalam hal: • Manajemen Pengawasan • pemodalan & pemasaran • Pemantapan Infrastruktur	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian						√	√	√
9	Melaksanakan diklat dan konsultasi	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Perguruan tinggi, Badan Litbang				√	√	√	√
10	Pembangunan sarana & prasarana pengembangan SDM	Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja	Dinas terkait pengembangan SDM	Dinas terkait perindustrian	Swasta			√				
11	Evaluasi sarana dan prasarana pengembangan SDM	Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja	Dinas terkait pengembangan SDM	Dinas terkait perindustrian								√
12	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi;	Kementerian Ristek Dikti	Dinas terkait penelitian dan teknologi	Dinas terkait perindustrian	Perguruan Tinggi, Badan Litbang				√	√	√	
13	Evaluasi sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi	Kementerian Ristek Dikti	Dinas terkait penelitian dan teknologi	Dinas terkait perindustrian	Perguruan Tinggi, Badan Litbang							√

Tabel IV. 14 Program Pengembangan Kawasan IKM dan Sentra IKM

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1.	Survei dan pemetaan potensi pembangunan KIKM dan sentra IKM		Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait Perindustrian		√						
2.	Penyusunan masterplan dan delineasi lokasi pembangunan KIKM dan sentra IKM by design			Dinas terkait pertanahan dan tata ruang			√					
3.	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung KIKM dan sentra IKM			Dinas terkait infrastruktur	Swasta			√				
4.	Pembangunan KIKM dan sentra IKM			Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait Infrastruktur	Swasta			√				
5.	Pembinaan & pengembangan KIKM dan sentra IKM			Dinas terkait Perindustrian		√	√	√	√	√	√	√
6.	Penguatan KIKM dan sentra IKM, dalam hal: - peralatan produksi dan pengukuran - diklat dan konsultasi - pemodal dan pemasaran			Dinas terkait perindustrian		√	√	√	√	√	√	√
7.	Melaksanakan diklat dan konsultasi			Dinas terkait perindustrian	Perguruan tinggi, Badan litbang	√		√		√	√	√

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Salah satu prasyarat utama tumbuhnya industri adalah adanya dukungan sumber daya industri. Dengan demikian, pembangunan industri tidak bisa terlepas dari pembangunan sumber daya industri, yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan kreativitas, serta pembiayaan.

a. Pembangunan Sumber Daya Alam

Pembangunan sumber daya alam diarahkan pada memastikan ketersediaan bahan baku industri yang berbasis sumber daya alam. Ekstraksi dan penggunaan sumber daya alam yang ada akan dioptimalkan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Sumber daya alam yang belum tersedia di dalam kabupaten dapat diupayakan melalui kerja sama perdagangan dengan daerah lain. Program pembangunan Sumber Daya Alam juga mencakup pengembangan jaringan infrastruktur serta teknologi yang mendukung untuk pendistribusian secara efisien.

b. Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia industri mencakup semua pelaku industri, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk pemilik, pekerja, aparatur, serta konsultan industri.

c. Pengembangan Teknologi

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Tabel IV. 15 Program Pembangunan Sumber Daya Alam

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1	Pemetaan jenis, jumlah, serta lokasi cadangan sumber daya alam		Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas terkait koperasi dan UKM, Dinas terkait pengelolaan sumber daya alam	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait koperasi dan UKM, Dinas terkait pengelolaan sumber daya alam	Asosiasi industri yg mengolah sumber daya alam	√						
2	Penyusunan rencana dan rekomendasi penyediaan dan penyaluran sumber daya alam		Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas terkait koperasi dan UKM, Dinas terkait pengelolaan sumber daya alam	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait koperasi dan UKM, Dinas terkait pengelolaan sumber daya alam			√					
3	Penjalinan kerjasama dengan daerah lain dalam hal penyediaan sumberdaya alam	Kementerian Perindustrian	Dinas perindustrian dan perdagangan	Dinas terkait perindustrian dan Perdagangan			√	√	√	√	√	√
4	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan		Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas terkait koperasi dan UKM, Dinas terkait pengelolaan sumber daya alam	Dinas terkait perindustrian dan perdagangan, Dinas terkait koperasi dan UKM, Dinas terkait pengelolaan sumber daya alam	Asosiasi industri yang mengolah sumber daya alam	√	√	√	√	√	√	√

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
5	Perencanaan & pengembangan jaringan infrastruktur untuk distribusi sumber daya alam		Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas terkait koperasi dan UKM, Dinas terkait pengelolaan sumber daya alam	Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas terkait koperasi dan UKM, Dinas terkait pengelolaan sumber		√						
6	Pengembangan teknologi transportasi dan distribusi sumber daya alam		Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas terkait koperasi dan UKM, Dinas terkait pengelolaan sumber daya alam		Perguruan tinggi, Badan litbang			√				

Tabel IV. 16 Program Pembangunan Sumber Daya Manusia

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1	Pembangunan lembaga pelatihan industri, pendidikan vokasi/ sekolah kejuruan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait ketenagakerjaan	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait ketenagakerjaan	Asosiasi industri, Asosiasi profesi, Perusahaan industri, Perguruan Tinggi		√					
2	Membuat kebijakan mendukung tenaga kerja lokal dengan kebijakan 70% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal	Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait ketenagakerjaan	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait ketenagakerjaan			√					
3	Fasilitasi penyediaan pelatih atau instruktur untuk lembaga pendidikan/akademi komunitas	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait ketenagakerjaan	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait ketenagakerjaan	Asosiasi industri, Asosiasi profesi, Perusahaan industri, Perguruan Tinggi	√	√	√	√	√	√	√
4	Pengembangan tenaga kerja berbasis kompetensi melalui pendidikan vokasi industri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Perguruan tinggi			√	√	√	√	√
5	Pemberian diklat dan pendampingan untuk pelaku industri	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait Ketenagakerjaan	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait ketenagakerjaan	Asosiasi industri	√	√	√	√	√	√	√

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
6	Peningkatan kemampuan IKM dalam bidang desain produk industri		Dinas terkait Perindustrian, Dinas terkait koperasi dan UKM	Dinas terkait Perindustrian, Dinas terkait koperasi dan UKM	Perguruan tinggi	√	√	√	√	√	√	√

Tabel IV. 17 Program Pengembangan Teknologi

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1	Mendukung peningkatan sinergi program kerjasama litbang dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha untuk menghasilkan produk litbang yang aplikatif dan terintegrasi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait litbang	Dinas terkait Perindustrian, Dinas terkait pengembangan teknologi dan komunikasi	Asosiasi industri, Perusahaan industri, Perguruan Tinggi	√	√	√	√	√	√	√
2	Membangun website u/ pemasaran produk, website terpadu penyediaan bahan baku, dan website pengajuan investasi dan perijinan <i>online</i>		Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait litbang	Dinas terkait Perindustrian, Dinas terkait pengembangan teknologi dan komunikasi		√						
3	Mendukung implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait Perindustrian, Dinas pengembangan teknologi dan komunikasi				√				
4	Penumbuhan pusat-pusat inovasi (<i>center of excellence</i>) pada kawasan peruntukan industri dan sentra IKM	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait Perindustrian, Dinas pengembangan teknologi dan komunikasi	Perguruan tinggi			√	√			

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
5	Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait Perindustrian, Badan Ristek		√		√			√	√
6	Mendukung pengembangan teknologi <i>renewable energy</i> yang ramah lingkungan secara berkelanjutan	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait Perindustrian, Badan Ristek	Perguruan tinggi		√	√	√	√	√	√
7	Pembangunan technopark yang berfokus pada pertanian, peternakan, agroferesti, yang berbasis teknologi	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian, Badan Ristek				√				

Tabel 4. 18 Program Pengembangan Inovasi dan Kreativitas

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi		Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait Perindustrian		√	√	√	√	√	√	√
2	Pengembangan sentra pengembangan kreativitas bagi IKM		Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait koperasi dan UKM	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait koperasi dan UKM		√	√	√	√	√	√	√
3	Pemberian pelatihan teknologi dan desain		Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait koperasi dan UKM	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait koperasi dan UKM		√	√	√	√	√	√	√
4	Pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil		Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait koperasi dan UKM	Dinas terkait perindustrian, Dinas terkait koperasi dan UKM		√	√	√	√	√	√	√
5	Pemberian dukungan promosi dan pemasaran produk inovatif	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan	Dinas terkait perindustrian dan perdagangan, Dinas terkait koperasi dan UKM	Dinas terkait perindustrian dan perdagangan, Dinas terkait koperasi dan UKM		√	√	√	√	√	√	√

Tabel 4. 19 Program Pengembangan Pembiayaan

NO	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1	Mendukung pengembangan lembaga pembiayaan industri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Industri perbankan		√	√	√	√	√	√
2	Mendukung peningkatan akses pembiayaan murah bagi IKM	Kementerian Perindustrian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian		√	√	√	√	√	√	√
3	Pengembangan skema dan infrastruktur kredit murah untuk IKM		Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Industri perbankan		√		√		√	√

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sarana dan prasarana industri merupakan sebuah prasyarat bagi industri untuk dapat tumbuh. Hadirnya sarana dan prasarana industri yang memadai dapat meningkatkan daya saing sebuah industri. Secara umum, industri yang didukung dengan sarana prasarana yang baik dapat meningkatkan konsistensi mutu produknya ketika ketersediaan energi terjamin, menurunkan waktu dan ongkos pengiriman ketika tersedianya moda transportasi yang cepat dan handal, dan meningkatkan variasi produk ketika tersedianya akses informasi untuk dapat memahami keinginan pasar. Oleh karenanya penting untuk menyediakan infrastruktur energi, transportasi, dan komunikasi agar industri dapat meningkatkan daya saing.

Berikut merupakan program pengembangan sarana dan prasarana industri:

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel IV. 20 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

No	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Pemangku Kepentingan				Tahun						
			Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1.	Pembangunan jalan tol berupa jalan tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya melalui ruas jalan Provinsi	ruas jalan Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum						√	√			
2.	Pengembangan jalan kolektor primer	<ul style="list-style-type: none"> • ruas jalan Rajapolah – Indihiang; • ruas jalan Cibeureum – Manonjaya; • ruas jalan Manonjaya – Cimaragas; • ruas jalan Urug – Karangnunggal; • ruas jalan Karangnunggal ○ Cipatujah • ruas jalan Salawu – Singaparna; • ruas jalan Singaparna – Mangkubumi; • ruas jalan Cikaengan – Cipatujah; • ruas jalan Cipatujah – Kalapagenep. 	Kementerian Pekerjaan Umum				√	√	√	√	√	√	√
3.	Pengembangan sistem jaringan jalur kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • jalur Manojaya – Awipari; • jalur Rajapolah – Indihiang; dan jalur Ciawi – Rajapolah. 	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan				√				

No	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Pemangku Kepentingan				Tahun						
			Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
4.	Pembangunan pelabuhan Cikalong	Kecamatan Cikalong	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan				√				
5.	Peningkatan akses ke Pelabuhan Cikalong									√			
6.	Pembangunan Pelabuhan khusus Pendukung pengembangan industri pertambangan	jalur Manojaya – Awipari; Kecamatan Cipatujah Kecamatan Cikalong	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan						√		
7.	Pembangunan pangkalan Pendaratan ikan	Kecamatan Cikalong	Kementerian Kelautan	Dinas Terkait Kelautan	Dinas Kelautan		√						
8.	Peningkatan Akses Ke Bandara Wiriadinata di Kota Tasikmalaya		Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum		√	√					

b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Energi

Tabel IV. 21 Program Pengembangan Sumber Daya Energi

No	Indikasi Kegiatan	Lokasi Kecamatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
			Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1	Pembangunan Pembangkit listrik	Kadipaten Cikalong, dan Salopa	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian BUMN	Dinas terkait energi		PLN		√		√			
2	Pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan, Bulk Elpiji (SPPBE)	Jamanis, dan Rajapolah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian BUMN	Dinas terkait energi,		PLN			√				
3	Pembangunan Gardu Induk	Karangnunggal	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian BUMN	Dinas terkait energi,		PLN	√	√	√				
4	Pembangunan gardu distribusi	seluruh kecamatan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian BUMN	Dinas terkait energi,		PLN				√	√	√	√
5	Pengembangan Saluran Tegangan Ekstra Tinggi	Cineam;Manonjaya; Gunungtanjung; Sukaraja;Tanjungjaya; Mangunreja; Salawu; Kadipaten.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian BUMN	Dinas terkait energi,		PLN	√	√	√	√	√	√	√
6	Pengembangan Energi Panas Bumi Karaha Bodas	Kadipaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian BUMN	Dinas terkait energi,		PLN	√	√	√	√	√	√	√
7	Pengembangan Bioenergi Reaktor biogas	Puspahiang; Pancatengah; Cikatomas; Cipatujah; Cikalong; Karangnunggal; Pageurageung; Bantarkalong;Manonjaya; Mangunreja.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian BUMN	Dinas terkait energi,		PLN	√	√	√	√	√	√	√

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

Tabel IV. 22 Program Pengembangan Sumber Daya Air

No	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Pemangku Kepentingan				Tahun						
			Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1.	Pengawasan penggunaan air tanah di kawasan Industri			Dinas terkait perindustrian Dinas terkait pengelolaan sumber daya air	Dinas terkait perindustrian	Badan Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√	√
2.	Pengawasan pengeboran sumur			Dinas terkait perindustrian Dinas terkait pengelolaan sumber daya air	Dinas terkait pengelolaan sumber daya air	Badan Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√	√
3.	Pengembangan Jaringan Air Baku	Sungai Citanduy; Sungai Ciwulan; Sungai Cimedang; Sungai Cipangukusan; Sungai Cipanyarang; Sungai Cilangla.		Dinas terkait perindustrian Dinas terkait pengelolaan sumber daya air Dinas terkait bina Marga	Dinas terkait perindustrian	Badan Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√	√
4.	Pemanfaatan mata air untuk air baku industri	Kecamatan Leuwisari; Kecamatan Sariwangi; Kecamatan Parungponteng; Kecamatan Puspahiangan; Kecamatan Sodonghilir; Kecamatan		Dinas terkait perindustrian Dinas terkait pengelolaan sumber daya air Dinas terkait bina marga	Dinas terkait perindustrian		√	√	√	√	√	√	√

No	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Pemangku Kepentingan				Tahun						
			Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
		Pancatengah; Kecamatan Cikalong; Kecamatan Cipatujah; Kecamatan Bantarkalong; Kecamatan Cisayong; Kecamatan Sukahening; Kecamatan Sukaresik; Pagerageung.											
5.	Pembangunan Waduk	Kecamatan Karangnunggal	Kementerian terkait Pekerjaan Umum				√	√					
6.	pembangunan Bendungan Leuwikeris dan Cikembang	Kecamatan Cineam,	Kementerian terkait Pekerjaan Umum				√	√					
7.	Bendungan Manonjaya dan Bendungan Pasirangin	Kecamatan Manonjaya	Kementerian terkait Pekerjaan Umum						√	√			

d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah

Tabel IV. 23 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah

No	Indikasi Kegiatan	Lokasi Kecamatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
			Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1.	Optimalisasi tempat pemrosesan akhir Cinangsi	Mangunreja	Kementerian terkait Pekerjaan Umum	Dinas Terkait Permukiman	Dinas terkait Perkerjaan Umum	Badan Lingkungan Hidup			√				
2.	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional	Mangunreja	Kementerian terkait Pekerjaan Umum	Dinas Terkait Permukiman	Dinas PUPR	Badan Lingkungan Hidup	√						
3.	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS)	Manonjaya Pagerageung Karangnunggal	Kementerian terkait Pekerjaan Umum	Dinas Terkait Permukiman	Dinas PUPR	Badan Lingkungan Hidup	√						
4.	Pengelolaan Limbah Industri dengan Instalasi pengolahan air limbah terpadu	Singaparna; Cipatujah; Bantarkalong; Cikatomas; Ciawi; Manonjaya; Taraju; Cineam.	Kementerian terkait Pekerjaan Umum	Dinas Terkait Permukiman	Dinas PUPR	Badan Lingkungan Hidup					√		
5.	Pengelolaan limbah B3	Singaparna; Cipatujah; Bantarkalong; Cikatomas; Ciawi; Manonjaya; Karangnunggal; Rajapolah; Taraju; dan Cineam.	Kementerian terkait Pekerjaan Umum	Dinas Terkait Permukiman	Dinas PUPR	Badan Lingkungan Hidup					√		

e. Pengembangan Sistem Informasi Industri

Tabel IV. 23 Program Pengembangan Sistem Informasi Industri

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025- 2029	2030- 2040
1.	Pendataan industri		Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Asosiasi Industri	√	√	√	√	√	√	√
2.	Pelaporan data industri dari kabupaten menuju daerah	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian		√	√	√	√	√	√	√
3.	Mendukung integrasi informasi daerah dan kabupaten	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian		√	√	√	√	√	√	√

f. Pengembangan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Tabel IV. 24 Program Pengembangan Badan Standarisasi Nasional

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025- 2029	2030- 2040
1.	Mendukung optimalisasi dan pengembangan lab uji	Badan Standarisasi Nasional	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Asosiasi Industri	√	√	√	√	√	√	√
2.	Mendukung optimalisasi dan pengembangan lembaga sertifikasi	Badan Standarisasi Nasional	Dinas terkait perindustrian			√	√	√	√	√	√	√
3.	Mendukung optimalisasi dan pengembangan lembaga penilaian	Badan Standarisasi Nasional	Dinas terkait perindustrian			√	√	√	√	√	√	√

5. Pemberdayaan Industri

a. Pengembangan Pemberdayaan Standardisasi Industri

Pengembangan Standardisasi industri pada dasarnya adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Pengembangan Standardisasi meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC).

Sasaran pengembangan standardisasi industri adalah terlaksananya penyusunan dan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC sesuai kebutuhan industri prioritas dan tersedianya infrastruktur standardisasi meliputi pembentukan lembaga sertifikasi produk, penyediaan laboratorium penguji, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian, serta penyediaan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Industri (PPNS-I) untuk pelaksanaan pengawasan penerapan SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara.

Tabel IV. 25 Program Pengembangan Pemberdayaan Standarisasi Industri

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1	Mendukung penguasaan dan Peningkatan Kompetensi auditor, asesors petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI, dan PPNS di lembaga terkait di Kabupaten Tasikmalaya	Badan Standarisasi Nasional Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi	√	√	√	√	√	√	√

b. Pengembangan Pemberdayaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Pengembangan Pemberdayaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk Dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat, memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Tabel IV. 26 Program Pengembangan Pemberdayaan P3DN

	Indikasi Kegiatan	Pemangku kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1	Mendorong peningkatan Penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tasikmalaya	Kementerian Perindustrian, LKPP	Pemerintah Daerah Propinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Lembaga Peneleitian, perguruan tinggi	√	√	√	√	√	√	√
2	Melakukan promosi kecintaan dan penggunaan produk dalam negeri kepada masyarakat	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian	Dinas terkait perindustrian		√	√	√	√	√	√	√
3	Evaluasi dampak kebijakan P3DN bagi peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri	-	Dinasterkait perindustrian	Dinasterkait perindustrian	-	√	√	√	√	√	√	√

c. Pengembangan Pemberdayaan Kerjasama Internasional dalam Bidang Industri

Pengembangan Pemberdayaan Kerjasama internasional bidang industri dapat dilakukan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan

tujuan untuk meningkatkan akses pasar produk industri Kabupaten Tasikmalaya ke pasar global; membuka akses sumber daya industri internasional yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri Kabupaten Tasikmalaya; meningkatkan integrasi industri Kabupaten Tasikmalaya ke dalam jaringan rantai suplai global melalui konsep Industry 4.0, dan; meningkatkan investasi global untuk mendukung pengembangan industri di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel IV. 27 Program Pengembangan Pemberdayaan Kerjasama Internasional Bidang Industri

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1	Peningkatan akses pasar Internasional produk industri Kabupaten Tasikmalaya melalui keikutsertaan dalam promosi internasional dan membangun jaringan kerjasama	Kementerian Perindustrian	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Asosiasi Industri	√	√	√	√	√	√	√
2	Menggali potensi sumber daya industri (bahan baku, teknologi, inovasi dan pembiayaan) global yang dibutuhkan oleh industri di Kabupaten Tasikmalaya	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinasterkait perindustrian		√	√	√	√	√	√	√
3	Menjalin kerjasama global untuk Peningkatan kompetensi SDM industri bertaraf internasional dalam bentuk pelatihan dan pendidikan lanjut	Kementerian Perindustrian	Dinasterkait perindustrian	Dinasterkait perindustrian	Perguruan Tinggi	√	√	√	√	√	√	√
4	Menggali potensi pengembangan proyek putar kunci secara selektif yang diperlukan oleh industri Kabupaten	Kementerian Perindustrian	Dinasterkait perindustrian	Dinasterkait perindustrian	-	√	√	√	√	√	√	√

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
	Tasikmalaya dan Nasional											
5	Memetakan dan meningkatkan kemampuan (<i>quality, cost, delivery</i>) industri komponen dan jasa industri di Kabupaten Tasikmalaya agar mampu berkontribusi pada jaringan rantai pasok global	Kementerian Perindustrian	Dinasterkait perindustrian	Dinasterkait perindustrian	Asosiasi Industri	√	√	√	√	√	√	√
6	Mendorong lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Kabupaten Tasikmalaya untuk ikut aktif mengembangkan konsep kolaborasi industri global (Industri 4.0)	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Perguruan Tinggi	√	√	√	√	√	√	√
7	Mendukung promosi investasi global untuk pengembangan industri di Kabupaten Tasikmalaya	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Asosiasi Industri	√	√	√	√	√	√	√

d. Pengembangan Pemberdayaan IKM

Program pengembangan dan pemberdayaan IKM secara umum terdapat pada program yang disusun terkait industri unggulan, perwilayahan industri, sumberdaya industri, sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri yang tidak dinyatakan secara spesifik untuk industri besar. Pemberdayaan IKM dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel IV. 28 Program Pengembangan Pemberdayaan IKM

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1	Pemetaan sumber bahan baku yang dapat dimanfaatkan oleh IKM	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	-	√	√			√		
2	Dukungan teknis, design, pengujian, informasi pasar, teknologi, inovasi, dan pembiayaan IKM melalui lembaga terkait di Kabupaten Tasikmalaya	Kementerian Perindustrian	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten	Lembaga Terkait	√	√	√	√	√	√	√
3	Dukungan perlindungan dan pengurusan hak kekayaan intelektual IKM	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	-	√	√	√	√	√	√	√
4	Dukungan dan fasilitasi promosi dan pemasaran produk IKM unggulan Kabupaten Tasikmalaya	Kementerian Perindustrian	Dinasterkait perindustrian	Dinasterkait perindustrian	-	√	√	√	√	√	√	√
5	Peningkatan kemampuan Kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM	Kementerian Perindustrian	Dinasterkait perindustrian	Dinasterkait perindustrian	-	√	√	√	√	√	√	√
6	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM di IKM Kabupaten Tasikmalaya	Kementerian Perindustrian	Dinasterkait perindustrian	Dinasterkait perindustrian	-	√	√	√	√	√	√	√
7	Dukungan fasilitas pengolahan limbah bagi IKM yang berpotensi mencemari lingkungan	Kementerian Perindustrian	Dinasterkait perindustrian	Dinasterkait perindustrian	-	√	√	√	√	√	√	√

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
8	Mendorong kerjasama kemitraan antara IKM Kabupaten Tasikmalaya dengan industri besar lokal, nasional atau internasional	Kementerian Perindustrian	Dinasterkait perindustrian	Dinasterkait perindustrian	-	√	√	√	√	√	√	√
9	Pengembangan inkubator / <i>technopark</i> untuk penumbuhan wirausaha baru: - Pada level kecamatan: berbasis kerajinan - Pada level perguruan tinggi: berbasis <i>high-tech</i>	Kementerian Perindustrian	Dinasterkait perindustrian	Dinasterkait perindustrian	Perguruan Tinggi	√	√	√	√	√	√	√

e. Pengembangan Pemberdayaan Industri Hijau

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Industri, baik yang telah ada maupun baru akan dikembangkan, perlu diarahkan untuk memenuhi Standar Industri Hijau yang berlaku secara nasional.

Tabel IV. 29 Program Pengembangan Pemberdayaan Industri Hijau

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku kepentingan				Tahun						
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Lain-lain	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2040
1	Pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau oleh Industri di Kabupaten Tasikmalaya	Kementerian Perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	-	√	√	√	√	√	√	√
2	Mendukung peningkatan kompetensi auditor SIH di Kabupaten Tasikmalaya	Kementerian Perindustrian	Pemerintah Daerah Propinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Terkait	√	√	√	√	√	√	√
3	Penyiapan dan pelaksanaan program 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada industri	-	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	-	√	√	√	√	√	√	√
4	Pemberian penghargaan pada industri di Kabupaten Tasikmalaya yang telah memenuhi SIH	-	Dinasterkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	-	√	√	√	√	√	√	√
5	Sosialisasi program 3R ke masyarakat, terutama generasi muda	-	Dinas terkait perindustrian	Dinas terkait perindustrian	Sekolah, Perguruan Tinggi	√	√	√	√	√	√	√

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tasikmalaya 2020-2040 akan menjadi pedoman pembangunan industri bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen RPIK ini diharapkan untuk dapat dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung pembangunan industri untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Tasikmalaya serta visi misi umum pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021. Kedepannya segala kebijakan terkait industri diharapkan dapat mengacu pada RPIK ini.

